

Nurlaila, MA. - Andri Soemitra, MA.  
Zulham, M.Hum. - Ahmad Syakir, MA.

# PERAN PEREMPUAN DALAM PERTAHANAN EKONOMI

Penelitian Pasca Banjir Bandang  
di Bukit Lawang Kecamatan Bohorok  
Kabupaten Langkat  
Provinsi Sumatera Utara

# **PERAN PEREMPUAN DALAM PERTAHANAN EKONOMI**

**Penelitian Pasca Banjir Bandang  
di Bukit Lawang Kecamatan Bohorok  
Kabupaten Langkat  
Provinsi Sumatera Utara**

**PERAN PEREMPUAN DALAM  
PERTAHAN EKONOMI**

Penulis  
**Nurlaila, MA.**  
**Andri Soemitra, MA.**  
**Zulham, M.Hum.**  
**Ahmad Syakir, MA.**

Disain Sampul  
Wal Ashri Art

Tata Letak  
Susanto

ISBN: 978-602-8345-51-4

Penerbit  
Wal Ashri Publishing  
Jalan Karya Kasih Perumahan Pondok Karya Prima Indah  
Blok A No. 7 Medan Telp: 061-7864374  
0812-755-87-997

Kerjasama  
Pokja Akademik PIU IsDB  
IAIN Sumatera Utara

**Nurlaila, MA.  
Andri Soemitra, MA.  
Zulham, M.Hum.  
Ahmad Syakir, MA.**

# **PERAN PEREMPUAN DALAM PERTAHANAN EKONOMI**

**Penelitian Pasca Banjir Bandang  
di Bukit Lawang Kecamatan Bohorok  
Kabupaten Langkat  
Provinsi Sumatera Utara**

**Diterbitkan:  
Pokja Akademik PIU IsDB  
IAIN Sumatera Utara**



# DAFTAR ISI

## DAFTAR ISI

### BAB I

<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
Latar Belakang .....	1
Perumusan Masalah.....	6
Pembatasan Masalah.....	6
Signifikansi Penelitian.....	7

### BAB II:

#### PEREMPUAN DALAM PERTAHANAN EKONOMI

<b>KELUARGA</b> .....	9
A. Perempuan dan Realitas Sosialnya.....	12
B. Multi Peran Perempuan.....	19
C. Peran Perempuan dalam Pembangunan.....	37
D. Peran Perempuan dalam Pertahanan Ekonomi Keluarga.....	41

### BAB III

<b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	49
A. Tempat dan Waktu Penelitian.....	49
B. Metode Penelitian.....	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	50
D. Teknik Analisis Data.....	50

### BAB IV

<b>PERAN PEREMPUAN DALAM PERTAHANAN EKONOMI KELUARGA PASCA BANJIR BANDANG</b> .....	53
---	----

<b>DI BUKIT LAWANG.....</b>	<b>53</b>
A. Deskripsi Wilayah Penelitian.....	53
B. Peran Produktif Perempuan dalam Pertahanan Ekonomi Keluarga Pasca Banjir Bandang di Bukit Lawang .....	82
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Produktif Perempuan dalam Pertahanan Ekonomi Keluarga Pasca Banjir Bandang di Bukit Lawang .....	91
D. Akses dan Kontrol Perempuan Terhadap Sumber Daya dalam Pertahanan Ekonomi K eluarga Pasca Banjir Bandang di Bukit Lawang .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>101</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasca banjir bandang di Bukit Lawang pada 2 Nopember 2003<sup>1</sup> bukan hanya merusak ekosistem Leuser saja, namun juga meruntuhkan sendi-sendi ekonomi kerakyatan di lokasi wisata tersebut. Sebagai lokasi wisata di Sumatera Utara, Bukit Lawang yang dahulunya mampu mengundang wisatawan domestik dan asing dalam jumlah yang cukup signifikan ternyata dipaksa kembali untuk membangun kawasan wisata tersebut dari titik nol. Kawasan Wisata Bukit Lawang mulai dibangun dan dikembangkan pada tahun 1980,<sup>2</sup> dan ditetapkan sebagai kawasan Taman Nasional Gunung Lauser (TNGL) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 096/KPTS-II/1984.

Ada beberapa penyebab banjir banding di bukit Lawang, antara lain:

Pertama Teori Danau, terdapat beberapa danau di hulu sungai yang meluap akibat curah hujan yang tinggi, dan akhirnya menyeret pohon-pohon di sekitar DAS.<sup>3</sup>

Kedua Teori *Illegal Logging*, penyebab banjir banding Bukit Lawang adalah penebangan hutan secara ilegal di wilayah TNGL

---

<sup>1</sup>Lihat Waspada 3 Nopember 2003, Analisa 3 Nopember 2003, Kompas 3 Nopember 2003

<sup>2</sup>Pemerintah Kabupaten Langkat, *Cikal Bakal Pembangunan Objek Wisata Bukit Lawang*, (Langkat, Langkat Press, 1994), h. 13

<sup>3</sup>Teori ini dikemukakan oleh Gubernur Sumatera Utara H. T. Rizal Nurdin, Waspada 05 Nopember 2003, No. 20817, h. 2

dan hulu Sungai Bohorok, dan diperkirakan lebih 43.000 ha hutan sudah habis dirambah oleh penebang liar dan pemegang HPH kadaluarsa.<sup>4</sup>

Ketiga Curah Hujan, tingginya curah hujan di kawasan Desa Bukit Lawang pada September (672 mm) dan Oktober (750 mm), sedangkan pada tanggal 2 Nopember (101 mm). curah hujan yang tinggi ini menimbulkan kejenuhan tanah terhadap air (*saturasi*) dan akhirnya menyebabkan erosi.<sup>5</sup>

Keempat Teori Erosi (Longsor), bahwa banjir tersebut akibat longsor di sekitar DAS yang dipicu oleh hujan deras pada beberapa hari sebelumnya. Kesimpulan ini berdasarkan hasil pantauan di hulu sungai melalui udara oleh Mike Griffiths (Intergated Development Advisor UML), Yarro Roberson (Direktur UML), Jhonson Panjaitan (Ketua Dewan Nasional Walhi Jakarta), dan Adi Susmianto (Direktur Konservasi Kawasan Departemen Kahutanan).<sup>6</sup>

Pembangunan kawasan wisata Bukit Lawang pasca banjir bandang selain mengundang konsentrasi nasional<sup>7</sup> dan konsentrasi internasional,<sup>8</sup> juga tidak terlepas andil dan peran serta masyarakat yang memiliki talenta dan SDM kepariwisataan.<sup>9</sup> Hal ini dapat dibuktikan dengan ketahanan

<sup>4</sup>Teori ini dikemukakan oleh Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE. <http://www.mediaindo.co.id/berita>, lihat juga Kompas 06 Nopember 2003, No. 20818, h. 1

<sup>5</sup>Teori ini dikemukakan oleh badan Meterologi dan Geofisika Wilayah I

<sup>6</sup><http://www.kompas.com/kompas-cetak/031/07/utama/675117.htm>. Penjarahan Marak Di Lokasi Bencana Bohorok

<sup>7</sup>Mengundang konsentrasi nasional, karena kepentingan nasional terhadap kawasan wisata Bukit Lawang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

<sup>8</sup>Mengundang konsentrasi internasional, karena dunia internasional dipandang sangat berkepentingan terhadap lokasi wisata Bukit Lawang baik dari sisi baik dari sisi ekologi, klimatologi, flora, fauna dan hutan lauser sebagai salah satu paru-paru dunia.

<sup>9</sup>Zulham, *Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Wisata Pasca Banjir Bandang di Bukit Lawang*, Laporan Penelitian hukum Lingkungan, (Program Pasca Sarjana USU, Medan, 2003), h. 65

masyarakat Bukit Lawang untuk tetap hidup dan merestorasi kawasan wisatanya.

Desa Bukit Lawang seluas 32,26 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebanyak 2.056 orang<sup>10</sup> hidup secara berdampingan baik antar suku maupun antar agama, baik secara lokal maupun secara internasional. Karena itu pula, masyarakat Bukit Lawang dipandang sebagai masyarakat yang menerima pluralisme dan multikulturalisme, hal ini dibuktikan dengan kemampuan mereka yang secara bersama-sama mengorganisir Desa Bukit Lawang untuk kembali menjadi salah satu kawasan wisata yang tangguh di Sumatera Utara. Semangat multikulturalisme ini jugalah yang memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kawasan Wista Bukit Lawang hingga saat ini, karena sesungguhnya multikulturalisme telah ada dan melekat dalam hati bangsa Indonesia sebagai pemersatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan persentase jumlah penduduk menurut agama yang dianut di Kecamatan Bohorok, Islam 87,69%, Protestas 11,07%, Khatolik 0,47%, Budha 0,18%, Hindu 0,02%, Lainnya 0,57%.<sup>12</sup> Maka berdasarkan data statistik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa umat Islam juga merupakan penduduk mayoritas di Desa Bukit Lawang.

Banjir banding Bukit Lawang menelan korban jiwa sebanyak 152 orang dengan perincian korban jiwa laki-laki sebanyak 69 orang dan korban jiwa perempuan sebanyak 83 orang. Keseluruhan korban jiwa tersebut berasal dari berbagai daerah dan bahkan ada yang berasal dari mancanegara, yakni Bukit Lawang, Gotong Royong, Bahorok, Sukarakyat, Timbang Lawan, Tanjung Morawa, Medan, Jerman, Singapura, Belanda, Austria.<sup>13</sup>

<sup>10</sup>Badan Pusat Statistik Langkat, *Kabupaten Langkat dalam Angka 2009*, h. 52

<sup>11</sup>Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, (Jakarta, LP3ES, 2002), h. 15, lihat juga Muhammad Umar Syadat Hasibuan, *Revolusi Politik Kaum Muda*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 87

<sup>12</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kabupaten Langkat dalam Angka Tahun 2008*, h. 54

<sup>13</sup>Data Korban Jiwa Banjir Bandang Bukit Lawang, Polsek

Pembangunan kawasan wisata Bukit Lawang pasca banjir bandang oleh masyarakat bukanlah tanpa hambatan. Paling tidak, pada tahun 2004 hingga 2005 pembangunan Bukit Lawang sangat erat kaitannya dengan ketahanan ekonomi keluarga, dimana pembangunan Bukit Lawang menjadi prioritas masyarakat Bukit Lawang secara umum sedangkan ketahanan ekonomi keluarga menjadi prioritas masing-masing keluarga.<sup>14</sup>

Hal ini berkaitan dengan kondisi objektif yang terjadi, bahwa banjir bandang Bukit Lawang tidak hanya merenggut korban jiwa dan kerusakan bangunan. Namun lebih parah dari itu, banjir bandang telah merusak perekonomian masyarakat dan meninggalkan keluarga korban yang masih hidup pada titik nadir yang cukup rendah.<sup>15</sup>

Bagi keluarga korban banjir bandang Bukit Lawang terpaksa harus merestorasi perekonomian keluarganya. Demikian juga halnya bagi kaum perempuan harus mampu mengembangkan potensinya untuk mempertahankan perekonomian keluarganya. Seiring dengan pembangunan kawasan wisata Bukit Lawang pasca banjir bandang, peran perempuan dalam membangun pertahanan ekonomi keluarga dipandang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dengan keuletan kaum perempuan di Bukit Lawang dalam mencari nafkah melalui perdagangan dan pelayanan jasa, baik sebagai pedagang musiman maupun sebagai pedagang tetap.

Berdasarkan hasil *grand tour* peneliti ke Desa Bukit Lawang, peneliti menemukan bahwa kaum perempuan korban banjir bandang melakukan aktivitas kewirausahaan untuk mempertahankan ekonomi keluarganya. Sebagian mereka ada yang berdagang seperti; pedagang ayam potong, pedagang nasi, pedagang asongan, kedai kelontong. Sedangkan sebagian lainnya menawarkan jasa kepariwisataan, seperti; sewa ban, sewa tikar, sewa tempat berteduh, sewa kamar mandi di kawasan wisata

---

Kecamatan Bohorok Tahun 2004

<sup>14</sup>Ega Kumala, *Penataan Ruang Kawasan Wisata Bukit Lawang Pasca Banjir Bandang*, Thesis, (Medan, Sekolah Pascasarjana USU, 2005), h. 73

<sup>15</sup>*Ibid*, 101

### Bukit Lawang.

Padahal peran kaum perempuan Bukit Lawang sebelum banjir bandang hampir sama dengan peran kaum perempuan di daerah lainnya, yakni berperan sebagai ibu rumah tangga. Sehingga, pasca banjir bandang kaum perempuan di Bukit Lawang dituntut untuk mengembangkan potensinya dalam mempertahankan ekonomi keluarga. Maka dapat disebutkan bahwa perubahan peran gender di Bukit Lawang diakibatkan oleh banjir bandang Bukit Lawang.<sup>16</sup>

Lebih jauh lagi, keterlibatan perempuan dalam pertahanan ekonomi keluarga menjadi keniscayaan bagi masyarakat Bukit Lawang dan bukan dipandang tanpa alasan. Bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya akibat banjir bandang dan menjadikannya sebagai *single parent* (orang tua tunggal), tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali mempertahankan ekonomi keluarganya dan mengambil alih peran suami sebagai tulang punggung dan kepala rumah tangga. Kendatipun pada beberapa bulan pasca banjir bandang para korban mendapatkan bantuan dari masyarakat, pemerintah dan dunia internasional, namun para perempuan yang menjadi *single parent* tetap harus membangun visi keluarganya kedepan.

Dalam membangun visi keluarga tersebut, paling tidak, ada lima (5) kewajiban perempuan sebagai isteri maupun sebagai orang tua tunggal yaitu: (1) Kewajiban terhadap agamanya (*wajibat diniyyah*), (2) Kewajiban terhadap pribadinya (*wajibat syakhsiyyah*), (3) Kewajiban terhadap rumah tangganya (*wajibat baitiyyah*), (4) Kewajiban terhadap masyarakatnya (*wajibat ijtima'iyah*), (5) Kewajiban terhadap negaranya (*wajibat wathaniyyah*).<sup>17</sup>

Perempuan memiliki peran yang multidimensi dalam keluarga, sehingga peran mereka sama dengan peran laki-laki yang bertindak sebagai pemeran utama dan bukan figuran.

---

<sup>16</sup>Hasil Grand Tour Peneliti ke Desa Bukit Lawang pada bulan Mei 2010

<sup>17</sup>A.M. Saefuddin, *Kiprah dan Perjuangan Perempuan Salihat*, dalam buku *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1996), h.70

Sehingga, jika perempuan gagal dalam memainkan perannya maka gagal pulalah keluarga tersebut. Terlebih lagi peran perempuan sebagai ibu yang merupakan pendidik pertama bagi keluarganya yang menanamkan nilai-nilai luhur dan universal.<sup>18</sup>

Fenomena peran perempuan dalam pertahanan ekonomi keluarga di Bukit Lawang pasca banjir bandang terus berlanjut hingga saat ini, sehingga peran perempuan ini juga akhirnya menjadi aset wisata bagi Bukit Lawang. Kondisi ini menarik untuk diteliti lebih lanjut untuk memahami bagaimana proses yang terjadi pada peran perempuan dalam pertahanan ekonomi keluarga pasca banjir bandang di Bukit Lawang.

## **B. Perumusan Masalah**

Dari uraian pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran perempuan dalam pertahanan ekonomi keluarga pasca banjir bandang di Bukit Lawang. Selanjutnya rumusan masalah ini dapat dirinci ke dalam tiga rumusan yang lebih spesifik, yaitu:

1. Bagaimana peran produktif perempuan korban banjir dalam pertahanan ekonomi keluarga pasca banjir bandang di Bukit Lawang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi peran produktif perempuan korban banjir dalam pertahanan ekonomi keluarga pasca banjir bandang di Bukit Lawang?
3. Bagaimana akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya yang ada dalam pertahanan ekonomi keluarga pasca banjir bandang di Bukit Lawang?

## **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada perempuan Muslim yang menjadi korban banjir bandang Bukit Lawang dan menetap di kawasan wisata Bukit Lawang, yaitu di Desa Gotong Royong, Timbang Jaya, dan Timbang Lawan.

---

<sup>18</sup>A.M. Saefuddin, *Op. Cit*, h. 89

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini dirasakan signifikan didasarkan pada pertimbangan:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang fenomena sosial empiris berkaitan peran perempuan dalam ketahanan ekonomi pasca terjadinya bencana.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap peran perempuan dalam ketahanan ekonomi pasca terjadinya bencana dan menjadi dasar bagi berbagai pihak (pemerintah, LSM, individual) dalam merumuskan program aksi dan kebijakan berkaitan dengan peningkatan kehidupan perempuan yang lebih proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan.

---

Peran Perempuan Dalam Pertahanan Ekonomi

---

## **BAB II**

# **PEREMPUAN DALAM PERTAHANAN EKONOMI KELUARGA**

### **A. Perempuan dan Realitas Sosialnya**

#### **1. Perempuan dan Bias Gender**

Dalam bahasa Indonesia, untuk menyebutkan kata “wanita” terkadang juga disebutkan “perempuan”. Kedua kata tersebut ditujukan kepada orang yang sama, lawan dari pria atau laki-laki. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, wanita adalah: (orang) perempuan (lebih halus).<sup>1</sup>

Perempuan berasal dari kata empu istri raja masa lalu dalam bahasa Melayu disebut “engku empuan”. Perempuan berarti makhluk yang diempukan, yaitu dihargai, tidak lagi sederajat dengan pria, tetapi lebih tinggi kecuali bila pria itu sendiri adalah empu. Kata “wanita” juga berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti dia yang dipuji seluruh dunia.<sup>2</sup>

Pada dasarnya perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dapat diwakili oleh dua konsep, yaitu jenis kelamin dan gender. Perbedaan jenis kelamin mengacu kepada perbedaan fisik dan biologis, terutama pada perbedaan fungsi reproduksi,

---

<sup>1</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, h. 488.

<sup>2</sup>Warsani, *Diskriminasi terhadap Wanita, Problema dan Tantangan di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Budaya pada Fakultas Hukum USU, 1998, h. 4-5.

sementara jender merupakan konstruksi sosio-kultural.

Perbedaan jenis kelamin dikenal dengan istilah “perbedaan kodrati”. Perbedaan ini bersifat mutlak dan mengacu pada hal-hal yang bersifat biologis. Laki-laki-laki dan perempuan secara kodrati dibedakan berdasarkan jenis kelamin dengan segala kemampuan yang dimiliki masing-masing. Haid, hamil, melahirkan dan menyusui merupakan kodrat biologis perempuan. Kemampuan ini merupakan karunia dan anugerah Tuhan yang ditakdirkan Allah kepada perempuan dan inilah kemudian dikenal dengan kodrat wanita. Sementara laki-laki memiliki penis dilengkapi dengan zakar dan sperma untuk pembuahan sebagai kodratnya.

Perbedaan tingkat pertama ini merupakan ketentuan Tuhan yang bersifat *nature* dan absolut, tak berubah dari masa ke masa, berlaku untuk semua manusia di segala zaman, tak pandang kaya dan miskin, kulit putih atau berwarna, beragama atau tidak, manusia modern atau perkotaan atau suku asli di pedalaman. Perbedaan ini tidak dapat diganggu gugat. Adapun perbedaan relatif antara laki-laki dan perempuan adalah sifat dan ciri masing-masing jenis kelamin yang merupakan konstruksi sosio-kultural.

Kata jender dalam bahasa Indonesia dipinjam dari bahasa Inggris, “*gender*” berarti jenis kelamin.<sup>3</sup> Arti yang diberikan tidak secara jelas dibedakan pengertian jenis kelamin dan *gender*. Konsep *gender* adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan dikenal lemah lembut cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dan sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah-lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa.<sup>4</sup>

Gender lebih pada seperangkat sikap, peran tanggung

---

<sup>3</sup>John M. Enchols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995, h. 265

<sup>4</sup>Oakley, *Sex, Gender and Society*, 1972, dalam Mansour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, h. 7-8.

jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh. Sebagai contoh, laki-laki sering digambarkan sebagai manusia yang kuat, perkasa, berani, rasional dan tegas. Sebaliknya, perempuan digambarkan dengan figur yang lemah, pemalu penakut, emosional, rapuh, dan lembut gemulai.

Artinya, perbedaan sifat, sikap dan perilaku yang dianggap khas perempuan atau khas laki-laki atau yang lebih populer dengan istilah feminitas dan maskulinitas, merupakan hasil belajar seseorang melalui proses sosialisasi yang panjang di lingkungannya. Feminitas dan maskulinitas seseorang bukanlah hal yang kodrati, melainkan dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain.<sup>5</sup>

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa gender merupakan perbedaan jenis kelamin yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan. Perbedaan biologis jenis kelamin (seks) merupakan kodrat Tuhan, karenanya secara permanen dan universal berbeda. Sementara gender adalah *behavioral difference* antara laki-laki dan perempuan yang *socialy constructed*, yakni perbedaan yang bukan kodrat atau bukan ciptaan Tuhan, melainkan diciptakan, baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan, melalui proses sosial dan budaya yang panjang. Selain itu disebutkan oleh Caplan, bahwa gender berubah dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, bahkan dari kelas ke kelas, sementara jenis kelamin (seks) tidak berubah.

Perbedaan jenis seksual dan orientasi seksual melahirkan pola sosial dalam kehidupan masyarakat yang membedakan kategori Sosial. Pola perbedaan yang dijalankan diruang domestik yaitu rumah tangga, keluarga inti (*family*) maupun kekerabatan (*extended family*) melahirkan konsep dalam sistem kekerabatan yang berfungsi untuk mengatur kepastian garis geneologis. Maka dikenal dengan sistem kekerabatan Patriarkhat/Patrilinial (atas dasar garis Ayah/Laki-laki) dan

---

<sup>5</sup>Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Siti Musdah Mulia (ed), Cetakan Pertama, Desember 2001, h. xii

Matriarkhat/Matrilinial (garis Ibu/Perempuan). Sepanjang menjadi pengatur diruang domestik, batas kekuasaan yang dijalankan sepenuhnya atas hubungan geneologis. Pola kategori sosial ini menjadi penting karena memiliki dimensi kultural sebagai sumber simbol-simbol kultur yang bersifat etis dan entetis Dalam keluarga yang berpenghasilan rendah (keluarga kelas bawah).

Dalam setiap masyarakat selalu ada pembagian kerja seksual antara perempuan dan laki-laki, sehingga dikenal peran jender yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Pembagian kerja seksual tersebut ada yang secara ketat diterapkan, ada pula yang longgar, tergantung lingkungan budayanya. Perbedaan jender sesungguhnya merupakan hal yang biasa atau suatu kewajaran sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan jender (*gender inequalities*). Akan tetapi realitas di masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan jender telah melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan.

Konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam struktur subordinat dalam berbagai kegiatan ekonomi telah menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan yang lebih baik. Penafsiran secara keliru terhadap sifat dan ciri masing-masing jenis kelamin sering menampilkan bias. Perempuan dianggap emosional secara berlebihan dan memiliki kemampuan yang kurang, sementara laki-laki dianggap rasional dan memiliki kemampuan yang melebihi perempuan. Perbedaan yang cenderung karakteristik ini kemudian diterjemahkan pada pembagian tugas dan peran. Laki-laki di ruang publik, sementara kaum perempuan di ruang domestik. Perbedaan non-kodrati ini sebenarnya merupakan perbedaan yang dihasilkan oleh interpretasi sosial dan tidak jarang mengatasnamakan agama, asumsi ini berjalan dan berkembang terus menerus, bahkan telah mendarah daging dalam keyakinan dan cara pandang masyarakat. Akibatnya, karakteristik yang sebenarnya bersifat relatif itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang dianggap alami bahkan mutlak.

Perbedaan jender ini telah melahirkan berbagai

ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap perempuan. Berbagai studi membuktikan bahwa ketidakadilan gender termanifestasi dalam berbagai ketidakadilan, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, *stereotyping* dan diskriminasi atau pelabelan negatif, kekerasan (*violence*), bekerja lebih panjang dan lebih lama (*double burden*) serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.<sup>6</sup>

Pengkotak-kotakan antara laki-laki dan wanita telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi laki-laki dan terutama terhadap wanita. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut.<sup>7</sup>

Bagi masyarakat tradisional, patriarki dipandang sebagai hal yang tidak perlu dipermasalahkan, karena hal tersebut selalu dikaitkan dengan kodrat dan kekuasaan adikodrat yang tidak terbantahkan. Kepercayaan bahwa Tuhan telah menetapkan adanya perbedaan laki-laki dan perempuan, sehingga perbedaan dalam kehidupan manusia pun diatur berdasarkan perbedaan tersebut. Determinasi biologis juga telah memperkuat pandangan tersebut. Artinya, karena secara biologis perempuan dan laki-laki berbeda maka fungsi-fungsi sosial ataupun kerja dengan masyarakat pun diciptakan berbeda. Laki-laki selalu dikaitkan dengan fungsi dan tugas di luar rumah, sedangkan perempuan yang berkodrat melahirkan ada di dalam rumah, mengerjakan urusan domestik saja. Perempuan bertugas pokok membesarkan anak, laki-laki bertugas mencari nafkah. Perbedaan tersebut dipandang sebagai hal yang alamiah. Itu sebabnya ketimpangan yang melahirkan subordinasi perempuan pun dipandang sebagai hal yang alamiah pula. Hal tersebut bukan saja terjadi dalam keluarga, tetapi telah melebar ke dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 12-23.

<sup>7</sup>Mansour Fakih, *ibid*, h. 12

<sup>8</sup><http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Pemberdayaan%20perempuan%20-%20erna%20sofyan%20syukrie.pdf>.

*Stereotype* tentang feminisme dan maskulinitas menurut Christ Weedon seperti yang dikutip oleh Dzuhayatin, disosialisasikan pada tataran yang hirarkis dan fungsional dengan nilai-nilai laki-laki dewasa berperan sebagai barometernya.<sup>9</sup> Dalam hal ini, laki-laki dewasa berperan sebagai penentu keputusan baik di sektor domestik sebagai kepala keluarga maupun di sektor publik sebagai pembuat tata budaya. Dalam tataran seperti ini, perempuan dan anak-anak merupakan pihak-pihak yang melaksanakan keputusan laki-laki dewasa.

Joyce P. Jacobsen menyatakan bahwa dunia patriarki telah membuat perempuan terdiskriminasi di pasaran kerja, berkurangnya pendapatan potensial yang diterima perempuan, dan berujung pada kecilnya posisi tawar perempuan (*bargaining power*) baik di lingkup domestik maupun publik.<sup>10</sup> Struktur yang timpang ini telah membuahakan perbedaan wilayah kerja antara laki-laki dan perempuan yang menempatkan superioritas laki-laki dalam kegiatan ekonomi.

Proses marginalisasi atau pemiskinan kaum perempuan tidak saja terjadi di tempat pekerjaan, juga terjadi dalam rumah tangga, masyarakat atau kultur dan bahkan Negara. Dalam rumah tangga, pemiskinan kaum perempuan tercipta karena pembagian kerja yang tidak seimbang. Perempuan, baik istri maupun anak perempuan identik dengan pekerjaan-pekerjaan domestik seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus anak dan pekerjaan lain yang dianggap tidak bernilai produk. Sedangkan laki-laki bekerja di luar rumah atau sektor publik sebagai tulang punggung keluarga yaitu sebagai pencari nafkah.

Struktur kebudayaan lainnya terutama di bidang pendidikan bagi laki-laki dan perempuan dari sejak kecil telah diarahkan pada satu pola dan ide tertentu, yaitu penonjolan maskulin bagi laki-laki dan feminis bagi perempuan. Konsekwensinya, laki-laki lebih banyak dididik untuk mampu melakukan pekerjaan yang

---

<sup>9</sup>Siti Ruhani Dzuhayatin, "Problem Peningkatan Sumber Daya Perempuan, dalam Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan", Ed. Binar, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), h. 305.

<sup>10</sup>Joyce P. Jacobsen, *The Economic of Gender*, Oxford: Blackwell, 1994, h. 93.

membutuhkan tenaga fisik, pemikiran dan yang menantang. Sementara perempuan diarahkan pada bentuk pekerjaan yang memerlukan kesabaran, ketelatenan dan yang berhubungan perasaan yang pada umumnya dianggap tidak memerlukan kekuatan fisik. Maka tidak heran jika dalam kebanyakan masyarakat Indonesia, idealita seorang perempuan adalah cakap dalam urusan-urusan rumah tangga. Perempuan dituntut mampu menjalankan peran sebagai ibu, sebagai istri, dan sebagai anggota masyarakat. Namun, kemampuan itu tidak akan menguat manakala pemahaman terhadap kesadaran kesetaraan gender belum merambah masyarakat.

## 2. Perempuan dalam Pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, perempuan dipandang sebagai manusia utuh setara dengan laki-laki. Islam mengakui adanya perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, secara tegas, Islam melarang menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk mengutamakan salah satu pihak (laki-laki atau perempuan) dan merendahkan adanya perbedaan, tetapi mengutuk perilaku yang membedakan atau diskriminatif, karena bertentangan dengan prinsip tauhid, inti ajaran Islam.

Laki-laki tidak lebih mulia dari pada perempuan. Sebaliknya pula, perempuan tidak lebih mulia dari pada laki-laki. Keduanya harus menciptakan relasi yang sejajar dan harmonis untuk menjalankan peran-peran publik maupun domestik, bukan saling mendominasi atau memarginalisasi atau menciptakan konflik yang akan menghancurkan tatanan dunia yang diisi oleh perempuan dan laki-laki.<sup>11</sup>

Dalam Al-Quran surah az-Zariyat: 56 disebutkan bahwa "Jin dan manusia hanya Aku cipta untuk menyembah Aku" mengisyaratkan bahwa wanita, sebagai manusia adalah sejajar dengan laki-laki, dan keduanya diberi pedoman al-Quran berupa perintah dan larangan yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan. Dalam kedudukannya sebagai hamba Allah,

---

<sup>11</sup> Syaikh Muhammad al-Gazālī, *al-Haqq al-Murr* (Mesir: Dār al-Bayān al-Turāsī, 1987), h. 60-61.

wanita memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki, terutama dalam bidang ibadah sebagaimana difirmankan dalam al-Quran surah at-Taubah: 71.

Demikian pula dalam hal pahala dan siksa untuk laki-laki dan perempuan tidak ada diskriminasi karena kemuliaan manusia dinilai dari ketakwaannya. Ukuran kemuliaan seorang manusia di hadapan Allah Swt. adalah prestasi dan kualitas takwanya, tanpa membedakan jenis kelaminnya (Q.S. al-Hujurat/49:13). Perempuan atau laki-laki sama-sama berpotensi untuk menjadi manusia yang paling bertakwa. Al-Quran tidak menganut paham *the second sex* yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau *the first ethnic* yang mengistimewakan suku tertentu. Setiap orang, tanpa dibedakan jenis kelaminnya dan suku bangsanya mempunyai potensi yang sama untuk menjadi 'abid dan khalifah (Q.S. an-Nisa'/4:124 dan an-Nahl/16:97).<sup>12</sup> Dengan demikian, al-Quran mendudukan perempuan pada tempat yang sewajarnya.

Beribu tahun sebelum Islam, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh, dan oleh karenanya perempuan tidak berhak bersuara, berkarya, dan berharta. Bahkan, ia dianggap tidak memiliki dirinya sendiri. Islam secara bertahap mengembalikan hak-hak perempuan sebagai manusia merdeka. Ia berhak menyuarakan keyakinannya, berhak mengaktualisasikan karya, dan berhak memiliki harta yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga masyarakat. Ini merupakan gerakan emansipatif yang tiada tara di masa itu, ketika perempuan di belahan bumi Barat masih terpuruk dalam kegelapan.<sup>13</sup>

Kaum perempuan di masa Rasulullah digambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan, dan terpelihara akhlaknya. Bahkan, dalam Al-Quran, figur ideal seorang muslimah disimbolkan

<sup>12</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Konsep Wanita Menurut Qur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam*, dalam *Wanita Islam Indonesia dalam kajian Tekstual dan Kontekstual*, Kumpulan Makalah Seminar, Seri INIS XVIII, Jakarta, 1993, h. 3.

<sup>13</sup>Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam wa-taqat al-Muattalah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah) 1964, h. 138.

sebagai pribadi yang memiliki kemandirian dalam berbagai bidang kehidupan, di antaranya;

*Pertama* kemandirian dalam bidang politik (Q.S. al-Mumtahanah/60:12) seperti figur Ratu Bulqis yang memimpin kerajaan Superpower (Q.S. an-Naml/27:23), al-Quran mengizinkan kaum perempuan melakukan gerakan oposisi terhadap berbagai kebobrokan dan menyampaikan kebenaran (Q.S. at-taubah/9:71).

*Kedua*, kemandirian di bidang ekonomi (Q.S. an-Nahl/16:97), seperti figur perempuan pengelola peternakan dalam kisah Nabi Musa di Madyan (Q.S. al-Qashas/28:23).

*Ketiga*, kemandirian dalam menentukan pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan suami bagi perempuan yang sudah menikah (Q.S. at-Tahrim/66:11) atau menentang pendapat banyak (*public opinion*) bagi perempuan yang belum menikah (Q.S. at-Tahrim/66:12).<sup>14</sup>

Terkait hak-hak perempuan,<sup>15</sup> dalam pandangan Islam perempuan menyanggah beberapa hak, antara lain:

#### a. Hak-hak perempuan di luar rumah

Dasar pijakan poin ini terdapat pada al-Quran surah al-Ahzab ayat 33 yang menunjukkan bahwa perempuan boleh meninggalkan rumahnya apabila ada keperluan/kebutuhan. Kebutuhan keluar rumah bagi perempuan tersebut antara lain mengunjungi orang tua, belajar yang sifatnya fardhu 'ayn atau *kifayah*, bekerja untuk memenuhi kebutuhannya tatkala tidak ada yang dapat memenuhinya. Hanya saja memang masih ditekankan bahwa rumah tangga adalah tugas pokoknya.

Di samping itu, terdapat berbagai riwayat yang menunjukkan peran dan keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Islam membenarkan perempuan aktif dalam

<sup>14</sup> Musdah Mulia dalam pengantar pada *A Compilation Papers Presented at The Workshop on Islam and The Advancement of Woman*, Jakarta, 21-24 April 1994, h. ii.

<sup>15</sup> Muhammad Quraish Shihab, *ibid*.

berbagai aktivitas atau secara mandiri, bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

### **b. Hak dan Kewajiban Belajar**

Sangat banyak dalil-dalil al-Quran dan Hadis yang berbicara mengenai kewajiban belajar. Laki-laki maupun perempuan diperintahkan menimba ilmu sebanyak mungkin.

Para perempuan di masa Nabi menyadari kewajiban ini, sehingga mereka bermohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi Saw.<sup>16</sup>

Ini berarti kaum perempuan dapat berfikir, mempelajari, kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini.

### **c. Hak-hak di bidang politik**

Cukup banyak dalil dari al-Quran dan Hadis yang dapat dijadikan dasar pemahaman untuk menetapkan adanya hak-hak politik bagi perempuan. Salah satu ayat yang sering dikemukakan oleh para pemikir Islam adalah Q.S. at-Taubah ayat 71 dan asy-Syura: 38. Secara umum ayat-ayat tersebut menggambarkan kewajiban melakukan kerja sama antara lelaki dan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk di bidang kehidupan politik.

Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam Islam dijunjung sepanjang masih berada pada fitrahnya. Perempuan tidak dilarang mengembangkan dirinya, baik sebagai individu, istri, ibu ataupun sebagai anggota masyarakat sepanjang peranan yang berbeda-beda itu tidak saling tumpang tindih.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Peristiwa ini terekam dalam Q.S. Ali Imran: 195).

<sup>17</sup>Wahid Zaini, *The Advancement of Women's Role*, dalam A

Misalnya dalam pengembangan dirinya sebagai individu, istri dan ibu, perempuan harus mempertahankan keharmonisan antara pengembangan diri dan implementasi fungsi-fungsi lainnya baik sebagai istri maupun sebagai ibu.

Hal ini berbeda dengan konsep *Liberasi Perempuan* yang cenderung menyalahkan peran perempuan sebagai istri dan ibu dan lebih menitikberatkan pada eksistensi individual. Sebagai konsekwensinya, institusi keluarga yang diharapkan mampu menjadi tiang penyangga negara bisa mengalami kerusakan. Di samping itu, Islam mempersamakan laki-laki dan perempuan dalam segala macam pekerjaan yang baik.

## **B. Multi Peran Perempuan**

Laki-laki dan perempuan diciptakan Allah Swt. sebagai hamba-Nya dan mengemban tugas untuk beribadah kepada-Nya dan diberi kedudukan sebagai Khalifah-Nya di muka bumi untuk mengelola bumi dan langit seisinya, memanfaatkannya demi kesejahteraan umat manusia. Kedudukan dan fungsi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam konteks keberadaannya sebagai hamba Allah dan khalifah-Nya telah mengubah nasib perempuan dari kehidupan yang hina kepada kehidupan yang terhormat sebagai makhluk Tuhan.

Kedudukan dan peran perempuan dalam perspektif Islam dapat dikaji dari segi tekstual dan kontekstual. Dari segi tekstual berarti kita mempelajari dan memahami peran kedudukan dan peran perempuan menurut ajaran-ajaran normatif sebagaimana tertulis dalam al-Quran, Hadis dan pandangan-pandangan para ulama fiqh yang telah memberikan penafsiran terhadap ajaran-ajaran normatif yang difirmankan Allah Swt. Pendekatan kontekstual terhadap pemaknaan ajaran-ajaran normatif al-Quran adalah dengan melihat dan mengkaji ajaran-ajaran tersebut sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan masyarakat akibat adanya perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi. Ini berarti ada semacam tuntutan untuk secara

kreatif mengembangkan ajaran Islam dengan tetap merujuk pada al-Quran, dalam rangka menjawab tantangan zaman dan persoalan-persoalan yang timbul di masyarakat dewasa ini.

Konsep peran dan pembagian tugas yang dicanangkan pada lima belas abad yang lalu tentu perlu diaktualisasikan dalam konteks sosial kekinian. Sehingga dari sinilah gerakan jender merupakan suatu alternatif dalam upaya mewujudkan keadilan, dalam arti merumuskan kembali nilai-nilai keadilan yang selama ini dirasa timbang oleh sebagian kaum perempuan dalam hal pembagian tugas dan peranannya.

Perempuan mempunyai berbagai peran dalam hidupnya, antara lain:<sup>18</sup>

1. Sebagai pendamping suami. Perempuan diharapkan menjadi mitra sejajar suami dalam mengelola rumah tangga dan bisa mendorong suami untuk selalu bersemangat dalam bekerja guna meningkatkan produktivitas kerjanya;
2. Sebagai pengelola rumah tangga. Perempuan diharapkan dapat menyiapkan makanan bergizi dan lingkungan yang sehat bagi keluarganya.
3. Penerus keturunan dan pendidikan anak. Perempuan diharapkan mampu mendidikan anak-anaknya dengan baik, bernafaskan Islam serta menyiapkan pendidikan yang tinggi.
4. Pencari nafkah tambahan. Perempuan diharapkan mampu mencari nafkah sebagai salah satu pengembangan potensi sumber dayanya.
5. Sebagai warga masyarakat. Perempuan juga diharapkan mampu memainkan peran dalam konteks kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat.

Berkaitan dengan gender, dikenal ada tiga jenis peran gender wanita yaitu sebagai berikut.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>Suwinah Alwy AS, *Peran Wanita dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Membincangkan Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1996), h. 151

<sup>19</sup>Kantor Menteri Negara Peranan Wanita, 1998 dan Tim Pusat

1. Peran reproduktif yaitu peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga, menyetrika, membersihkan rumah, dan lain-lain. Peran reproduktif ini disebut juga peran di sektor domestik.
2. Peran produktif yaitu peran yang dilakukan oleh seseorang, menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran ini sering pula disebut dengan peran di sektor publik.
3. Peran sosial yaitu peran yang dilaksanakan oleh seseorang untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong-royong dalam menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama.

Hanya saja multi peran yang dimainkan oleh perempuan tidak begitu mudah dijalankan begitu saja. Pembagian peran perempuan akan sangat tergantung pada pandangan dan persepsi masyarakat terhadap peran perempuan. Bagi masyarakat yang membedakan secara tajam bahwa fungsi domestik adalah peran yang harus dijalankan oleh perempuan saja tentu akan menyulitkan perempuan memainkan multi perannya.<sup>20</sup>

Saat ini pembagian tugas dan peran serta tanggung jawab perempuan agaknya masih mengacu pada faktor faktor jenis kelamin (seks). Ironisnya jenis kelamin laki-laki tampil sebagai faktor dominan dan penentu. Kaum laki-laki dikonsepsikan sebagai makhluk produktif, sementara kaum perempuan dikonsepsikan sebagai makhluk reproduktif, di mana siklus kehidupannya hanya berkisar di antara fungsi organ reproduksi, sehingga mengakibatkan marginalisasi, subordinasi, dan

---

Studi Wanita Universitas Udayana, 2003 dalam <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/peran%20wanita.pdf>

<sup>20</sup>Susan Moller Okin, *Justice Gender and the Family*, (USA: Princeton University Press)c, 1987 h. 133.

diskriminasi.<sup>21</sup> Acuan seperti inilah yang menjadi penilaian tidak adil/subyektif terhadap perempuan.

Peningkatan peran kaum perempuan bagi masyarakat Islam tidak akan mengalami kendala. Sebab sangat banyak ajaran-ajaran Islam yang mendorong dan mengangkat harkat dan derajat perempuan terkait peran serta tanggung jawabnya. Hanya saja memang harus diakui, realitas menunjukkan adanya kesenjangan yang menimpa kaum perempuan.

Carol menyebutkan ada empat kendala dalam upaya peningkatan peran perempuan, baik secara internal maupun secara eksternal, yaitu:

*Pertama*, penilaian sebagian masyarakat kita terhadap kaum perempuan yang masih dianggap sebagai makhluk lemah, tergantung, sehingga perlu dilindungi dan tidak boleh menjadi pemimpin. Ini terjadi di berbagai tempat di mana kaum perempuan bekerja, bahkan di rumah tangga dan kemudian menyebar dalam dunia politik. Semua ini mengecilkan peran perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengambilan keputusan.

*Kedua*, kaum perempuan tidak berorientasi pada dirinya, pada kepentingan perempuan dan pada peranan perempuan, tetapi berorientasi pada peranan yang diinginkan kaum laki-laki. Jadi permasalahan pokok pada diri perempuan sendiri adalah sikap rela atau patuh terhadap segala sesuatu yang meremehkan dan mengecilkan peranannya, serta merasa puas dengan perlakuan yang memanjakannya. Inilah pada dasarnya yang mengikis hasrat berprestasi diri kaum perempuan, sehingga akhirnya melemparkan dirinya hanya sebagai peranan pelengkap atau obyek.

*Ketiga*, seringnya media massa menampilkan perempuan sebagai obyek seks, sehingga menjadikan tubuh perempuan paling tidak dijadikan komoditi yang serupa dengan benda-benda layak jual. Bahkan, seringkali atas nama estetika, tubuh perempuan dieksploitasi. Citra dan penggambaran seperti ini

<sup>21</sup>Carol Tavis, *Mismeasure of women*, (New York: Touchstone) 1992, h. 15.

telah merusak tata nilai yang dianut oleh masyarakat beragama karena harkat dan martabat kemanusiaan perempuan diturunkan ke poros yang rendah sebagai komoditi dan obyek penggoda yang siap melayani hasrat seksual kaum laki-laki.

*Keempat*, peran perempuan dalam rumah tangga seringkali diidentikkan dengan kodrat perempuan, sehingga pekerjaan domestik seperti merawat, mengasuh dan mendidik dianggap sebagai kodrat yang tidak boleh diganggu gugat karena telah menjadi ketentuan Tuhan. Anehnya, pekerjaan urusan domestik yang telah menghabiskan energi dan waktu yang tidak sedikit itu seringkali dianggap sebagai pekerjaan yang tidak mulia dan terhormat.

Oleh karenanya, pembahasan peran perempuan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam berbagai dimensinya perlu dilakukan. Kedudukan dan fungsi yang sama antara laki-laki dan perempuan tentu semestinya terwujud dalam peran yang sama dalam konteks berkehidupan, baik dalam kehidupan domestik dan publik. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki kepentingan yang sama dalam kehidupan domestik dan publik.

Peran seorang ibu rumah tangga dan karier di luar rumah tentu menyita banyak waktu. Perempuan mesti berkorban banyak hal agar sukses keduanya. Jika tidak, akan terjebak pada istilah (*double burden*) peran ganda, sebagai ibu rumah tangga dengan tugas-tugas domestik dan juga sebagai pencari nafkah keluarga. Bagaimana menyasikan keduanya antara peran domestik dan karier? itu pulalah yang menuntut perempuan untuk cerdas dan belajar mengambil tanggung jawab peran mana yang akan dilakukan.

### **1. Peran Perempuan dalam Sektor Domestik**

Peran domestik yaitu peran yang dijalankan oleh seseorang untuk kegiatan yang berkaitan dengan pemeliharaan sumber daya manusia dan pekerjaan urusan rumah tangga, seperti mengasuh anak, memasak, mencuci pakaian dan alat-alat rumah tangga, menyetrika, membersihkan rumah, dan lain-lain. Peran

di sektor domestik ini disebut peran reproduktif.<sup>22</sup>

Dalam dimensi domestik, perempuan berperan sebagai istri dan ibu. Sebagai istri perempuan dituntut memainkan peranan sebagai kekasih suami, ibu, sahabat, bahkan pelindung suami. Istri juga dituntut mampu melayani jiwa dan perasaan suami. Jika suami mempunyai jiwa yang tenang, maka ia akan muncul di tengah masyarakat dengan ceria, periang, dan aktif. Istri dituntut pula mampu melayani kebutuhan lahir suami. Sebagai ibu, perempuan dituntut mampu mendidik anak-anaknya dan menata rumah tangga secara baik.<sup>23</sup>

Permasalahan utama gender di Indonesia, sampai sekarang adalah hegemoni pandangan mengenai perempuan sebagai ibu rumah tangga masih teramat kuat, sehingga baik pemerintah maupun media massa terus-menerus berbicara tentang peran ganda, padahal jika wanita masih harus membagi hidupnya menjadi dua, satu di sektor domestik dan satu lagi di sektor publik, maka menurutnya laki-laki yang mencurahkan perhatian sepenuhnya pada sektor publik akan selalu memenangkan persaingan di pasaran tenaga kerja.

Kenyataan dalam sistem sosial-kultural menunjukkan bahwa telah terjadi pembagian peran antara perempuan dan laki-laki. Perempuan diposisikan dalam peran domestik, sedangkan laki-laki diposisikan dalam peran publik. Pembagian peran ini diperkirakan sudah lama terjadi dalam sistem sosial-kultural dan tetap dilestarikan dari zaman ke zaman. Sekitar tahun 500 s.d. 323 s.M, masyarakat Yunani Kuno mengkhhususkan peran di wilayah *oikos* untuk perempuan dan peran di wilayah *polis* untuk laki-laki. Dalam konteks masyarakat Yunani Kuno, dikotomi *oikos*.

Sebagai wilayah domestik dan *polis* sebagai wilayah publik sebenarnya terkait erat dengan pembagian peran antara

<sup>22</sup>Mary Astuty, "Pendidikan Berperspektif Gender," dalam Sindhunata (ed.), *Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita, Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI* (Yogyakarta Kanisius, 2000), Cet. I, 143-146.

<sup>23</sup>Gina Puspita, *Menghadapi Peran Ganda Wanita dalam Membicarakan Feminisme*, h. 202-203.

perempuan dan laki-laki. Tradisi memingit perempuan dalam rumah, sehingga tidak terlihat oleh laki-laki yang bukan kerabat dekatnya sangat kuat pada masyarakat Yunani Kuno. Perempuan dan laki-laki menempuh kehidupannya secara demarkatif, yaitu pria berada di ruang *polis* yang menghabiskan waktunya di pasar, gedung olahraga dan sebagainya; sedangkan perempuan berada di ruang *oikos* untuk mengelola rumah tangga, menjaga anak, menenun dan memasak. Perempuan Yunani bahkan tidak boleh pergi ke pasar sebagai bagian wilayah *polis* untuk sekedar membeli makanan karena transaksi itu dianggap "terlalu rumit" untuk perempuan serta adanya keinginan melindungi mereka dari pandangan mata orang asing.<sup>24</sup>

Tidaklah mengherankan, cukup banyak gerakan feminisme yang berkembang menyikapi dominasi peran domestik terhadap perempuan. Pada akhir abad 19 tumbuh gerakan *feminisme material* yang bertujuan membebaskan perempuan dari pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan kewajiban memasak (domestik), yang menjadi beban di atas pundaknya di rumah tangga.

Peran domestik perempuan dianggap penindasan terhadap perempuan, dan pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan rendah yang tidak produktif. Hanya saja belakangan, pemikiran feminis material inipun mengalami krisis identitas dan mengandung banyak antagonisme. Oleh karenanya banyak muncul kembali ide-ide feminisme yang memuji kembali sifat-sifat feminim perempuan yang menonjolkan aspek biologis perempuan yaitu kaum perempuan lebih memiliki sifat kasih sayang dan rasa ingin damai.

Adapula perempuan yang tidak ingin dilepaskan dari sifat alamiahnya. Banyak perempuan yang aktif di sektor publik,

---

<sup>24</sup>Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, diterjemahkan oleh M.S. Nasrulloh, *Wanita dan Gender Dalam Islam, Akar-Akar Historis Perdebatan Modern* (Jakarta : Lentera Basritama, 2000), Cet. I, h. 27-29. Lihat juga Margaret Thornton, "The Cartography of Public and Private," dalam Margaret Thornton (ed.), *Public and Private, Feminis Legal Debates* (Australia : Oxford University Press, 1995), h. 2-4.

masih mendambakan perkawinan dan mempunyai anak untuk memenuhi kebutuhan alamiahnya. Bahkan, bagi perempuan yang sulit untuk mendapatkan bantuan pengasuhan anak atau pekerjaan rumah tangga, maka jalan keluarnya adalah kembali kepada sektor domestik.<sup>25</sup>

Penguatan kembali akan kepercayaan bahwa perempuan secara alami lebih baik daripada pria dalam hal pengasuhan anak, ternyata dapat membuat kaum perempuan bisa menerima dengan senang hati peran domestik dan mengurangi rasa ketidakpuasan mereka. Fungsi gender tradisional bahkan sering dianggap sebagai alat pembenaran yang valid bagi kaum perempuan yang ingin berkiprah di sektor domestik.

Peran sebagai ibu rumah tangga (domestik) bukan peran yang hina, bahkan peran yang mulia. Namun pelabelan tersebut dapat menjadi *stereo type* jika perempuan dipandang mengkhianati perannya sebagai ibu rumah tangga jika ia terlibat di wilayah publik. Jika perempuan keluar dari peran tersebut, ia dianggap sebagai perempuan nakal, tidak tahu adat atau tidak memperhatikan suami dan anak-anaknya. Oleh karenanya, Ide persamaan gender juga sejatinya mampu mendorong kaum pria untuk ikut serta dalam pekerjaan domestik.

## 2. Peran Perempuan dalam Dimensi Publik

Peran perempuan dalam dimensi publik terdiri dari peran di sektor produktif dan komunitas. Peran produktif merupakan peran yang dilakukan oleh seorang perempuan, menyangkut pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, baik untuk dikonsumsi maupun untuk diperdagangkan. Peran sosial perempuan merupakan peran yang dilaksanakan oleh seorang perempuan untuk berpartisipasi di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti gotong-royong dalam menyelesaikan beragam pekerjaan yang menyangkut kepentingan bersama.

Memasuki abad dua puluh, semakin banyak kaum perempuan yang menduduki jabatan-jabatan yang sebelumnya

---

<sup>25</sup>Ratna Megawangi, *Feminisme: Menindas Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membicarakan Feminisme*, h. 170.

hanya diperuntukkan bagi kaum pria. Perempuan secara alamiah dipandang lebih memiliki kepekaan, keluwesan, dan kebijaksanaan dalam memutuskan suatu permasalahan. Dalam mengambil keputusan perempuan dianggap lebih mengutamakan realitas, rasio, dan perasaan, ketimbang pria yang lebih mementingkan emosi dan harga dirinya. Namun, di sisi lain semua itu juga menghadapkan perempuan pada kenyataan harus menentukan pilihan 1) berkarir di luar rumah, sekaligus menata rumah tangga, 2) berkarir di luar rumah dan menomorduakan urusan rumah tangga, dan 3) berkarir di luar rumah tanpa berumah tangga.<sup>26</sup>

Secara psikologis, perempuan mendambakan rumah tangga yang bahagia dipenuhi tawa riang anak yang dilahirkan. Berkarir di luar rumah juga merupakan usaha penting guna menunjang kebutuhan perekonomian rumah tangga. Perempuan harus menentukan pilihan atas pertimbangan-pertimbangan rasional dan tanggung jawab, bukan saja kepada pribadinya sendiri, melainkan juga terhadap rumah tangganya.

Sejarah dan tradisi beberapa suku di Indonesia ternyata telah mencatatkan persenyawaan kedua peran tersebut. Laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga sama-sama memiliki peran dan tanggung-jawab domestik yang setara. Di berbagai daerah secara tradisional, ternyata telah dikenal aktivitas perempuan di sektor publik yang juga produktif. Mereka tidak menjalankan sebuah fungsi yang dibedakan sebagai *career woman* atau *housewife* secara terpisah.

Sebagai contoh, perempuan suku Batak Karo di Sumatera Utara yang mendiami dataran tinggi Karo Sumatera Utara. Kota yang terkenal dengan di wilayah ini adalah Berastagi dan Kabanjahe. Berastagi merupakan salah satu kotaturis di Sumatera Utara yang sangat terkenal dengan produk pertaniannya yang unggul. Mayoritas suku Karo bermukim di daerah pegunungan ini, tepatnya di daerah Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak. Salah satu keunikan masyarakat Karo adalah peran perempuan yang sangat dominan dalam pengolahan lahan pertanian, mulai

<sup>26</sup>Tumbu Saraswati, *Peran Ganda Wanita Sebagai Sumber Daya Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Generasi Muda dalam Membicarakan Feminisme*, h. 157-158

dari hulu sampai ke hilir.

Hanya saja memang sering pula akibat keterbatasan ekonomi perempuan muncul sebagai pencari nafkah. Umumnya perempuan yang terpaksa terjun ke sector produktif ini tidak dibekali disiplin ilmu yang memadai. Hal ini memaksa perempuan bekerja pada sektor buruh dan tenaga kasar. Mereka terlibat juga dalam proses produksi di sawah, di pasar, kerja kasar bahkan berburu maupun berbagai pekerjaan lainnya.

Peran produktif perempuan juga akan semakin meningkat ketika suami meninggal dunia dan perempuan tersebut terpaksa menjalani hidup sebagai single parent. *Single Parent* berasal dari bahasa Inggris yang berarti orang tua tunggal. Orang tua tunggal adalah suatu kondisi di mana anak dibesarkan oleh salah seorang dari orang tuanya baik diakibatkan oleh adanya perceraian atau diakibatkan oleh meninggalnya salah satu dari orang tuanya. Orang tua tunggal adalah suatu kenyataan dan menjadi sebuah fenomena yang makin dianggap biasa dalam masyarakat modern.

Jika perempuan yang berperan sebagai orang tua tunggal, maka isteri harus berfungsi menjadi ibu sekaligus ayah bagi anak-anak mereka. Sebagai konsekuensinya, isteri harus menjalankan multi peran dan mengambil tanggung jawab penuh dalam keluarga, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, cara mengambil keputusan yang tepat untuk kelangsungan keluarga, psiko seksual, ritual keagamaan dan pola asuh anak, dan berusaha menguatkan anggota keluarga atas persoalan yang dihadapi.

Wanita sebagai orang tua tunggal melaksanakan tanggung jawab mencari nafkah. Mereka lebih banyak memilih untuk mengurus anak mereka sendiri tanpa suami, sehingga banyak diantara mereka yang mengalami stress. Menurut Glasser perempuan sebagai orang tua tunggal mempunyai kecenderungan terisolasi, membiarkan diri mereka terkucil dari persahabatan dan pergaulan dunia luar. Simon de Beavior menyatakan bahwa wanita banyak mengalami penurunan tingkat rasional dan sosial akibat dari (kurungan) tugas-tugas rumah tangga seperti mengurus suami dan anak-anak, memasak,

menjahit, mencuci dan sebagainya.<sup>27</sup>

Di tengah berbagai masalah yang timbul para wanita sebagai orang tua tunggal tersebut haruslah mempunyai strategi pemecahan masalah di dalam dirinya supaya mampu dan mau untuk menyelesaikan masalahnya seorang diri karena masalah itu timbul seiring dengan kondisi biologis, perkembangan anak, dan kondisi perekonomian yang sedang dalam masa resesi yang mempengaruhi naiknya harga-harga kebutuhan pokok sehingga biaya hidup semakin mahal dan sulit untuk dijangkau. Sehingga dengan demikian, inilah tantangan yang diharapkan oleh wanita sebagai orang tua tunggal.

### 3. Konsep Islam tentang Multi Peran Perempuan

Gerakan feminisme Islam cenderung memberikan kaum perempuan peran yang lebih besar di ruang publik.<sup>28</sup> Hal ini tercermin dalam argumentasi yang disampaikan pada berbagai sumber ajaran Islam.

Pada zaman sebelum Islam, kaum perempuan selalu berada di bawah kezaliman kaum pria, diperjualbelikan laksana binatang dan barang, tidak memperoleh hak-hak menurut undang-undang dan tidak dapat kedudukan dalam masyarakat sebagaimana yang sewajarnya diberikan kepada mereka dan seharusnya diakui oleh masyarakat.

Wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, wanita harus tinggal di rumah saja, tidak mempunyai andil dalam kehidupan masyarakat, dipaksa kawin dan ditindas, diwarisi dan tidak pernah menguasai. Kalau ada yang memberikan kekayaan kepada mereka, maka tidak boleh membelanjakan tanpa seizin suami, karena suami selalu beranggapan bahwa merekalah yang paling berhak

---

<sup>27</sup>Arthanto Ridho Laksono, *Pemecahan Masalah Pada Wanita Sebagai Orang Tua Tunggal*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, h. 4-5.

<sup>28</sup>Saied Reza Amali, *Harapan-Harapan Feminis dan Respon Perempuan Muslim*, dalam *Membela Perempuan; Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, (Jakarta: Penerbit Al-Huda), 2005, h. 27.

membelanjakan kekayaan itu.

Pada masa Islam, perlindungan terhadap perempuan mendapatkan tempat yang menggembirakan, termasuk perlindungan perempuan dalam memelihara dan mempertahankan haknya atas akses kontrol terhadap sumber ekonomi yang dimilikinya. Islam membenarkan perempuan untuk memiliki sesuatu dan bertindak atas hak miliknya itu.

Islam menghapus pembatasan yang diberlakukan pada perempuan dalam hal membelanjakan harta yang mereka miliki dan kesewenang-wenangan suami terhadap istri dalam masalah harta. Islam menetapkan hak kepemilikan atau pembelanjaan atas harta kepada kaum perempuan, juga menerima wasiat dan warisan seperti halnya kaum pria. Bahkan kaum perempuan memiliki hak penuh atas mahar dan nafkah, meskipun mereka berasal dari keluarga mampu, dan tidak kalah pentingnya, kaum perempuan berhak mempertahankan kekayaan yang ada di tangan mereka atas nama diri mereka sendiri.

Kalau ada perempuan yang bisa menjadi pengusaha, misalnya kemudian dia menjadi kaya atau banyak harta, ia dapat menyumbangkan sebagian hartanya di jalan Allah. Tidak ada halangan bagi perempuan untuk menjadi pengusaha, melakukan transaksi, membelanjakan hartanya dan lain-lain, asal saja ia mempunyai kemampuan untuk itu dan dapat menjaga diri dalam berkarir sebagai pengusaha serta dapat menjalankan fungsinya sebagai istri terhadap suaminya, sebagai ibu terhadap anaknya dan sebagai ratu dalam rumah tangganya.<sup>29</sup>

Dalam al-Quran berulang kali ditegaskan bahwa laki-laki dan perempuan disebut "berpasangan" (*zawj* dan *azwaj*).<sup>30</sup> Kata *zawj* (*mufrad*) dan *azwaj* (*jamak*) dalam maknanya menunjuk kepada "masing-masing dari dua yang berpasangan (*al-qarinain*) yaitu laki-laki dan perempuan atau jantan dan betina dari jenis makhluk hidup (*al-hayawanat*) yang berpasangan

---

<sup>29</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Perlindungan Islam terhadap Hak Ekonomi Perempuan dalam Membicarakan Feminisme*, h. 84.

<sup>30</sup> Lihat Q.s. *al-A'raf* / 7:189, *al-Zumar* / 39:6, *al-Rum* / 30:21, *al-Syura* / 42:11 dan lain-lain.

(*al-mutazawijah*)”<sup>31</sup> Penegasan makna yang diberikan oleh kata kunci ini nampaknya perlu diberikan untuk menghindari kesan seolah-olah al-Quran hanya menyebut kata “pasangan” diberikan untuk menunjuk kepada perempuan (isteri) semata yang dalam *khitab Allah* memang kata tersebut hampir selalu diungkapkan dalam konteks maskulin (*muzakkar*).

Lebih jauh, tujuan penciptaan pria dan wanita dalam Islam adalah untuk mengabdikan kepada-Nya, sementara tujuan syariah adalah misalnya mewujudkan keadilan (QS al-Nahl/: 90), dan menyerukan kebaikan dan mencegah keburukan (QS Ali Imran/3:104), karenanya secara umum kedudukan laki-laki dan wanita adalah sama. Bahkan, secara kualitas individu, di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan antara pria dan wanita (QS al-Hujarat/ : 13), dimana amal dan prestasi mereka sama-sama diakui Tuhan, sama berpotensi memperoleh kehidupan dunia yang layak, dan sama punya potensi untuk masuk surga (al QS Ali Imran/3 : 195).

Perbedaan mendasar antara pria dan wanita adalah, perempuan mengalami siklus menstruasi (QS al-Baqarah/2: 22), manopause (QS al-Thalaq/:4), dan melahirkan (QS Ali Imran/3: 45). Meskipun terdapat perbedaan penyebutan al-Quran dengan menggunakan al-rijal/al-nisa’(beban sosial/peran jender), al-zakar/al-untsa (Ketentuan kodrat-biologis)<sup>32</sup>, namun tidak pernah ditemukan satu ayatpun dalam al-Quran yang menyatakan, fungsi reproduksi sebagai alasan mengapa perempuan harus menjadi sub-ordinasi laki-laki. Tampaknya, pengungkapan fungsi reproduksi ini tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan perempuan dari sektor publik, hanya menjadi isyarat bahwa pria dan wanita tidak mungkin disamakan secara total.

---

31 Lihat al-Raghib al-Isfahani, *Mu’jam Mufradat Alfaz al-Quran*, (Beirut: Dar al-Katib al-‘Arabiy tt.) hal. 220. Di samping makna di atas, kata *azwaj* juga dapat berarti bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah terdiri dari berbagai unsur (*murakkabah*) seperti “*jauhar*”, “*aradh*”, “*madah*” dan “*shurah*”. Q.s. *Yasin* / 36:36, *al-Zariyat* / 51:49 dll. Dan yang Maha Tinggi (*al-fard*) hanyalah Allah swt.

32 Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan Jender* (Jakarta: Paramadina, 1999).

Tampaknya, al-Quran secara langsung mengakui adanya perbedaan antara pria dan wanita yakni fungsi reproduksi<sup>33</sup>. Meskipun begitu pembedaan ini bukanlah pembedaan yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Melainkan hanya untuk mendukung obsesi al-Quran yaitu terciptanya hubungan harmonis yang didasari rasa kasih sayang di lingkungan keluarga, dan meluas ke masyarakat dan dunia.

M. Quraish Shihab dalam *Wawasan al-Quran*, walaupun Adam dan pasangannya telah melakukan kesalahan dan dinyatakan sebagai orang yang berdosa, namun kesalahannya itu telah diampuni oleh Allah swt.<sup>34</sup> Anak-anak cucu Adam (*Bani Adam*) baik pria maupun wanita dalam ajaran al-Quran bebas dari segala dosa yang dilakukan oleh nenek moyangnya.<sup>35</sup> Bahkan mereka mendapat kemuliaan dari Tuhan (*al-karamah al-insaniyyah*) sebagai keturunan Adam dan mendapat kemudahan dalam berbagai aspek kehidupannya sebagai anugerah dari Allah.<sup>36</sup>

Lebih dari itu di atas pundak pria dan wanita sebagai pasangan kemitraan terletak tanggung jawab moral untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka dengan berbuat sesuai dengan petunjuk dan bimbingan Allah swt. Berkaitan dengan tanggung jawab ini, tidaklah tepat kalau yang satu akan mendominasi terhadap yang lain. Dan kalau terjadi kemungkinan pengembangan potensi dan bakat masing-masing pada hakikatnya adalah dalam kerangka pengembangan bentuk kemitraan dalam kehidupan berpasangan. Masing-masing mempunyai peluang untuk mengembangkan setiap potensi

---

<sup>33</sup>Menarik analisis Murtadha Muthahhari yang menyatakan: dalam al-Quran tidak terdapat satu jejakpun tentang apa yang terdapat di dalam kitab-kitab suci lainnya bahwa wanita diciptakan dari suatu bahan yang lebih rendah dari bahan untuk pria, bahwa status perempuan adalah parasit dan rendah, atau bahwa hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk kiri Adam, dan dalam Islam tidak ada satu pandanganpun yang meremehkan perempuan berkenaan dengan watak dan struktur bawaannya. Lebih lanjut lihat Murtahada Mutahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 1995).

<sup>34</sup>Lihat : Q.s. *al-Baqarah* / 2: 37.

<sup>35</sup>Lihat : Q.s. *al-Baqarah* / 2: 134

<sup>36</sup>Lihat : Q.s. *al-Isra`* / 17: 70.

yang ada pada dirinya, yang justru juga harus dikembangkan mengacu kepada konsep berpasangan.

Dengan demikian, pada prinsipnya Islam selalu melindungi hak-hak perempuan. Islam melindungi persamaan antara pria dan wanita dan tidak perlu diubah. Tentu saja dalam ajaran Islam mengandung perbedaan antara perempuan dan laki-laki tetapi perbedaan tersebut tidak bersifat diskriminatif, melainkan, perbedaan tersebut berupa pembagian tanggung jawab rumah tangga atau cuma *job description* yang beda.

Pada prinsipnya, ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw menganjurkan setiap orang, tanpa membedakan gender untuk bekerja dan berusaha sebagai bekal hidup. Anjuran untuk berusaha dan bekerja banyak sekali ditemukan dalam berbagai ayat al-Qur'an dan teks hadits Nabi Muhammad Saw. Lebih dari lima puluh tempat dalam al-Qur'an, keimanan selalu dikaitkan dengan amal shalih yang secara literal berarti kerja-kerja positif. Amal shalih yang vertikal berarti ibadah-ibadah ritual kepada Allah SWT, sementara amal shalih yang horizontal adalah ibadah-ibadah sosial, politik dan ekonomi untuk kepentingan penguatan diri, kemandirian dan keadilan masyarakat.

Berbicara mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan ada beberapa prinsip dasar yang menjadi pijakan kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam konteks berekonomi,<sup>37</sup> yaitu:

#### **a. Prinsip Tauhid**

Kesetaraan laki-laki dan perempuan berawal dari ajaran dasar tauhid. Tidak boleh ada previlasi secara khusus satu jenis kelamin terhadap yang lain, melebihi atau mengurangi hak atau melakukan pelecehan dan kekerasan karena alasan jenis kelamin. Kesetaraan ini menjadi landasan dasar bagi tugas-tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Prinsip khilafah, menegaskan bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan tidak dijadikan untuk sesuatu yang tidak bermakna (*'abats*). Tetapi untuk tugas khilafah, wakil Allah SWT di muka bumi

---

<sup>37</sup>Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an; Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 61-137.

untuk memakmurkan kehidupan dan menjamin kelangsungan.

*“Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat bahwa Aku akan menjadikan (manusia sebagai) khalifah di muka bumi” (QS. Al-Baqarah, 2: 30). “Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, dan memerintahkan kamu untuk memakmurkan (bumi) di atasnya”. (QS. Hud, 11: 61).*

Laki-laki dan perempuan dalam tugas khilafah ini adalah sama. Bahkan disebutkan, bahwa mereka satu dengan yang lain adalah mitra yang harus saling menolong dan melengkapi. *“Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, yang satu adalah mitra saudara bagi yang lain, (dalam) memerintahkan yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar, mendirikan shalat, membayarkan zakat, mentaati Allah dan rasul-Nya. Mereka semua, adalah orang-orang yang akan dirahmati Allah. Sesungguhnya Allah Maha Agung dan Maha Bijaksana”. (QS. At-taubah, 9: 71).* Amar ma’ruf adalah salah satu tugas kekhilafahan, yang bisa saja dilakukan dengan gerakan bisnis untuk kecukupan diri dan kemandirian agar terhindar dari sesuatu yang mungkar dan nista.

### **b. Prinsip Keadilan**

Keadilan di samping sebagai prinsip dasar juga menjadi tujuan utama dari segala aktivitas kekhilafahan, baik dalam bidang sosial, politik maupun ekonomi. Keadilan, dalam al-Qur’an juga disebut sebagai istilah *wasathan*. Umat *wasathan* berarti umat yang bersedia bersaksi dengan penuh kejujuran dan keadilan terhadap siapapun, tanpa pandang ras, agama, suku, maupun jenis kelamin. (lihat: al-Baqarah, 2: 143). Keadilan harus menjadi prinsip dasar dan selalu diperjuangkan, sehingga ketika ada satu orang, satu kelompok, atau satu jenis kelamin tidak memperoleh hak yang semestinya, maka demi keadilan mereka harus diperjuangkan, ditegakkan dan dibela.

Ketika perempuan, karena struktur sosial tertentu, tidak secara leluasa bisa melakukan hak dan kewajiban kekhilafannya, maka pemihakan terhadapnya menjadi sebuah

keniscayaan. Agar keadilan bisa ditegakkan, dan amanah kekhilafahan kembali bisa menjadi hak perempuan, seperti juga menjadi hak laki-laki. Dengan mendasarkan pada tiga prinsip dasar di atas, Islam sejak awal telah memberikan hak sama dalam hal usaha antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada satu ayat maupun teks hadits yang melarang perempuan melakukan usaha-usaha ekonomi dan bisnis. Bahkan beberapa ayat al-Qur'an mengisyaratkan kerja-kerja yang dilakukan perempuan. Dua putri Nabi Syuaib ra yang menggembala kambing (baca: S. Al-Qashash, 23-28), Ratu Saba yang bekerja di bidang politik dan pemerintahan (baca: QS. An-Naml, 20-44) dan perempuan yang bekerja jasa persusuan (baca: QS. Al-Baqarah, ayat 233) dan pemintalan (baca: QS. Ath-Thalaq, ayat 6).

### c. Pengakuan atas Hak Milik Perempuan

Tujuan usaha adalah kepemilikan, karena itu ketika usaha menjadi hak perempuan seperti juga hak laki-laki, maka kepemilikan juga menjadi hak kemerdekaan perempuan sepenuhnya. Ketika masyarakat Jahiliyah memiliki kebiasaan untuk mewarisi harta perempuan yang ditinggal mati suaminya, bahkan mewarisi tubuhnya, Islam datang untuk membatalkan kebiasaan keji tersebut.

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak dihalalkan bagi kamu untuk mewarisi (harta atau tubuh) perempuan dengan paksa, dan janganlah kamu menghalangi mereka (untuk menikah dengan yang lain) agar kamu bisa memperoleh sesuatu dari (milik mereka) yang telah kamu berikan kepada mereka”. (QS. An-Nisa, 4: 19).*

Ketika sesuatu telah menjadi milik perempuan, dengan jalan tukar-menukar atau kontrak yang dibenarkan, maka ia menjadi miliknya sepenuhnya. Siapapun tidak berhak mencampuri, mempergunakan atau mengambil tanpa seizinnya. Dalam hal ini, seringkali suami merasa berhak atas harta isterinya, sehingga ia terbiasa untuk menggunakan dan mengambil tanpa seizinnya. Perilaku ini telah dikritik al-Qur'an dengan pedas, bahkan disebutkan termasuk uang mahar yang diberikan suami

terhadap isteri sekalipun dalam jumlah yang sangat besar, tidak halal bagi suami untuk mengambilnya begitu saja tanpa seizin sang isteri.

*“Dan berikanlah kepada perempuan, mahar yang menjadi hak mereka dengan penuh kerelaan. (janganlah kamu mempergunakannya), kecuali jika mereka merelakan dari sesuatu (yang diberikan itu), maka makanlah ia dengan kenikmatan dan keleluasaan”. (QS. An-Nisa, 4:4).*

*“Apabila kamu ingin menggantikan pasangan kamu dengan pasangan yang lain, dan kamu telah memberikan kepadanya sejumlah harta yang melimpah, maka kamu tidak berhak untuk mengambilnya sedikitpun. Bagaimana kamu berani mengambilnya, padahal itu perbuatan bohong dan dosa yang nyata?”. (QS. An-Nisa, 4: 20).*

Ayat-ayat ini mengisyaratkan bahwa perempuan memiliki kemerdekaan penuh terhadap harta dan kekayaan yang menjadi miliknya. Persoalan apakah dia mau memberikan kepada yang lain atau menggunakannya untuk kepentingan yang dia inginkan, adalah merupakan hak dia sepenuhnya. Tetapi seringkali, pihak-pihak lain memanfaatkan kelemahan perempuan untuk mempergunakan segala yang dimilikinya. Seringkali perempuan tanpa sadar tidak menghiraukan hak-hak miliknya, tidak mencatat dan tidak menyimpannya sesuai dengan namanya, sehingga kemudian ketika terjadi perselisihan seluruh hartanya telah berpindah tangan begitu saja.

Di samping itu, Islam juga memandang bahwa bahwa kecukupan ekonomi menjadi nilai tambah tersendiri. Pada prakteknya, dalam tataran sosial kecukupan ekonomi juga menjadi kekuatan posisi tawar tersendiri untuk bisa memperoleh akses terhadap sumber-sumber sosial, politik dan ekonomi yang lain. Pengalaman perempuan menjadi sangat nyata dalam hal ini. Baik di dalam rumah tangga maupun dalam dunia publik, posisi posisi tawar mereka sangat lemah karena tidak memiliki kecukupan diri terhadap kebutuhan ekonomi mereka. Dari ketidakcukupan ini, kemudian terbangunlah stereotipe yang lain terhadap perempuan. Bahwa mereka seharusnya di rumah saja, tidak perlu bekerja, tidak perlu memiliki harta dan tidak perlu

memperoleh gaji tambahan untuk keluarga karena dia tidak ada kewajiban memberikan nafkah. Untuk merubah stereotipe ini, salah satunya adalah perempuan harus memiliki kecukupan diri dan tidak ada ketergantungan ekonomi terhadap siapapun. Ketika kecukupan ini sudah diperoleh, perempuan akan memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dalam melakukan tawar menawar dengan siapapun yang ia hadapi.

### C. Peran Perempuan dalam Pembangunan

Pemberdayaan perempuan (*empowerment of women*) diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkannya untuk memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, serta untuk terhadap berbagai sumber daya pembangunan. Dengan keberdayaan tersebut perempuan akan dapat mengembangkan kapasitas diri mengaktualisasikan perannya dalam pembangunan—keluarga dan bangsa. Oleh karenanya, kebijakan pemberdayaan perempuan diarahkan untuk secara bertahap dan berkesinambungan memenuhi kebutuhan praktis maupun kebutuhan strategis perempuan. Kebutuhan praktis perempuan adalah merupakan program intervensi untuk mengejar ketertinggalan perempuan yang biasanya berada pada tingkat individu dan meliputi kebutuhan-kebutuhan seperti kesehatan, pendidikan dan kemampuan melakukan tawar menawar. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan strategis adalah program pemberdayaan perempuan dalam mematangkan potensi yang memungkinkan perempuan dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki di peran publik.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan praktis dan strategis tersebut, strategi kebijakan yang ditempuh adalah pertama, melakukan pengarusutamaan jender dalam seluruh proses dan tahapan pembangunan yang menjamin seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik di pusat maupun di daerah dengan memasukkan dimensi

jender. Kedua, untuk mengatasi permasalahan khusus dialami perempuan adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang secara khusus ditunjukkan untuk perempuan melalui memasukkan unsur jender dalam pembangunan. Ketiga, memperkuat peran aktif masyarakat sipil dan pemerintah daerah, lembaga-lembaga yang mempunyai visi pemberdayaan perempuan melalui kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan dan keahlian untuk lebih dapat menemukan, mengenali dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi perempuan.<sup>38</sup>

Gerakan perempuan dalam ikut andil dalam pembangunan pada dasawarsa belakangan ini mengalami peningkatan cukup signifikan. Pembangunan melalui program *Woman in Development* (WID) berusaha mengintegrasikan wanita dalam program-programnya. Hanya saja WID gagal mengubah subordinasi perempuan karena tidak mempertimbangkan pola relasi gender yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, para pekerja perempuan masih sering terdesak untuk masuk lebih jauh di dalam pekerjaan produktif dengan upah sangat rendah. Perempuan lebih sering ditempatkan sebagai kelompok sasaran, bukan pelaku atau agen perubahan. Belakangan berkembang pendekatan baru bernama *Gender and Development* (GAD).

Pergeseran WID ke GAD mencerminkan pergeseran fokus, dari perempuan sebagai unsur pembangunan ke pola relasi gender yang berlaku di masyarakat. Pergeseran ini menegaskan bahwa untuk memajukan perempuan diperlukan lebih dari sekedar mengintegrasikan mereka dalam pembangunan tetapi yang utama sekali adalah mengubah pola relasi gender yang merugikan perempuan. Sementara WID memandang perempuan sebagai mata rantai yang hilang dalam pembangunan, GAD memandang masalah genderlah yang menjadi faktor kunci yang perlu pemecahan.

Premis GAD adalah bahwa relasi gender yang tidak adil merupakan halangan terbesar menuju kehidupan yang lebih baik bagi wanita-wanita miskin, dan bagi upaya mencapai

---

<sup>38</sup>Zainatun Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman jender dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan*, (Jakarta: Lembaga Kajian Humanis dan Feminis Islam), Cet. I, April 2002, h. 91.

partisipasi penuh perempuan dalam proses pembangunan. Karena gender adalah hasil konstruksi sosial yang sifatnya tidak mutlak dan berbeda-beda menurut tempat dan waktu, maka pendekatan GAD menyarankan agar masyarakat sendirilah yang menentukan persoalan gender yang mereka hadapi.

Pemahaman tentang relasi gender dan masalah yang ditimbulkannya digunakan dalam mengembangkan inisiatif-inisiatif pembangunan untuk mengubah relasi gender yang tidak adil dan memberdayakan perempuan. Pendekatan GAD yakin bahwa relasi gender adalah sesuatu yang kita diciptakan melalui program-program pembangunan.

Sebagai sebuah transformasi, pembangunan perlu memasukkan perspektif perempuan dan isu gender dalam agenda-agendanya. Disinyalir, masalah pokok pembangunan saat ini bukan lagi pertumbuhan, tetapi transformasi pada pranata-pranata social, teknologi, nilai-nilai, dan perilaku. Dalam transformasi ini kaum perempuan, meladalui gerakan feminis telah muncul sebagai salah satu kekuatan pembangunan yang tak bisa dielakkan. Pembangunan harus memenuhi tiga kebutuhan pokok masyarakat, yaitu 1) keadilan yang menuntut agar semua orang memiliki sarana dan kesempatan untuk menghasilkan nafkah minimal yang layak bagi diri sendiri dan keluarga; 2) berkelanjutan yang menuntut agar setiap generasi mengakui kewajiban memelihara ekosistem untuk generasi berikutnya; 3) ketercukupan yang menuntut agar setiap orang mempunyai hak dan kesempatan untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif.<sup>39</sup>

Salah satu buah dari GAD adalah pada bulan September tahun 2000, sekitar 189 negara di seluruh dunia menandatangani Deklarasi Millenium yang lebih dikenal dengan nama 8 deklarasi *Millenium Development Goals* (MDGs), yang salah satunya adalah pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan.

Keinginan pemerintah untuk mendudukan perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki dalam melaksanakan pem-

<sup>39</sup>Yuliani Liputo, *Gerakan Perempuan dan Evolusi Teori Pembangunan dalam Membicarakan Feminisme*, h. 95-97.

bangunan nasional tercermin dalam berbagai jenis dokumen Lembaran Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya. Seperti; Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan,<sup>40</sup> dan berbagai resolusi internasional<sup>41</sup> yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia. Keinginan pemerintah tersebut secara terus-menerus dituangkan dalam berbagai kebijakan Pemerintah Indonesia.<sup>42</sup>

Kendatipun demikian, peluang pengembangan potensi perempuan dari sudut peluang kerja sangat berhubungan secara langsung dengan *Ideologi Gender* dan *Ideologi Pembangunan*.<sup>43</sup> Ideologi Gender sangat berkaitan dengan pemilahan antara kaum laki-laki dengan perempuan yang cenderung mensubordinasikan kaum perempuan atas kaum laki-laki, dan hal ini nyata-nyata masih banyak berlaku di Indonesia. Sedangkan Ideologi Pembangunan sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi, dimana perempuan juga dituntut untuk mengembangkan potensi dan sumberdayanya guna memenuhi

<sup>40</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/ CEDAW*), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.

<sup>41</sup>*Declaration of Mexico the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peace* (Mexico 1975). *World Plan of Action for the Implementation of the Objectives of the International Women's Year. United Nations Decade for Women (Equality, Development and Peace) 1976-1985. World Conference of the United Nations Decade Women* (Copenhagen 1980). *World Conference to Review and Appraise the Achievement of the United Nations Decade for Women* (1985).

<sup>42</sup>Dadang S. Anshori, *Membincangkan Femenisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial kaum Wanita*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1997), h. 26

<sup>43</sup>Gerakan gender atau emansipasi secara terbuka dan terarah lahir pada awal abad XX, gerakan ini justru lahir dari kalangan kaum laki-laki yang menyerukan pentingnya pendidikan akademik bagi kaum perempuan. Pada gilirannya juga memunculkan peran perempuan dalam politik dan persamaan derajat antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Muhammad Thalib, *Solusi Islam terhadap Dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta, Wihdah Press Yogyakarta, 1999) h. 11

kebutuhan hidup.<sup>44</sup>

Karena itu pula, harus ada strategi yang kuat untuk membuka ruang bagi kaum perempuan dalam pengembangan potensinya. Mansour Fakih memberikan dua strategi utama, yakni: Pertama, pengintegrasian gender ke dalam seluruh kebijakan dan berbagai program, agar potensi perempuan dapat dikembangkan secara struktural dan sistemik. Kedua, advokasi perempuan, guna pengkajian terhadap letak akar persoalan ketidakadilan gender di masyarakat, serta untuk melihat substansi hukumnya (*legal substance*).<sup>45</sup>

Dalam bidang pembangunan, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam pengembangan pemberdayaan perempuan mengembangkan aspek kesadaran masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat Indonesia dituntut untuk dapat membangun dan meningkatkan kesadaran kolektif, dengan demikian akan dapat menggugah pelaksanaan dan penerapan sosialisasi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang telah diratifikasi oleh pemerintah dan menjadi komitmen internasional. Komitmen ini harus diimplementasikan dalam sistem oleh semua pihak termasuk perusahaan (swasta). Ini diharapkan agar menjadi komitmen sosial kemasyarakatan, karena melibatkan semua komponen masyarakat sehingga semua lapisan merasa memiliki tanggung jawab bersama. Aspek inilah yang merupakan faktor utama bagi keberhasilan program kesetaraan dan keadilan jender.

## **D. Peran Perempuan dalam Pertahanan Ekonomi Keluarga**

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* pertahanan berarti 1) perihal bertahan (mempertahankan); 2) pembelaan; 3) kubu atau benteng (yang dipakai untuk membela diri atau menangkis

<sup>44</sup>Tati Krisnawaty, *Peluang Kerja Perempuan Miskin dan Strategi Survive*, dalam buku Fauzie Ridjai, dkk. (Editor) *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1993), h. 160

<sup>45</sup>Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, h. 164.

serangan).<sup>46</sup> Adapun ekonomi berarti 1) ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan); 2) pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dan sebagai yang berharga; 3) tata kehidupan perekonomian (suatu negara); berekonomi 1) menjalankan suatu usaha (perdagangan, perindustrian) berdasarkan teori-teori ekonomi; 2) (berusaha) menghindari pemborosan uang, tenaga, waktu; berhemat.<sup>47</sup>

Sedangkan keluarga berarti 1) ibu bapak dengan anak-anaknya; seisi rumah; anak bini; 2) (kaum keluarga) sanak saudara; kaum kerabat.<sup>48</sup> Keluarga adalah institusi terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari keluarga inti (*nuclear family*) dan keluarga besar (*extended family*). Anggota keluarga inti terdiri atas ayah, ibu, anak dan kerabat ayah atau ibu yang umumnya terdapat pada masyarakat di negara berkembang. Sedangkan keluarga besar memiliki jumlah anggota yang tidak tetap, karena sangat tergantung pada budaya yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Anggotanya terdiri dari keluarga inti dan juga termasuk kakek, nenek, saudara ibu, saudara ayah dan lainnya. Banyaknya jumlah kerabat yang masuk dalam keluarga besar sangat bervariasi.

Untuk membentuk sebuah keluarga, Islam telah membuka lebar-lebar pintu perkawinan. Kehidupan berkeluarga yang diawali dengan proses pernikahan mengandung makna spiritual yang suci dan agung, karena terlaksananya ijab kabul antara pasangan pengantin. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau disebut dengan istilah *mitsaqon ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dalam Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1268.

<sup>47</sup>*Ibid*, h. 394.

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 676.

<sup>49</sup>*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992), hlm. 18.

Dengan demikian secara umum yang dimaksud dengan pertahanan ekonomi keluarga adalah perihal cara bertahan atau cara mempertahankan yang digunakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh keluarga. Setiap keluarga diwajibkan mencukupi kebutuhan nafkah seluruh anggota keluarganya dengan berbagai usaha yang halal. Kebahagiaan finansial adalah ketika kebutuhan *asasi* seperti sandang, papan dan pangan, serta kebutuhan *dharuri* seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, terlebih bila kebutuhan *kamali* dapat dipenuhi. Sehingga keluarga dapat hidup normal, mandiri, bahkan bisa memberikan bantuan/sedekah kepada orang lain.

Pertahanan ekonomi keluarga merupakan aspek yang sangat penting. Untuk membangun pertahanan ekonomi keluarga, sumberdaya perempuan merupakan sumberdaya manusia yang sangat potensial dan strategis untuk dikembangkan. Sebaliknya, jika potensi perempuan tidak dimanfaatkan secara optimal dan tidak didorong dalam kerangka pembangunan nasional, maka bangsa dan negara ini akan mengalami kelambanan dalam pembangunan.<sup>50</sup>

Peningkatan peran perempuan dalam perekonomian dan usaha pertahanan ekonomi keluarga ditandai oleh dua hal, *pertama* peningkatan dalam *jumlah perempuan* yang terlibat dalam pekerjaan di luar rumah tangga. *Kedua*, peningkatan dalam *jumlah bidang* pekerjaan yang dimasuki oleh perempuan. Hanya saja, dalam aktivitas ekonomi perempuan menghadapi beberapa kendala yang cukup serius. *Pertama* adanya mitos dan stereotype perempuan yang membelenggu ruang gerak perempuan. *Kedua*, struktur subordinat dan marginalisasi perempuan yang menempatkan perempuan dalam struktur subordinat dalam berbagai kegiatan ekonomi dan terpinggirkan dalam pasaran kerja yang berujung pada kecilnya posisi tawar perempuan baik di sektor domestik maupun publik. *Ketiga*, perempuan rentan terhadap kemiskinan yang disebabkan oleh

---

<sup>50</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pandangan Islam tentang Gender*, dalam buku *Membincang Feminisme*, h.151

berbagai hal.<sup>51</sup>

Bagi perempuan yang tinggal di wilayah pedesaan, banyak kasus di mana istri tidak lagi dapat menggantungkan harapan dari pendapatan suami. Hal ini umumnya terjadi karena adanya tuntutan perubahan pasar. Banyak laki-laki yang mulai melepaskan pekerjaan tradisionalnya di lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, penebangan kayu hutan, dan sebagainya demi mengejar pendapatan alternatif di daerah lain umumnya di perkotaan. Para perempuan di pedesaan ini tidak dapat lagi menggantungkan diri dari pendapatan suami untuk menyokong ekonomi keluarga. Oleh karenanya, dalam banyak hal perubahan terhadap peran perempuan di pedesaan untuk lebih mengambil peran dalam membantu ekonomi keluarga lebih dikarenakan faktor keterpaksaan. Mereka terpaksa menjadi buruh, pekerja di pasar informal dan berbagai kegiatan ekonomi lain yang dapat menghasilkan demi memenuhi kebutuhan keluarga.<sup>52</sup>

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan mengenai kemiskinan perempuan di Indonesia, terdapat beberapa hal yang sangat menarik, yaitu *pertama*, kelangkaan sumber daya dan kesulitan pangan dalam rumah tangga menyebabkan rendahnya status gizi dan pendidikan keluarga miskin dikombinasikan dengan bias alokasi asset antar rumah tangga. Secara sistematis menghasilkan lebih banyak anak perempuan yang meninggal, kurang gizi dan busung lapar serta tingkat pendidikan dan kemampuan baca tulis yang buruk. *Kedua*, perempuan harus bekerja untuk mempertahankan hidup, menyokong substensi dan pendapatan keluarga. Namun, akses mereka terhadap kredit, keterampilan serta input produksi lain terbatas dibandingkan laki-laki. Ini berimplikasi pada tingkat upah yang seharusnya dapat mereka terima dengan lebih baik, karena tingkat pendidikan dan keterampilan yang terbatas tersebut, ditambah lagi dengan adanya beban domestik yang harus ditanggungnya.

---

<sup>51</sup>Euis Amalia, *Perempuan dan Ekonomi*, dalam Potret Perempuan dalam Teori dan Realitas: meretas Paradigma Kesenjangan, (Jakarta: PSW Press), 2007, h. 86.

<sup>52</sup>Carolyn Sachs, *Gendered Fields: Rural Women, Agriculture, and Environment*, (USA: Westview Press Inc.) 1996, h. 178.

*Ketiga*, kebijakan yang ada tidak mendukung terutama terkait dengan kebijakan infrastruktur dan fasilitas peningkatan produktivitas. *Keempat*, proporsi terbesar perempuan yang bekerja di sektor pertanian kebanyakan berasal dari rumah tangga miskin absolut.<sup>53</sup>

Dari Bangladesh, dunia mulai diingatkan tentang kewirausahaan sosial yang memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan, ketika penghargaan Nobel tahun 2006 jatuh ke tangan seorang wirausahawan sosial bernama Muhammad Yunus. Yunus adalah anggota Global Academy Ashoka, di mana Ashoka dikenal sebagai sebuah organisasi global pertama yang mengembangkan konsep kewirausahaan sosial. Berkat gagasannya memberantas kemiskinan melalui sistem keuangan mikro yang lebih dikenal sebagai Grameen Bank, Yunus telah membantu jutaan kaum miskin di Bangladesh, terutama perempuan yang selama ini sangat sulit memperoleh akses. Melalui Grameen Bank, Yunus membangun sistem untuk memperoleh kesejahteraan yang lebih baik di tengah kemiskinan yang mencekik. Ia membuktikan pentingnya sistem perbankan berubah menjadi sensitif dan berdampak pada masyarakat miskin, khususnya perempuan. Ia tidak hanya menginspirasi masyarakat Bangladesh, tetapi juga masyarakat dunia.

Sebelum adanya Grameen Bank jumlah perempuan peminjam Bank kurang dari 1 persen dari seluruh peminjam di Bangladesh. Hal ini terjadi karena adanya bias jender yang terjadi. Jika seorang perempuan, walaupun kaya, ingin meminjam uang di bank maka manajer bank memberikan pertanyaan bertubi-tubi terkait keizinan suami, dukungannya, dan meminta suami ikut serta dalam bisnis tersebut. Hal ini mendorong Yunus berkomitmen untuk menyalurkan 50 persen proyek pinjaman Grameen kepada perempuan. Hasilnya, semakin banyak pinjaman yang disalurkan kepada perempuan miskin, semakin lebih cepat perubahan terjadi dibandingkan ketika disalurkan

---

<sup>53</sup>Nilanjana Mukherjee dkk, *Masyarakat, Kemiskinan, dan Mata Pencaharian: Mata Rantai Pengurangan Kemiskinan di Indonesia*, Kerjasama Departemen Bantuan Luar Negeri dan Kantor Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, 2002, h. 28.

kepada laki-laki.<sup>54</sup>

Dalam konteks Indonesia, perempuan merupakan aset ekonomi rumah tangga kebanyakan keluarga miskin mengingat etos kerja dan pengorbanan perempuan bekerja untuk bertahan hidup atau paling tidak demi kehidupan anak-anaknya. Perempuan umumnya mampu bertahan meskipun dengan pendapatan yang minim dan prasarana yang kurang mendukung keberadaannya. Karenanya, dukungan dan kesempatan bagi perempuan dalam memberdayakan dirinya dan lebih meningkatkan kesejahteraannya menjadi hal yang sangat strategis.

Ketidakberdayaan perempuan Indonesia dalam aktivitas pertahanan ekonomi keluarga sesungguhnya disebabkan rendahnya akses mereka terhadap lima modal pokok. *Pertama*, modal manusia dalam bentuk keahlian, pengetahuan, kemampuan kerja, dan kesehatan sebagai hal penting dalam mencari pekerjaan. *Kedua*, modal fisik dalam bentuk infrastruktur dasar (transportasi, perumahan, air, energy, dan komunikasi) dan peralatan produksi dan sarana yang membantu manusia untuk memperoleh mata pencarian. *Ketiga*, modal sosial berupa sumber-sumber social (jaringan, keanggotaan, kepercayaan, jalan masuk ke masyarakat yang lebih luas). *Keempat*, modal financial berupa sumber-sumber keuangan yang ada (tabungan, pinjaman atau pendanaan regular atau pension). *Kelima*, modal alam berupa tanah, sumber hayati, lingkungan hidup). Sehingga walaupun perempuan selama ini bekerja tapi tidak cukup menyejahterakannya.<sup>55</sup>

Sejalan dengan upaya yang dilakukan oleh Grameen Bank, sejumlah program pengarusutamaan gender dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi perempuan mencanangkan beberapa hal, yaitu:

1. Pemampuan perempuan dalam bidang kewirausahaan guna menumbuhkembangkan usaha ekonomi produktif.
2. Peningkatan akses perempuan terhadap sumber daya

<sup>54</sup>Alan Jolis, *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*, ter. Irfan Nasution, (Depok: Marjin Kiri), 2007, h. 73.

<sup>55</sup>Euis Amalia, *ibid.*

- alam, sumber dana/modal, kredit, dan informasi pasar.
3. Pemantapan kemitraan usaha yang dikelola perempuan dengan swasta, BUMN, dan koperasi.
  4. Pembaharuan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang setara dan adil gender.
  5. Peningkatan pelayanan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan.
  6. Peningkatan pelayanan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja perempuan.
  7. Peningkatan kualitas dan profesionalisme serta produktivitas pekerja perempuan.<sup>56</sup>

Berinvestasi kepada perempuan dapat memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini dapat dipahami karena peran perempuan yang sangat penting dalam konteks kesehatan keluarga, pendidikan anak-anak dan berbagai peran lain yang bisa dimainkannya. Keunggulan berinvestasi kepada pembangunan perempuan dalam upaya memampukan mereka dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga cenderung dapat menyebar dengan cepat melalui masyarakat dari generasi ke generasi. Hanya, saja hal ini baru bisa dilakukan melalui berbagai program yang mendudukkan perempuan pada posisi yang sejajar dalam akses ke berbagai program pengentasan kemiskinan.

Apalagi fakta menunjukkan bahwa perempuan menderita situasi lebih parah dalam lingkaran kemiskinan terkait kekurangan asupan makanan, buta huruf, dan tingkat pendidikan yang rendah, bahkan perempuan juga menanggung beban domestik yang lebih berat di rumah tangga. Oleh karenanya, perlu ada pendekatan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk meningkatkan peran ekonomi perempuan. Secara langsung perempuan diberikan akses ke program-program yang memungkinkan mereka mampu memiliki aset-aset produktif. Hal ini akan mengentaskan ketidakmampuan perempuan dalam posisinya sebagai pemilik aset-aset produktif.

---

<sup>56</sup>Rancangan Pengarusutamaan Gender di Indonesia, Kantor Meneg PP, Jakarta, 2002, h. 38-40.

Sedangkan pendekatan secara tidak langsung dilakukan melalui penghapusan diskriminasi terhadap perempuan melalui berbagai kebijakan dan program, termasuk bantuan-bantuan keuangan dan peningkatan keahlian (*skill*) perempuan dalam rangka memberdayakan mereka dalam lingkungan persaingan kerja yang pada gilirannya ikut mengentaskan kemiskinan.<sup>57</sup>

Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan baik di kota maupun di desa memiliki makna yang cukup signifikan. Partisipasi perempuan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan negara dan bangsa ini. Kemampuan dan kualitas intelektual perempuan tidak kalah bersaing dibandingkan dengan kaum laki-laki. Agar perempuan mampu berkontribusi positif terhadap pertahanan ekonomi keluarga, maka perempuan harus mempunyai hak, akses dan kesempatan dalam berusaha dan menjadi tenaga kerja untuk memperoleh pendapatan. Peningkatan peran perempuan dalam pertahanan ekonomi keluarga pada hakikatnya adalah upaya peningkatan kedudukan (*status*), peran, kemampuan kemandirian, ketahanan mental, serta spiritual perempuan sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

---

<sup>57</sup>Tazul Islam, *Microcredit and Poverty Alleviation*, (England: Ashgate Publishing Limited, 2007), h. 47-51.

## **BAB III**

# **METODOLOGI PENELITIAN**

### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan wisata Bukit Lawang Kecamatan Bohorok Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2010.

Subyek penelitian adalah para perempuan muslim yang menjadi orang tua tunggal (*single parent*) akibat banjir bandang Bukit Lawang dan menetap di kawasan wisata Bukit Lawang di Desa Gotong Royong, Desa Timbang Jaya, dan Desa Timbang Lawan.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menemukan teori dari lapangan. Ada beberapa alasan yang kuat mengapa penelitian kualitatif digunakan.

Pertama, penelitian ini dimaksudkan untuk memahami sebuah proses yaitu proses berperannya perempuan dalam mempertahankan ekonomi keluarganya dan menginterpretasikannya berdasarkan data dan informasi yang diberikan informan.

Kedua, realita bersifat multidimensi dan merupakan akibat dari kompleksitas yang beragam di mana peran perempuan yang menjadi korban banjir bandang Bukit Lawang merupakan subjek yang memiliki multiperan yang berbeda sebelum dan

sesudah terjadi bencana banjir bandang. Oleh karena itu, kajian terhadap fenomena harus dilakukan dengan menganalisa konteks yang ada dan ini hanya akan dapat dilakukan dengan pendekatan kualitatif.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

- a. Observasi, dilakukan secara non partisipan, di mana peneliti berperan hanya sebagai pengamat fenomena yang sedang diteliti.
- b. Studi dokumen/literatur yaitu mempelajari berbagai dokumen/literatur terkait masalah penelitian.
- c. Wawancara, yaitu melakukan wawancara kepada para perempuan korban banjir bandang Bukit Lawang dan berbagai pihak terkait. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur (*indept interview*).
- d. *Focus Group Discussion* (FGD). Peserta FGD terdiri dari para perempuan korban banjir bandang, pejabat terkait, serta pakar sosiologi dan ekonomi untuk memperoleh gagasan atau pendapat yang relevan dengan proses yang terjadi pada peran perempuan korban banjir bandang Bahorok.

### D. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif. Tahapan yang akan dilalui yaitu:

Pertama, membuat *proceeding* lengkap dan catatan dari semua informasi yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara secara mendalam, FGD dan studi dokumentasi.

Kedua, melaksanakan seleksi atau validitasi informasi dengan menggunakan teknik triangulasi.

Ketiga, klarifikasi data ke dalam beberapa kategori data sesuai dengan topik-topik bahasan penelitian. Selanjutnya, dalam proses analisis data dilakukan pendekatan analisis

kualitatif.

Guna menjamin keabsahan data umum yang terdapat dalam penelitian kualitatif, yaitu kredibilitas dan transferabilitas, maka dilakukan dengan:

- a. Memperpanjang keterlibatan di lapangan penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang hal-hal yang ingin diteliti.
- b. Triangulasi sumber dan metode. Data yang diperoleh dicek ulang dengan sumber berbeda (informan dan dokumen) dan metode yang berbeda (studi dokumen dari interview dan FGD). Kemudian untuk menjamin tingkat keteralihan temuan penelitian ini, peneliti akan berusaha menyajikan secara serinci mungkin.
- c. Kemudian untuk menjamin tingkat keteralihan temuan penelitian ini, peneliti akan berusaha menyajikan data serinci mungkin (*thick description*).



# **BAB IV**

## **PERAN PEREMPUAN DALAM PERTAHANAN EKONOMI KELUARGA PASCA BANJIR BANDANG DI BUKIT LAWANG**

### **A. Deskripsi Wilayah Penelitian**

#### **1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada posisi 3° 14' - 4° 13' Lintang Utara, 97°52' - 98° 45' Bujur Timur dan berada di atas 4 - 150 m dari permukaan laut.

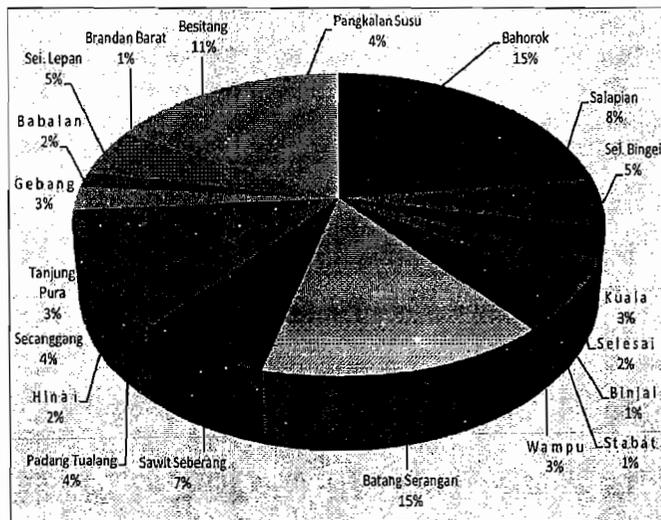
Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29Km<sup>2</sup> (626.329 Ha) yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 226 Desa serta 34 Kelurahan Definitif. Area Kabupaten Langkat di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang dan Selat Malaka, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo, di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara/ Tanah Alas, dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan di Kabupaten Langkat, luas daerah terbesar adalah kecamatan Bahorok dengan luas 955,10 km<sup>2</sup> atau 15,25% diikuti kecamatan Batang Serangan dengan luas 934,90 km<sup>2</sup> atau 14,93 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah kecamatan Binjai dengan luas 49,55



Gambaran perbandingan luas masing-masing kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1: Perbandingan Luas Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Langkat



Sumber: Data BPS Kabupaten Langkat Tahun 2009

Tabel 2: Luas Kecamatan Berdasarkan Area

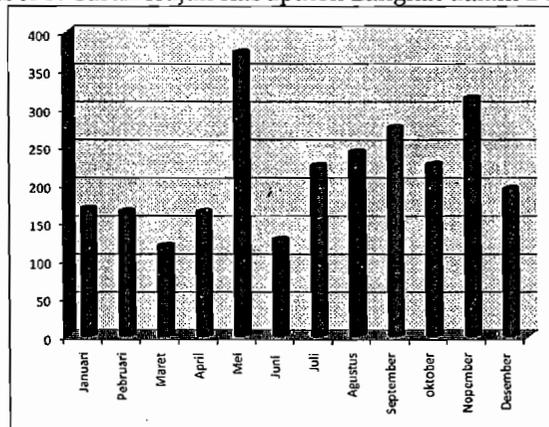
NO	KECAMATAN	LUAS (KM <sup>2</sup> )	RATIO PERSENTASE
1	Bohorok	955,10	15,25
2	Salapian	469,90	7,50
3	Sei Bingei	338,45	5,4
4	Kuala	194,76	3,11
5	Selesai	152,08	2,43
6	Binjai	49,55	0,79
7	Stabat	90,64	1,45
8	Wampu	193,75	3,09
9	Batang Serangan	934,90	14,93
10	Sawit Seberang	435,07	6,95
11	Padang Tualang	274,91	4,39
12	Hinai	114,28	1,82

13	Secanggang	248,73	3,97
14	Tanjung Pura	165,78	2,65
15	Gebang	162,99	2,60
16	Babalan	101,80	1,63
17	Sei Lapan	306,81	4,90
18	Brandan Barat	92,00	1,47
19	Besitang	710,48	11,34
20	Pangkalan Susu	271,31	4,33
Jumlah		6.263,29	100,00

Sumber: Data BPS Kabupaten Langkat Tahun 2009

Terkait dengan iklim Kabupaten Langkat, seperti umumnya daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Langkat termasuk daerah yang beriklim tropis. Sehingga daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim.

Tabel 3: Curah Hujan Kabupaten Langkat dalam Bulan



Sumber: Data BPS Kabupaten Langkat Tahun 2009

Secara geografis Desa dan Kawasan Wisata Alam Bukit Lawang terletak pada posisi koordinat 98°05'-98°100 Bujur Timur dan 30°30'-30°35 Lintang Utara. Secara administratif, Desa dan Kawasan Wisata Alam Bukit Lawang dengan luas

sekitar 32,26 km<sup>2</sup> termasuk dalam Kabupaten Langkat, dan berada dalam wilayah Kecamatan Bohorok dengan luas sekitar 955.10 km<sup>2</sup> yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Padang Tualang
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Karo
3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Tenggara
4. Sebelah Timur dengan Kecamatan Salopian

Tabel 4: Luas Kecamatan Bohorok  
Berdasarkan Kelurahan/Desa

NO	DESA/KELURAHAN	LUAS (Km <sup>2</sup> )
1	Batu Jong Jong	479.00
2	Lau Damak	40.00
3	Timbang Lawan	49.04
4	Sampe Raya	48.30
5	Bukit Lawang	32.26
6	Perkebunan Bungara	28.90
7	Pekan Bohorok	6.25
8	Empus	20.02
9	Perkebunan Turangie	16.36
10	Simpang Pulo Rambung	34.00
11	Sematar	4.39
12	Perkebunan Pulo Rambung	23.76
13	Suka Rakyat	11.20
14	Tanjung Lenggang	26.50
15	Subertung	14.94
16	Perk. Sei Musam	32.50
17	Sei. Musam Kendit	33.20
18	Sumber Jaya	23.50
19	Perkebunan Amal Tani	31.87
	Jumlah	955.10

Sumber: Kecamatan Bohorok dalam Angka Tahun 2009

Kondisi fisik topografi lahan kawasan wisata alam Bukit Lawang relatif datar sampai curam, dengan ketinggian 100-150 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahan adalah datar, bergelombang dan daerah berbukit. Dilihat dari pengelompokan

Daerah Aliran Sungai (DAS), kawasan wisata alam Bukit

Lawang masuk ke dalam DAS sungai Wampu. Sungai-sungai yang ada di sekitarnya adalah Sungai Jamur Batu, Sungai Gambir, Sungai Batu Garut, Sungai Landak, Sungai Kerikit, Sungai Bungara, yang semuanya mengalir ke Sungai Bahorok. Keadaan airnya bersih, jernih dan berwarna biru, menurut pengamatan visual kualitas air Sungai Bahorok dapat dikatakan cukup baik, sehingga air sungai ini merupakan sumber air bersih bagi penduduk yang ada di sekitarnya.

Iklim yang sejuk dan suhu udara berkisar dari 26,6<sup>o</sup> C sampai dengan 30,4<sup>o</sup>C. Curah hujan dapat dikatakan cukup tinggi yaitu 4856 mm pertahun atau sekitar 404,7 mm perbulan, dan merata sepanjang tahun.

Tanaman yang banyak dijumpai di sekitar kawasan wisata alam Bukit Lawang antara lain: kapuk (*Ceiba petandra*), bambu (*Bambusa sp*), cempedak (*Artocarpus integrata*), kelapa (*Cocos nucifera*), durian hutan (*Durio zibenthinus*), nanas (*Ananas sativus*), pisang (*Musa paradisiacal*), kayu samak (*Eugenia sp*), medan pisang rotan, (*Calanius sp*), langsung hutan (*Lonsium domesticum*), bandotan, jambu (*Psidium gujava*), tebu (*Saccharum officinaru*), dan lain-lain. Tanaman yang dibudidayakan sebagai usaha tani adalah palawija, padi, kelapa dan buah-buahan.<sup>1</sup>

Berdasarkan wawancara dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis satwa yang hidup di sekitar kawasan wisata alam Bukit Lawang yaitu; kancil (*tragulus javanicus*), kelelawar (*Tadarida mexicana*), musang (*Paradoxurus hermaproditus*), babi hutan (*Sus barbatus*), kera (*Macaca pascicularis*), tupai (*Tupaia javanica*), orang utan (*Pongo pynatus*), macan akar (*Felis bangalcuses*), dan serigala (*Cuar alpinus*).<sup>2</sup>

Jenis-jenis burung yang banyak ditemui antara lain; murai batu (*Copysychus malabaricus*), layang-layang (*Collocalis gigas*), raja udang (*Halycon pilesta*), jalak (*Terror sp*), kutilang (*Pycnonotus aurigaster*), sengayur (*Rollulus rouloul*), banyaknya

---

<sup>1</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Wisata Bukit Lawang Darna S. Purnama, pada tanggal 02 Oktober 2010

<sup>2</sup>Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Bukit Lawang Daulat Syah Purba, pada tanggal 03 Oktober 2010

jenis-jenis burung ini karena kondisi tanaman yang beraneka ragam di kawasan wisata alam Taman Nasional Gunung Lauser, sehingga bagi burung pemakan biji-bijian dan buah-buahan dengan mudah mendapat bahan pangannya, sehingga burung-burung tersebut banyak terdapat di daerah ini.

Berdasarkan penelitian penulis di lapangan dan wawancara terhadap responden, bahwa flora dan fauna di kawasan wisata alam Bukit Lawang tidak mendapat gangguan yang signifikan akibat terjadinya banjir bandang di kawasan wisata alam Bukit Lawang.<sup>3</sup>

## 2. Kondisi Demografis

Berdasarkan angka hasil Sensus Penduduk tahun 2000,<sup>4</sup> penduduk Kabupaten Langkat berjumlah 902.986 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 144,17 jiwa per Km<sup>2</sup>. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Langkat pada tahun 2000 dibandingkan tahun 1990 adalah sebesar 1,07%. Untuk tahun 2009, penduduk Kabupaten Langkat berjumlah 1.027.414 jiwa.

Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Stabat yaitu sebanyak 82.018 jiwa dengan kepadatan penduduk 904,88 jiwa per Km<sup>2</sup>, sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Brandan barat sebesar 23.515 jiwa. Kecamatan Stabat merupakan Kecamatan yang paling padat penduduknya dengan kepadatan 904,88 jiwa per Km<sup>2</sup> dan Kecamatan Batang Serangan merupakan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu sebesar 40,94 jiwa per Km<sup>2</sup>.

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan Camat Kecamatan Bohorok Drs. Skula Singarimbun, pada tanggal 03 Oktober 2010

<sup>4</sup>Dengan catatan, bahwa peneliti belum menerima hasil Sensus Penduduk pada tahun 2010 dari BPS Kabupaten Langkat

**Tabel 5: Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat Menurut Kecamatan**

NO	KECAMATAN	LUAS (KM <sup>2</sup> )	DESA	PENDUDUK
1	Bohorok	955,10	19	45.547
2	Salapian	469,90	25	51.114
3	Sei Bingei	338,45	16	47.130
4	Kuala	194,76	18	44.079
5	Selesai	152,08	13	67.227
6	Binjai	49,55	7	40.430
7	Stabat	90,64	10	82.018
8	Wampu	193,75	13	40.658
9	Batang Serangan	934,90	8	38.279
10	Sawit Seberang	435,07	5	28.395
11	Padang Tualang	274,91	10	52.162
12	Hinai	114,28	12	46.394
13	Secanggih	248,73	15	67.571
14	Tanjung Pura	165,78	19	69.990
15	Gebang	162,99	10	47.295
16	Babalan	101,80	8	62.905
17	Sei Lapan	306,81	14	53.006
18	Brandan Barat	92,00	7	23.515
19	Besitang	710,48	11	64.345
20	Pangkalan Susu	271,31	17	55.354
Jumlah		6.263,29	260	1.027.414

Sumber: Data BPS Kabupaten Langkat Tahun 2009

Jumlah penduduk Kabupaten Langkat berdasarkan jenis kelamin lebih banyak penduduk perempuan dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Pada tahun 2009 jumlah penduduk laki-laki sebesar 513.337 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 514.077 jiwa dengan rasio jenis kelamin sebesar 99,96 %.

**Tabel 6: Jumlah Penduduk Kabupaten Langkat Menurut Jenis Kelamin**

NO	KECAMATAN	PRIA	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Bohorok	22.443	23.104	45.547
2	Salapian	24.487	25.627	51.114
3	Sei Bingei	23.231	23.889	47.130
4	Kuala	21.563	22.516	44.079
5	Selesai	33.467	33.760	67.227

6	Binjai	20.215	20.215	40.430
7	Stabat	40.610	41.408	82.018
8	Wampu	20.469	20.189	40.658
9	Batang Serangan	19.232	19.047	38.279
10	Sawit Seberang	14.265	14.130	28.395
11	Padang Tualang	26.264	25.898	52.162
12	Hinai	23.190	23.204	46.394
13	Secanggih	33.621	33.950	67.571
14	Tanjung Pura	35.201	34.789	69.990
15	Gebang	23.974	23.321	47.295
16	Babalan	31.335	31.570	62.905
17	Sei Lapan	26.581	26.425	53.006
18	Brandan Barat	11.883	11.632	23.515
19	Besitang	32.549	31.796	64.345
20	Pangkalan Susu	27.757	27.597	55.354
<b>Jumlah</b>		<b>513337</b>	<b>514.077</b>	<b>1.027.414</b>

Sumber: Data BPS Kabupaten Langkat Tahun 2009

Penduduk Kabupaten Langkat mayoritas bersuku bangsa Jawa (56,87%), diikuti dengan suku Melayu (14,93 %), Karo (10,22 %), Tapanuli/Toba (4,50%), Madina (2,54%) dan lainnya (10,94%). Sedangkan agama yang dianut penduduk Kabupaten Langkat mayoritas agama Islam (90,00%), Kristen Protestan (7,56%), Kristen Katholik (1,06%), Budha (0,95%), dan Hindu (0,09%) dan lainnya (0,34%).

Tabel 7: Persentase Penduduk Kabupaten Langkat Menurut Agama

NO	KECAMATAN	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya	Jlh
1	Bohorok	87,69	0,47	11,07	0,02	0,18	0,57	100
2	Salapian	81,41	1,58	13,70	0,02	0,23	3,06	100
3	Sei Bingei	58,12	5,11	35,55	0,10	0,14	0,98	100
4	Kuala	80,23	2,16	14,82	0,10	1,28	1,40	100
5	Selesai	92,64	0,45	5,93	0,17	0,63	0,18	100
6	Binjai	97,91	0,06	0,71	0,17	1,15	0,00	100
7	Stabat	93,85	0,46	2,62	0,14	2,93	0,00	100
8	Wampu	97,60	0,15	1,67	0,40	0,14	0,05	100
9	Batang Serangan	86,92	1,99	10,65	0,00	0,14	0,29	100
10	Sawit Seberang	89,17	0,93	9,74	0,00	0,16	0,00	100
11	Padang Tualang	94,64	0,54	4,68	0,02	0,11	0,00	100

12	Hinai	98,63	0,21	0,81	0,10	0,26	0,00	100
13	Secanggih	99,68	0,06	0,18	0,01	0,07	0,00	100
14	Tanjung Pura	95,11	0,25	0,79	0,17	3,68	0,00	100
15	Gebang	86,20	1,46	11,79	0,06	0,04	0,04	100
16	Babalan	85,17	1,12	11,16	0,02	0,00	0,00	100
17	Sei Lapan	92,80	1,68	4,47	0,02	0,15	0,15	100
18	Brandan Barat	97,92	0,22	1,72	0,03	0,00	0,00	100
19	Besitang	85,85	2,37	11,47	0,05	0,06	0,06	100
20	Pangkalan Susu	95,59	0,43	3,00	0,09	0,90	0,00	100
Jumlah		90,00	1,06	7,56	0,09	0,95	0,34	100

Sumber: Data BPS Kabupaten Langkat Tahun 2009

Wilayah Kecamatan Bohorok berpenduduk lebih kurang 45.547 jiwa yang terdiri atas 22.443 jiwa laki-laki dan 23.104 perempuan, serta terbagi atas 9.20 KK. Berdasarkan suku, penduduk Kecamatan Bohorok didominasi oleh 3 (tiga) suku, yakni; Jawa 53,17%, Melayu 22,80%, dan Karo 17,69%. Penduduk Kecamatan Bohorok menurut agama dapat dipersentasekan sebagai berikut: Islam 87,69%, Katholik, 0,47%, Protestan 11,07%, Hindu 0,02%, Budha 0,18%, dan lainnya sebanyak 0,57%.<sup>5</sup>

Tabel 8: Jumlah Penduduk Kecamatan Bohorok Menurut Jenis Kelamin

NO	DESA/KELURAHAN	LK	PR	JUMLAH
1	Batu Jong Jong	1.706	1.768	3.474
2	Lau Damak	641	697	1.338
3	Timbang Lawan	2.276	2.347	4.623
4	Sampe Raya	2.488	2.531	5.019
5	Bukit Lawang	1.017	1.039	2.056
6	Perkebunan Bungara	662	699	1.361
7	Pekan Bohorok	1.561	1.615	3.176
8	Empus	1.128	1.232	2.360
9	Perkebunan Turangie	899	941	1.840

<sup>5</sup>Data BPS Kabupaten Langkat Tahun 2009 dan Kecamatan Bohorok dalam Angka Tahun 2009

Peran Perempuan Dalam Pertahanan Ekonomi

10	Simpang Pulo Rambung	1.069	1.095	2.164
11	Sematar	720	761	1.481
12	Perk. Pulo Rambung	501	531	1.032
13	Suka Rakyat	586	628	1.214
14	Tanjung Lenggang	1.549	1.571	3.120
15	Subertung	1.151	1.155	2.306
16	Perk. Sei Musam	461	473	934
17	Sei. Musam Kendit	2.033	2.040	4.073
18	Sumber Jaya	948	972	1.920
19	Perkebunan Amal Tani	1.047	1.009	2.056
Jumlah		<b>22.443</b>	<b>23.104</b>	<b>45.547</b>

Sumber: Kecamatan Bohorok dalam Angka Tahun 2009

Tabel 9: Persentase Penduduk Kecamatan Bohorok Menurut Agama

NO	DESA /KEL	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Lainnya	Jlh
1	Batu Jong Jong	80.21	0.75	18.22	0.03	0.14	0.65	100
2	Lau Damak	76.52	0.54	22.21	0.04	0.13	0.56	100
3	Timb. Lawan	98.74	0.16	0.17	0.02	0.35	0.56	100
4	Sampe Raya	76.83	0.51	21.66	0.09	0.45	0.46	100
5	Bukit Lawang	87.47	0.71	11.53	0	0.26	0.03	100
6	Perk. Bungara	82.57	0.46	16.76	0.02	0.15	0.04	100
7	Pkn Bohorok	86.48	0.54	12.43	0	0.26	0.29	100
8	Empus	96.26	0.27	2.85	0	0.22	0.4	100
9	Perk. Turangie	82.24	0.64	15.94	0.03	0.2	0.95	100
10	Simp. Rambung	78.81	0.59	18.31	0.03	0.16	2.1	100
11	Sematar	83.93	0.64	13.47	0.01	0.11	1.84	100
12	Pulo Rambung	79.47	0.92	18.76	0.02	0.13	0.7	100
13	Suka Rakyat	95.33	0.24	3.58	0.01	0.14	0.7	100
14	Tjg. Lenggang	99.86	0.06	0.05	0	0.01	0.02	100

Peran Perempuan Dalam Pertahanan Ekonomi

15	Subertung	93.42	0.45	5.21	0.03	0.18	0.71	100
16	Sei Musam	97.81	0.35	1.72	0.02	0.1	0	100
17	Musam Kendit	81.83	0.46	17.48	0.01	0.12	0.1	100
18	Sumber Jaya	94.61	0.31	4.57	0.01	0.18	0.32	100
19	P. Amal Tani	93.72	0.33	5.41	0.01	0.13	0.4	100
Jumlah		87,69	0,47	11,07	0,02	0,18	0,57	100

Sumber: Kecamatan Bohorok dalam Angka Tahun 2009

Tabel 10: Jumlah Penduduk Desa Bukit Lawang Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	DUSUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Dusun I	183	198	381
2	Dusun II	226	234	460
3	Dusun III	218	227	445
4	Dusun IV	196	205	401
5	Dusun V	194	175	369
Jumlah		<b>1.017</b>	<b>1.039</b>	<b>2.056</b>

Sumber: Data Desa Bukit Lawang Tahun 2009

Penduduk Kecamatan Bahorok merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari berbagai etnis, Melayu, Karo, Jawa yang memiliki beragam tradisi, sosial budaya dan adat istiadat. sehingga budaya yang satu dengan budaya yang lain saling berakulturasi dalam kehidupan masyarakat. Namun pada aspek-aspek tertentu dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai tradisional masing-masing suku masih tetap dipertahankan, terutama pada waktu-waktu tertentu yang bersifat istimewa seperti upacara kematian, kelahiran, perkawinan dan musim panen.

Tabel 11: Jumlah Dusun, RT, dan KK,  
Dirinci Menurut Desa/Kelurahan

NO	DESA/KELURAHAN	DUSUN	RT	KK
1	Batu Jong Jong	7	11	610
2	Lau Damak	6	7	385
3	Timbang Lawan	12	16	949
4	Sampe Raya	6	9	519
5	Bukit Lawang	5	8	523
6	Perkebunan Bungara	4	4	260
7	Pekan Bohorok	5	8	539
8	Empus	5	6	436
9	Perkebunan Turangie	7	8	425
10	SimP. Pulo Rambung	7	8	420
11	Sematar	5	6	315
12	Perk. Pulo Rambung	4	4	218
13	Suka Rakyat	5	6	270
14	Tanjung Lenggang	7	10	677
15	Subertung	7	8	580
16	Perk. Sei Musam	5	5	209
17	Sei. Musam Kendit	7	10	774
18	Sumber Jaya	4	8	509
19	Perkebunan Amal Tani	6	6	402
<b>Jumlah</b>		<b>114</b>	<b>148</b>	<b>9.020</b>

Sumber: Kecamatan Bohorok dalam Angka Tahun 2009

Penyediaan sarana fisik pendidikan dan jumlah tenaga guru yang memadai merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan partisipasi sekolah penduduk di Kabupaten Langkat. Pada tahun ajaran 2008/2009, jumlah sekolah TK 44 buah, guru 153 orang dan murid 2.071 orang, sekolah dasar ada 610 buah, guru 5.934 orang dan murid 123.737 orang. Sedangkan untuk sekolah lanjutan tingkat pertama terdapat 137 buah sekolah, 3399 orang guru dan 36.224 orang murid. Sementara itu untuk sekolah lanjutan tingkat atas terdapat 62 sekolah dengan 1433 orang guru dan 18.045 orang murid. Untuk SMK Kejuruan sekolah ada 45 buah, guru 921 orang dan murid 10.613 orang.

Di Kabupaten Langkat, rasio murid terhadap sekolah pada tahun 2008/2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rasio murid SD terhadap sekolah adalah 202. Hal ini menunjukkan bahwa tiap sekolah dasar rata-rata memiliki 202 murid. Rasio tertinggi dijumpai pada Kecamatan Stabat yaitu 308 orang murid per sekolah, sedangkan rasio terendah dijumpai pada Kecamatan Salapian yaitu 150 orang murid per sekolah.
- b. Rasio murid SLTP terhadap sekolah adalah 264. Hal ini berarti bahwa tiap SLTP rata-rata memiliki 264 murid. Rasio tertinggi dijumpai pada Kecamatan Brandan Barat yaitu 483 murid per sekolah dan rasio terendah dijumpai pada Kecamatan Wampu yaitu 141 murid per sekolah.
- c. Rasio murid SLTA terhadap sekolah adalah 291 murid per sekolah, Hal ini berarti bahwa tiap SLTA rata-rata memiliki 291 murid. Rasio tertinggi dijumpai pada Kecamatan Gebang yaitu 752 murid per sekolah dan rasio terendah dijumpai pada Kecamatan Wampu yaitu 90 murid per sekolah.

Tabel 12: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid SD, SMP, dan SMU Menurut Kecamatan di Kabupaten Langkat

N O	KECA MATAN	SD			SMP			SMU		
		Se ko lah	Gu ru	Mu rid	Se ko lah	Gu ru	Mu rid	Se ko lah	Gu ru	Mu rid
1	Bohorok	36	299	5.605	9	124	1.969	4	70	917
2	Salapian	40	351	5.980	11	133	2.063	2	46	567
3	Sei Bingei	34	357	6.212	10	194	2.262	4	73	832
4	Kuala	36	327	6.130	6	154	1.972	4	103	1.428
5	Selesai	39	420	8.642	9	180	2.702	5	103	1.323
6	Binjai	24	265	4.839	4	95	1.290	2	44	553
7	Stabat	32	483	9.871	14	336	4.116	7	216	2.666
8	Wampu	31	321	5.413	6	104	844	4	51	361
9	Batang Serangan	21	169	4.878	5	73	1.389	0	0	0
10	Sawit Seberang	16	172	3.390	4	54	732	0	0	0
11	Padang Tualang	21	227	4.630	5	72	1.743	6	115	1.614
12	Hinai	30	282	6.031	5	104	1.537	1	44	463
13	Secang gang	38	358	8.648	8	124	1.785	3	67	861
14	Tanjung Pura	44	370	8.020	7	142	2.430	3	96	1.302
15	Gebang	31	290	5.779	4	59	1.029	1	35	752

Peran Perempuan Dalam Pertahanan Ekonomi

16	Babalan	30	330	7.390	8	182	3.585	5	144	1.657
17	Sei Lapan	19	180	4.858	6	64	966	0	0	0
18	Brandan Barat	12	110	2.555	1	15	483	4	86	1.312
19	Besitang	39	316	7.603	8	88	1.453	3	51	530
20	P. Susu	37	307	7.263	7	102	1.874	4	89	907
Jumlah		610	5.934	123.737	137	2.399	36.224	62	1.433	18.045

Sumber: Data BPS Kabupaten Langkat Tahun 2009

Sedangkan di Kecamatan Bohorok, rasio murid terhadap sekolah pada tahun 2008/2009 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rasio murid SD terhadap sekolah adalah 156. Hal ini menunjukkan bahwa tiap sekolah dasar rata-rata memiliki 156 murid. Rasio tertinggi ditemui pada Desa Suka Rakyat yaitu 167 murid per sekolah, sedangkan rasio terendah ditemui pada Desa Lau Damak yaitu 119 murid per sekolah.
- b. Rasio murid SLTP terhadap sekolah adalah 219. Hal ini berarti bahwa tiap SLTP rata-rata memiliki 219 murid. Rasio tertinggi dijumpai pada Kelurahan Pekan Bohorok yaitu 232 murid per sekolah, sedangkan rasio terendah dijumpai pada Desa Timbang Lawan yaitu 203 murid per sekolah.
- c. Rasio murid SLTA terhadap sekolah adalah 229 murid per sekolah, hal ini berarti bahwa tiap SLTA rata-rata memiliki 229 murid. Rasio tertinggi ditemui pada Kelurahan Pekan Bohorok yaitu 257 murid per sekolah, sedangkan rasio terendah ditemui pada Desa Tanjung Lenggang yaitu 198 murid per sekolah.

Tabel 13: Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid SD, SMP, dan SMU Menurut Desa/Kel. di Kecamatan Bohorok

N O	DESA/ KEL	SD			SMP			SMU		
		Se ko lah	Gu ru	Mu rid	Se ko lah	Gu ru	Mu rid	Se ko lah	Gu ru	Mu rid
1	Batu Jong Jong	1	9	142	-	-	-	-	-	-
2	Lau Damak	2	16	239	-	-	-	-	-	-
3	Timbang Lawan	2	15	338	1	13	203	-	-	-

Peran Perempuan Dalam Pertahanan Ekonomi

4	Sampe Raya	2	16	318	-	-	-	-	-	-
5	Bukit Lawang	2	16	330	-	-	-	-	-	-
6	Perkebunan Bungara	2	14	322	1	12	196	-	-	-
7	Pekan Bohorok	3	29	497	3	45	696	2	38	515
8	Empus	2	16	326	-	-	-	-	-	-
9	Perkebunan Turangie	2	20	317	-	-	-	-	-	-
10	Simp. P. Rambung	2	17	324	-	-	-	-	-	-
11	Sernatar	2	15	274	-	-	-	-	-	-
12	Perk. Pulo Rambung	2	14	286	1	14	218	-	-	-
13	Suka Rakyat	1	9	167	-	-	-	-	-	-
14	Tanjung Lenggang	2	17	308	1	13	219	1	15	198
15	Subertung	1	10	153	-	-	-	-	-	-
16	Perk. Sei Musam	2	14	312	-	-	-	-	-	-
17	Sei. Musam Kendit	2	17	305	1	13	224	1	17	204
18	Sumber Jaya	2	17	321	-	-	-	-	-	-
19	Perkebunan Amal Tani	2	18	326	1	14	213	-	-	-
Jumlah		36	299	5.605	9	124	1.969	4	70	917

Sumber: Kecamatan Bohorok dalam Angka Tahun 2009

Tabel 14: Jumlah Siswa Berdasarkan Dusun di Desa Bukit Lawang

NO	DUSUN	SD	SMP	SMU	PT
1	Dusun I	63	9	6	2
2	Dusun II	77	12	8	4
3	Dusun III	62	15	11	6
4	Dusun IV	67	18	14	7
5	Dusun V	61	13	12	2
Jumlah		330	67	51	21

Sumber: Data Desa Bukit Lawang Tahun 2009

### 3. Tipologi Masyarakat Bukit Lawang

Menurut tipologi wilayah, Kabupaten Langkat dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu; Langkat Hulu, Langkat Hilir, dan Teluk Aru,<sup>6</sup> yang proses pemekarannya sudah diujai pada tahun 2008. Rencana pemekaran Kabupaten Langkat terdiri atas wilayah Langkat Hulu, yakni Kecamatan Bohorok, Kutambaru, Sirapit, Salapian, Kuala, Sei Bingei, dan Selesai. Wilayah Langkat yaitu Kecamatan Binjai, Stabat, Wampu, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang, Hinai, Secanggang, dan Tanjung Pura. Sedangkan Wilayah Teluk Aru meliputi Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lapan, Brandan Barat, Pematang Jaya, Besitang, dan Pangkalan Susu.<sup>7</sup>

Masyarakat Kabupaten Langkat adalah masyarakat yang majemuk (*plural*), kemajemukan tersebut dapat terlihat dari jumlah penduduk Kabupaten Langkat menurut agama dan suku. Dari sudut agama, interaksi antar agama diseluruh kecamatan se-Kabupaten Langkat terbangun cukup lama, hal ini terbukti dari penyebaran agama-agama hampir di seluruh kecamatan-kecamatan. Sedangkan dari sudut kesukuan, Kabupaten Langkat yang seyogyanya adalah wilayah perkembangan suku Melayu, ternyata jumlah penduduknya didominasi oleh suku Jawa hingga lebih dari 50 %. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten Langkat sangat *wellcome* terhadap berbagai agama, etnis dan budaya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Laporan Kunjungan Kerja Pansus Pemekaran Kabupaten Langkat Berdasarkan Surat Perintah Ketua DPRD Kabupaten Langkat Nomor 171-112/SP/DPRD/2008

<sup>7</sup>Seluruh Fraksi memberikan pandangan dan persetujuan atas pemekaran Kabupaten Langkat pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Langkat tentang Pengambilan Keputusan Pemekaran Kabupaten Langkat, pada tanggal 21 Februari 2008. Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat.

<sup>8</sup>Hasil wawancara dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Langkat pada tanggal 26 Oktober 2010 di Stabat. Lebih lanjut dia menyebutkan "Di Kabupaten Langkat ini tidak pernah ada perang antar suku dan perang antar agama, kami sudah terbiasa hidup berdampingan dengan perbedaan agama dan suku. Kami juga telah berbaur antar suku dan budaya satu sama lainnya, seperti bahasa, di wilayah Langkat biasa

Jika dilihat dari definisi interaksi sosial, merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antara orang-perorang, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia,<sup>9</sup> maka interaksi sosial di Kabupaten Langkat sudah mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

Berlangsungnya proses interaksi sosial didasarkan pada berbagai faktor, misalnya; faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi dan faktor simpati. Faktor imitasi dapat mendorong seseorang untuk seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya kemudian diterima oleh pihak lain. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Sedangkan faktor simpati merupakan suatu proses di mana seseorang merasa tertarik dengan orang lain.<sup>10</sup>

Masyarakat Kabupaten Langkat yang majemuk dan saling berinteraksi tersebut, berujung pada terciptanya masyarakat yang multikultural. Multikulturalisme adalah sebuah filosofi, kadang juga dianggap sebagai ideologi, yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara.<sup>11</sup>

Indonesia memiliki sejarah multikulturalisme sebelum merdeka, multikulturalisme di Indonesia berjalan seiring de-

---

suatu suku mempelajari bahasa suku lain, malah dalam kebudayaan ada juga suku melayu yang memerankan permainan *kuda gepang*, atau suku Melayu nyanyi karo, dan suku karo menyanyi Melayu dalam pesta."

<sup>9</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta, Universitas Indonesia, 1996), h. 67

<sup>10</sup>*Ibid*, h. 69-70

<sup>11</sup>Muhammad Umar Syadat Hasibuan, *Revolusi Politik Kaum Muda*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 87

ngan kedatangan bangsa Eropa yang akhirnya menjadi penjajah, dan kehadiran pendatang dari Timur Tengah yang kemudian ikut membangun dan mengukir sejarah negeri ini. Fenomena tersebut merupakan bukti bahwa multikulturalisme telah ada dalam hati bangsa Indonesia.<sup>12</sup> Sejarah kontemporer juga mencatat bahwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1908, Sila-Sila Pancasila, UUD 1945, simbol Bhineka Tunggal Ika, dan semangat gotong royong, merupakan bukti yang tidak terbantahkan tentang jiwa dan semangat multikultural bangsa ini.<sup>13</sup>

Tidak dapat dipungkiri, bahwa masyarakat Indonesia terbentuk dari beragam suku dan agama. Demikian juga halnya dengan masyarakat Bukit Lawang, multikulturalisme menjadi semacam respon kebijakan baru terhadap keberagaman. Dengan kata lain, komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup, sebab yang terpenting adalah bagaimana komunitas-komunitas yang berbeda tersebut diperlakukan sama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Disinilah konsep multikulturalisme memberikan kontribusi nyata terhadap agenda demokratisasi. Hal ini terbukti dari hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2008, dimana etnis dan kesukuan tidak lagi menentukan dalam pemenangan PILKADA. Dari sejumlah calon pasangan Kepala Daerah Kabupaten Langkat, ternyata dimenangkan oleh pasangan Ngogesa Sitepu dan Budiono yang berasal dari suku Karo dan Jawa.

Model multikulturalisme Indonesia sesungguhnya telah diberi acuan oleh pendiri bangsa Indonesia dalam mendisain kebudayaan bangsa, hal ini terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi "Kebudayaan bangsa adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah".<sup>14</sup>

Tipologi masyarakat Bukit Lawang adalah masyarakat multikultural dari beragam etnis dan kebudayaan. Karena itu pula masyarakat Bukit Lawang dapat menerima kehadiran beragam etnis, kebudayaan, bahkan masyarakat internasional.

<sup>12</sup>Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, (Jakarta, LP3ES, 2002), h. 15

<sup>13</sup>Muhammad Umar Syadat Hasibuan, *Op. Cit*, h. 97

<sup>14</sup>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sehingga kawasan Wisata Bukit Lawang, yang dulunya didominasi oleh suku Melayu sekarang sudah meleburkan diri menjadi masyarakat multikulturalisme.<sup>15</sup> Kendatipun demikian, warna dan corak etnis Melayu di Kabupaten Langkat tidak berkurang sedikitpun.

Dari sisi akademis, tipologi multikulturalisme masyarakat Bukit Lawang juga tercermin dalam penerimaan semua bentuk penelitian, baik nasional maupun internasional, di kawasan Wisata Bukit Lawang. Hal ini terbukti dari banyaknya jumlah peneliti yang melakukan penelitian di Bukit Lawang.<sup>16</sup> Sehingga multikulturalisme ini menjadi potensi bagi seluruh insan akademis untuk melakukan penelitian lebih lanjut di Bukit Lawang.

Pada sisi lain masyarakat Bukit Lawang juga masyarakat yang religius dan taat beragama. Walaupun Desa Bukit Lawang dikenal dengan Kawasan Wisata, namun penduduknya cukup patuh untuk melaksanakan ibadah keagamaan. Hal ini terbukti dari observasi peneliti, bahwa sebelum banjir bandang jumlah mesjid di Bukit Lawang sebanyak 2 (dua) bangunan, sedangkan setelah banjir bandang mesjid di Bukit Lawang berjumlah 3 (tiga) bangunan.

#### **4. Banjir Bandang di Bukit Lawang**

Banjir bandang yang diikuti dengan lumpur pekat dan ratusan ton gelondongan kayu pada hari Minggu 02 Nopember 2003 pukul 22.00 Wib, menghancurkan kawasan wisata Bukit Lawang. Ada beberapa penyebab banjir banding di bukit Lawang:

*Pertama*, Teori Danau, terdapat beberapa danau di hulu

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Bukit Lawang, pada tanggal 26 Oktober 2010

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Bukit Lawang, pada tanggal 26 Oktober 2010. Lebih lanjut dia menegaskan, "Riset yang paling banyak dilakukan oleh peneliti luar negeri. Orang itu menginap di Bukit Lawang hingga berbulan-bulan, sambil menyewa penginapan di sini. Sayangnya kita belum pernah mendapatkan hasil penelitian mereka, karena setelah balik ke negaranya mereka tidak mengirimkan hasil riset mereka".

sungai yang meluap akibat curah hujan yang tinggi, dan akhirnya menyeret pohon-pohon di sekitar DAS, sehingga merusak pemukiman masyarakat.<sup>17</sup>

*Kedua*, Teori Illegal Logging, penyebab banjir banding Bukit Lawang adalah penebangan hutan secara illegal di wilayah TNGL dan hulu Sungai Bohorok, dan diperkirakan lebih 43.000 ha hutan sudah habis dirambah oleh penebang liar dan pemegang HPH kadaluarsa.<sup>18</sup>

*Ketiga*, Curah Hujan, tingginya curah hujan di kawasan Desa Bukit Lawang pada September (672 mm) dan Oktober (750 mm), sedangkan pada tanggal 2 Nopember (101 mm). curah hujan yang tinggi ini menimbulkan kejenuhan tanah terhadap air (*saturasi*) dan akhirnya menyebabkan erosi.<sup>19</sup>

*Keempat*, Teori Erosi (Longsor), bahwa banjir tersebut akibat longsor di sekitar DAS yang dipicu oleh hujan deras pada beberapa hari sebelumnya. Kesimpulan ini berdasarkan hasil pantauan di hulu sungai melalui udara oleh Mike Griffiths (Intergated Development Advisor UML), Yarro Roberson (Direktur UML), Jhonson Panjaitan (Ketua Dewan Nasional Walhi Jakarta), dan Adi Susmianto (Direktur Konservasi Kawasan Departemen Kahutanan).<sup>20</sup>

Teori-teori ini pada umumnya benar, karena seluruh teori ini bermuasal dari curah hujan yang tinggi di Kecamatan Bohorok. Data statistik Kabupaten Langkat dalam Angka Tahun 2004 menyebutkan, bahwa curah hujan Kecamatan Bohorok pada tahun 2003 berdasarkan hari cukup tinggi, dengan rata-rata curah hujan 17,25 setiap bulan dalam 1 tahun.

<sup>17</sup> Teori ini dikemukakan oleh Gubernur Sumatera Utara H. T. Rizal Nurdin, Waspada 05 Nopember 2003, No. 20817, h. 2

<sup>18</sup> Teori ini dikemukakan oleh Bupati Langkat H. Syamsul Arifin, SE. <http://www.mediaindo.co.id/berita>, lihat juga Kompas 06 Nopember 2003, No. 20818, h. 1

<sup>19</sup> Teori ini dikemukakan oleh badan Meterologi dan Geofisika Wilayah I

<sup>20</sup> <http://www.kompas.com/kompascetak/031/07/utama/675117.htm>. Penjarahan Marak Di Lokasi Bencana Bohorok

**Tabel 15: Curah Hujan Kecamatan Bohorok Berdasarkan Hari pada Setiap Bulan Tahun 2003**

NO	BULAN	HARI
1	Januari	12
2	Februari	10
3	Maret	16
4	April	11
5	Mei	22
6	Juni	16
7	Juli	15
8	Agustus	23
9	September	17
10	Oktober	24
11	Nopember	20
12	Desember	21
Jumlah		207

Sumber: Data BPS Kabupaten Langkat Tahun 2004

Banjir bandang Bukit Lawang akhirnya menelan korban jiwa yang cukup banyak. Dari data korban jiwa, diketahui bahwa korban laki-laki sebanyak 69 jiwa dan perempuan sebanyak 83 jiwa. Sedangkan korban berasal dari Kecamatan Bohorok dan Kawasan Wisata Bukit Lawang sebanyak 130 jiwa, dari luar Kecamatan Bohorok dan Kawasan Wisata Bukit Lawang sebanyak 5 jiwa, korban jiwa yang tidak diketahui asalnya sebanyak 12 jiwa, sedangkan korban dari mancanegara berjumlah 5 jiwa.

**Tabel 16: Daftar Nama Korban Banjir Bandang Bukit Lawang**

NO	NAMA KORBAN	KELAMIN	USIA	PEKERJAAN	ALAMAT
1	Maratua Sidabutar	L	35	Wiraswasta	B. Lawang
2	Ivin	L	21	Ikut Orang Tua	B. Lawang
3	Elly	P	20	Ikut Orang Tua	B. Lawang
4	Yusman	L	48	Wiraswasta	B. Lawang
5	Ipul	L	45	Wiraswasta	B. Lawang
6	Emy	P	40	Wiraswasta	B. Lawang

Peran Perempuan Dalam Pertahanan Ekonomi

7	Alda	P	6	Ikut Orang Tua	B. Lawang
8	Karasdan	L	60	Petani	B. Lawang
9	Dea	P	7	Ikut Orang Tua	B. Lawang
10	Gani	L	50	Petani	B. Lawang
11	Sutrisna	P	49	Wiraswasta	B. Lawang
12	Toby	L	35	Petani	B. Lawang
13	Elly	P	20	WNA	Jerman
14	Tan Tek Kai	L	63	WNA	Singapura
15	Deni PA	L	18	Pelajar	B. Lawang
16	Amik	P	30	Ikut Suami	B. Lawang
17	Tumiran	L	40	Wiraswasta	B. Lawang
18	Areh Br. Sembiring	P	32	Ikut Suami	B. Lawang
19	Intan	P	41	Ikut Suami	B. Lawang
20	Bahrol	L	6	Ikut Orang Tua	B. Lawang
21	Muriah	P	46	Wiraswasta	B. Lawang
22	Nofan	L	18	Wiraswasta	B. Lawang
23	Syamsidar	P	52	Petani	B. Lawang
24	Elly	P	10	Pelajar	B. Lawang
25	Piyah Br. Kelliat	P	40	Petani	B. Lawang
26	Samini	P	30	Wiraswasta	B. Lawang
27	Unjuk Br. Ginting	P	35	Wiraswasta	B. Lawang
28	Adek Tondi	L	7	Ikut Orang Tua	G. Royong
29	Melda	P	9	Ikut Orang Tua	G. Royong
30	MRS X	P	-	-	-
31	Ulina Br. Sembiring	P	35	Ibu RT	B. Lawang
32	Anela	P	4	Ikut Orang Tua	B. Lawang
33	Nani Ariono	L	30	Wiraswasta	B. Lawang
34	Ika Reka PA.	P	12	Ikut Orang Tua	B. Lawang
35	Mamak Rulin	P	39	Ikut Suami	B. Lawang
36	Kasum	P	60	Petani	B. Lawang
37	Syahrul	L	6	Ikut Orang Tua	B. Lawang
38	Juanda	L	6	Ikut Orang Tua	B. Lawang
39	Rasin	L	45	Wiraswasta	G. Royong
40	Piter Kaban	L	9	Ikut Orang Tua	G. Royong
41	Roy Meuven Oof	P	23	-	Belanda
42	Sukma	L	26	Wiraswasta	B. Lawang
43	Olik	L	12	Ikut Orang Tua	B. Lawang
44	Awai	L	25	Wiraswasta	Binjai

Peran Perempuan Dalam Pertahanan Ekonomi

45	Heri	L	15	Ikut Orang Tua	B. Lawang
46	Niel	L	3	Ikut Orang Tua	B. Lawang
47	Vivi Hutabarat	L	18	Pelajar	B. Lawang
48	Bibi hutabarat	P	11	Pelajar	B. Lawang
49	Tambi	L	42	Wiraswasta	B. Lawang
50	Tita Br. PA	P	17	Wiraswasta	B. Lawang
51	Opta Kaban	P	12	Ikut Orang Tua	B. Lawang
52	Nela	P	18	Ikut Orang Tua	B. Lawang
53	Lukti	L	18	Wiraswasta	B. Lawang
54	Evin	L	12	Ikut Orang Tua	B. Lawang
55	Tody	L	2	Ikut Orang Tua	B. Lawang
56	Br. Regar	P	50	Wiraswasta	B. Lawang
57	Sapdan	L	50	Petani	G. Royong
58	Edy Hutabarat	L	25	Wiraswasta	B. Lawang
59	Wilzal	L	20	Wiraswasta	B. Lawang
60	Desy	P	12	Ikut Orang Tua	B. Lawang
61	Sudiani	P	32	Ikut Suami	B. Lawang
62	Irwan	L	40	Wiraswasta	B. Lawang
63	Dona S.	P	28	Wiraswasta	B. Lawang
64	Ros Bencong	L	38	Wiraswasta	B. Lawang
65	Siti	P	12	Ikut Orang Tua	B. Lawang
66	Aswaliyah	P	52	Petani	G. Royong
67	Yuni Lestari	P	25	Petani	Bohorok
68	Mathias	L	30	Ikut Orang Tua	Austria
69	Saadah	P	45	Ikut Suami	B. Lawang
70	Eka	P	13	Wiraswasta	G. Royong
71	Sudartono	L	25	Wiraswasta	B. Lawang
72	Ummi	P	30	Ibu RT	B. Lawang
73	Miswati	P	30	Ibu RT	B. Lawang
74	Salman	L	55	Wiraswasta	B. Lawang
75	Rina Br. Ginting	P	42	Ibu RT	B. Lawang
76	Usman	L	53	Wiraswasta	Sk. Rakyat
77	Eva	P	10	Ikut Orang Tua	B. Lawang
78	Badui	L	4	Ikut Orang Tua	B. Lawang
79	Nikita Br. Ginting	P	9	Ikut Orang Tua	B. Lawang
80	Serly	P	5	Ikut Orang Tua	B. Lawang
81	Tika	P	3	Ikut Orang Tua	B. Lawang

Peran Perempuan Dalam Pertahanan Ekonomi

82	Sari	P	5	Ikut Orang Tua	B. Lawang
83	Buyung	L	32	Wiraswasta	T. Lawan
84	Rolan	L	33	Wiraswasta	T. Morawa
85	Tiby	L	13	Ikut Orang Tua	B. Lawang
86	Naek Gultom	L	60	Wiraswasta	B. Lawang
87	Ipol / Agus Rimi	L	9	Ikut Orang Tua	B. Lawang
88	Sri Ulina Br. Sbrg	P	27	Ibu RT	B. Lawang
89	Niar	P	38	Ibu RT	B. Lawang
90	Hery	L	13	Ikut Orang Tua	B. Lawang
91	Aini	P	10	Ikut Orang Tua	B. Lawang
92	Mariam	P	2	Ikut Orang Tua	B. Lawang
93	Agus Tian	L	15	Ikut Orang Tua	B. Lawang
94	Tiodora Hutabarat	P	15	Ikut Orang Tua	B. Lawang
95	Tantowi	L	50	Wiraswasta	B. Lawang
96	Siti Zubaidah	P	35	Ibu RT	B. Lawang
97	Halimin	L	40	Wiraswasta	B. Lawang
98	MRS. X	P	55	-	-
99	MR. X	L	45	-	-
100	MR. X	L	Penemuan Polsek Selesai, WNA,		
101	Hanalilo T. Raider	L	60	Wiraswasta	Jerman
102	Sadarto Ishak	L	50	Supir	Medan
103	Tumin	L	35	Wiraswasta	B. Lawang
104	Putra	L	16	Ikut Orang Tua	B. Lawang
105	Juliani	P	19	Ikut Orang Tua	B. Lawang
106	Rasita Br. Ginting	P	40	Ikut Suami	B. Lawang
107	Khairul Iman	L	6	Ikut Orang Tua	B. Lawang
108	MRS. X	P	-	-	-
109	MR. X	L	-	-	-
110	MRS. X	P	-	-	-
111	Budiman	L	67	Wiraswasta	Medan
112	Vivit	P	27	Ikut Suami	B. Lawang
113	Wahyu Rahmadani	P	19	Ikut Orang Tua	B. Lawang
114	Andre Wibowo	L	5	Ikut Orang Tua	B. Lawang
115	Indri	L	6	Ikut Orang Tua	B. Lawang
116	Suriadi	L	45	Wiraswasta	B. Lawang
117	MRS. X	P	36	-	-
118	MRS. X	P	6	-	-

Peran Perempuan Dalam Pertahanan Ekonomi

119	MRS. X	P	7	-	-
120	Dewi	P	14	Ikut Orang Tua	B. Lawang
121	Sari	P	9	Ikut Orang Tua	B. Lawang
122	Budi Syahputra	L	7	Ikut Orang Tua	B. Lawang
123	Uca Atiler	P	2	Ikut Orang Tua	B. Lawang
124	Opu Hotman/SGN	P	73	Ikut Anak	B. Lawang
125	Nining Warlina	P	20	Ikut Orang Tua	B. Lawang
126	Nur Hayati	P	27	Ikut Orang Tua	B. Lawang
127	Amat	L	35	Wiraswasta	B. Lawang
128	Dahlia / Lid	P	16	Ikut Orang Tua	B. Lawang
129	Ame / Risma	P	22	Ikut Orang Tua	B. Lawang
130	Syahrial / Black	L	27	Wiraswasta	B. Lawang
131	Mamak Adek	P	45	Ikut Anak	B. Lawang
132	MR. X	L	27	-	-
133	Prastian	L	12	Ikut Orang Tua	B. Lawang
134	Mahdi Arif	L	17	Ikut Orang Tua	B. Lawang
135	Nuriati	P	37	Wiraswasta	B. Lawang
136	Siska Riani	P	3	Ikut Orang Tua	B. Lawang
137	Ibnu Hasbiah	L	14	Ikut Orang Tua	B. Lawang
138	Riles Armaya	P	7	Ikut Orang Tua	B. Lawang
139	Yana / Lasiana	P	14	Ikut Orang Tua	B. Lawang
140	Sarmen	P	55	Ikut Anak	B. Lawang
141	Idah Wardi	P	40	Ikut Suami	B. Lawang
142	Fatra	L	22	Mahasiswa	B. Lawang
143	Andrial	L	11	Ikut Orang Tua	B. Lawang
144	MRS. X	P	18	-	-
145	MRS. X	P	-	-	-
146	Tukini	P	42	Ikut Suami	B. Lawang
147	MRS. X	P	5	Ikut Orang Tua	B. Lawang
148	MRS. X	P	35	Ikut Suami	B. Lawang
149	MR. X	L	45	-	B. Lawang
150	Ernita	P	26	-	B. Lawang
151	Ame	P	5	Ikut Suami	B. Lawang
152	Isteri Gani	P	32	Ikut Suami	B. Lawang

Sumber: Polsek Kecamatan Bohorok

Banjir bandang di kawasan wisata alam Bukit Lawang tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan kerusakan terhadap bangunan-bangunan di kawasan wisata alam tersebut. Kerusakan-kerusakan tersebut dapat ditabulasikan dengan tabel berikut:

Tabel 17: Daftar Kerusakan Bangunan Akibat Banjir Bandang

NO	JENIS BANGUNAN	KERUSAKAN
1	Mesjid Ubudiyah	Total
2	Kantor Desa Bukit Lawang	Total
3	Poliklinik Bukit Lawang	Total
4	Pos Polisi Bukit Lawang	Total
5	Hotel Rindu Alam	Total
6	Wisma Lauser Sibayak	28 Kamar, Restoran
7	Wisma Bukit Lawang	Titi
8	Pondok Wisata Sutomo	Total
9	Jungle Inn	Restoran
10	Bukit Lawang Indah Inn	Total
11	Bahorok River	Total
12	Eden Inn	Total
13	Fido Dido Inn	14 Kamar, Restoran
14	Anggrek Inn	Total
15	Danau Jurung Inn	Total
16	Jaipong Inn	Total
17	Sayang Ibu Inn	Total
18	Back to Nature	Total
19	Queen Emerald	7 Kamar, 1 Titi
20	Mutiara Indah	Total
21	Farina Inn	15 Kamar, Restoran
22	Penginapan Muslim	Total
23	Batu Mandi	Total
24	Rocky Hill	Total
25	Wartel Karina	Total
26	Bukit Lawang Money Chenger	Total
27	Bahorok River Money Chenger	Total
28	Sejahtera Money Chenger	Total
29	Bukit Lawang Out Door Sport	Total
30	Camping Ground	Total
31	Bahorok Souvenir	Total
32	Jungle Souvenir	Total
33	Media Net	Total
34	Lauser Net	Total
35	Dam Irigasi	Pintu dan Jerjak Air

36	Berongjong Penahan Air	1.370 M
37	Rumah Masyarakat	286 Unit

Sumber: Data Desa Bukit Lawang

## 5. Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Wisata Bukit Lawang

Persepsi masyarakat Bukit Lawang terhadap hutan, tanah dan air di kawasan wisata Bukit Lawang sangat ditentukan dengan ketersediaan hutan. Kedekatan masyarakat dengan hutan sudah terjalin sejak lama bahkan menjadi suatu ketergantungan. Keakraban tersebut bukan hanya ditunjukkan melalui adat istiadat, namun hampir pada semua kebutuhan hidup mereka.<sup>21</sup>

Hutan bagi mereka bukan hanya dipandang sebagai tumbuhan saja, akan tetapi seluruh sistem yang ada, seperti pandangan mereka tentang pertanian. Hal tersebut dapat dipahami oleh masyarakat di desa sekitar kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL), bahwa sumber daya tanah dan hutan adalah merupakan investasi jangka panjang. Karena itu pula, masyarakat Bukit Lawang memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) tersendiri dalam menjaga dan mengelola sumber daya alam.

Terkait dengan peran serta masyarakat dalam pembangunan kawasan wisata Bukit Lawang, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Wisata Bukit Lawang Darna S. Purnama, pada tanggal 02 Oktober 2010

<sup>22</sup>Pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penjelasan pasal ini menyebutkan, peran tersebut meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan, baik dengan cara mengajukan keberatan, maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peran tersebut antara lain dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup. Pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keterbukaan, dengan prinsip keterbukaan tersebut dimungkinkan bagi masyarakat untuk ikut memikirkan dan memberikan pandangan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Masyarakat juga memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam rangka proses pengambilan keputusan Pemerintah dapat mengikutsertakan masyarakat melalui penyampaian saran, pendapat dan pertimbangan.<sup>23</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka peran serta masyarakat dalam pembangunan kawasan wisata memiliki *legal standing* yang kuat. Pasca banjir bandang di Bukit Lawang, pemerintah dan masyarakat memiliki andil yang sangat penting dalam pembangunan kawasan wisata tersebut. Masyarakat juga ikut dalam perencanaan pembangunan, bahkan terlibat sebagai pekerja dalam pembangunan kawasan wisata Bukit Lawang.<sup>24</sup>

Lebih dari itu, masyarakat juga turut mensponsori kegiatan-kegiatan yang dapat mengundang wisatawan untuk berkunjung ke Bukit Lawang. Hal ini diselenggarakan atas partisipasi masyarakat secara mandiri pada beberapa tahun awal pasca banjir bandang di Bukit Lawang, seperti:

Tabel 18: Kegiatan Promosi Wisata Bukit Lawang yang Dilakukan Masyarakat

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU
1	Pembukaan Kawasan Wisata Bukit Lawang	18 Juli 2004
2	Lancang Kuning	7 September 2004
3	1 Tahun Banjir Bandang Bukit Lawang	2 Nopember 2004
4	Penyambutan Tahun Baru 2005	31 Desember 2004
5	Motor Cross	20-25 Februari 2005
6	Lomba Tubing	19-21 Mei 2005
7	Jambore Pecinta Alam Sumatera Utara	5-11 Juni 2005

Sumber: Data Desa Bukit Lawang

Karena itu pula, pembangunan kawasan wisata Bukit Lawang melalui beberapa tahapan, dan masing-masing tahapan tersebut masyarakat terlibat di dalamnya. Tahapan-tahapan

<sup>23</sup>Pasal 30 Undang-undang Nomo 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan

<sup>24</sup>Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Bukit Lawang Daulat Syah Purba, pada tanggal 03 Oktober 2010

tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 19: Tahapan Pembangunan Kawasan Wisata Bukit Lawang

NO	TAHAPAN	WAKTU	KETERANGAN
1	Banjir Bandang	02/11/2003	Bencana Alam
2	Penampungan Masyarakat	2003-2005	Total
3	Bantuan Kepada Korban	2003-2004	Total
3	Pembukaan Bukit Lawang	18/07/2004	Masyarakat
4	Pembangunan Pemukiman	2004-2005	Pemerintah
5	Promosi Bukit Lawang	2004-2006	Masyarakat
6	Relokasi Penduduk	2005-2006	Pemerintah
7	Restorasi Bukit Lawang	2006-2007	Masyarakat

Sumber: Desa Bukit Lawang dan Masyarakat

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kawasan wisata Bukit Lawang cukup mempengaruhi keberhasilan Bukit Lawang untuk menjadi kawasan wisata lagi. Hal ini karena masyarakat Bukit Lawang memiliki jiwa dan talenta yang kuat sebagai pelaku wisata.<sup>25</sup> Hal ini senada dengan *what city but citizen*, apalah arti sebuah kota kalau bukan karena penduduknya.

## B. Peran Produktif Perempuan dalam Pertahanan Ekonomi Keluarga Pasca Banjir Bandang di Bukit Lawang

Krisis moneter tahun 1997 yang menerpa Indonesia belum juga kunjung selesai, ditambah lagi dengan krisis global pada tahun 2008. Krisis tersebut menjadikan roda perekonomian

<sup>25</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Wisata Bukit Lawang Darna S. Purnama, pada tanggal 02 Oktober 2010. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa "Kami selalu menginginkan pengunjung itu datang tidak sekali, namun dua kali, tiga kali, bahkan berkali-kali".

Indonesia berjalan lambat dan berkurangnya investor yang masuk ke Indonesia. Kondisi ini memacu gerak peningkatan pengangguran yang sangat cepat, sedangkan restrukturisasi perusahaan belum sepenuhnya membawa dampak yang maksimal bagi kemajuan perekonomian Indonesia.

Krisis multidimensi tersebut sesungguhnya telah merusak moral dunia pariwisata Indonesia, ditambah lagi dengan banjir bandang di Bukit Lawang. Sehingga masyarakat harus mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan berwirausaha.

Pada sisi lain, keluarga-keluarga di Indonesia selalu mendorong anak-anaknya untuk sekolah yang setinggi-tingginya, dengan harapan agar dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil atau bekerja di suatu perusahaan untuk mendapatkan gaji yang mencukupi kebutuhan hidup. Namun keluarga-keluarga Indonesia jarang sekali mendorong anak-anaknya untuk menjadi wiraswastawan yang handal, hal ini terbukti pada orientasi mahasiswa untuk mendaftar ke setiap lowongan kerja setelah mereka tamat kuliah. Padahal, lapangan kerja tersebut semakin sedikit dan mereka harus bersaing dengan alumni-alumni kampus lain, hal ini terbukti dari banyaknya jumlah sarjana yang menganggur di Indonesia.

Sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan keahliannya mengakibatkan meningkatnya pengangguran. Dengan berwiraswasta dapat membuka lapangan kerja sendiri bahkan dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

Tesis Max Weber yang dipublikasikan dalam buku "*The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*" menjelaskan bahwa "Etika Protestan" dan hubungannya dengan "semangat kapitalisme" menjadi suatu teori yang sangat menarik perhatian para ilmuwan sosial hingga sekarang.<sup>26</sup> Menurut pengamatan Weber di kalangan Protestan sekte Calvinis, kerja keras adalah suatu keharusan bagi setiap manusia untuk mencapai kesejahteraan. Kerja keras ini merupakan panggilan rohani

<sup>26</sup>Taufiq Abdullah, *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi* (Jakarta, LP3ES, 1982), h. 4

untuk mencapai kesempurnaan hidup, sehingga mereka dapat hidup lebih baik secara ekonomi. Dengan bekerja keras serta hidup hemat dan sederhana para pengikut ajaran Calvin tidak hanya hidup lebih baik tetapi mereka mampu pula menfungsikan diri mereka sebagai wiraswasta yang tangguh. Demikian juga dengan hampir semua agama, memberikan dorongan untuk bekerja keras, berwiraswasta atau berbisnis.<sup>27</sup>

Upaya menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sangat strategis dalam mewujudkan pemulihan ekonomi nasional dan mempercepat perubahan struktural dalam meningkatkan taraf hidup rakyat. Wiraswasta merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar, diharapkan sebagai motor penggerak perekonomian nasional yang mampu survive pada kondisi krisis. Pemerintah sangat gencar mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada penguatan peran UMKM seperti diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pola penjaminan pemerintah yang diikuti relaksasi kebijakan bidang perbankan untuk mendorong kemudahan layanan pendanaan oleh perbankan.<sup>28</sup>

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah secara tegas menyatakan, tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah

<sup>27</sup>Mubyarto dkk. *Etos Kerja dan Kohesi Sosial*. (Yogyakarta, Aditya Media, 1991), h. 2

<sup>28</sup>Alasan mengapa pemerintah begitu gencar dalam mengembangkan UMKM yaitu: (1) Jumlah populasi UKM di 2007 mencapai 49,8 juta unit usaha atau 99,99 persen terhadap total unit usaha di Indonesia, sementara jumlah tenaga kerjanya mencapai 91,8 juta orang atau 97,3 persen terhadap seluruh tenaga kerja Indonesia, (2) Ekspor hasil produksi UKM selama 2007 mencapai Rp142,8 triliun atau 20 persen terhadap total ekspor nonmigas nasional Rp713,4 triliun. Nilai investasi fisik UKM yang dinyatakan dengan angka Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada 2007 mencapai Rp462,01 triliun atau 46,96 persen terhadap total PMTB Indonesia, serta (3) Produk Domestik Bruto (PDB) UMKM di 2007 tumbuh 6,4 persen, lebih tinggi daripada PDB nasional, mencapai Rp2.121,3 triliun atau 53,6 persen dari total PDB Indonesia. Lihat dalam yukbisnis.com Meningkatkan Peran UMKM dalam Pembangunan Nasional.

untuk: (a) mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, (b) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, dan (c) meningkatkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.<sup>29</sup>

Demikian pula halnya dengan kaum perempuan yang ditinggal mati suaminya akibat banjir bandang Bukit Lawang. Mereka harus produktif untuk mempertahankan kebutuhan rumah tangga dan membiaya kehidupan anak-anaknya. Karena sebelum banjir bandang, mayoritas perempuan Bukit Lawang hanya beraktivitas sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus urusan domestik keluarga. Sedangkan untuk mencari nafkah adalah urusan dan tanggung jawab suami. Hal ini sebagaimana diungkap dalam hasil wawancara kepada responden:

Apa aktivitas ibu sebelum banjir bandang bukitlawang?:

"Yah biasalah urusan rumah tangga, saya membantu suami menjaga dan mengurus rumah dan menyiapkan kebutuhan-kebutuhannya untuk kerja besoknya".

Apakah saat itu Ibu turut serta membantu Suami mencari nafkah?: "Saya hanya membantu dari rumah pak. Segala kebutuhan kerja suami saya untuk besok saya siapkan sebelumnya".<sup>30</sup>

Pernyataan tersebut menjadi bukti kuat, bahwa perempuan

<sup>29</sup>Namun, dibalik usaha potensial tersebut, sesuai karakteristiknya, UMKM memiliki keterbatasan yang sering kita jumpai terutama pada aspek pengelolaan usaha, sumber daya manusia, produktivitas dan kualitas, struktur permodalan, inovasi, akses pemasaran ke pasar yang potensial, kemampuan menghasilkan laba, kelangsungan usaha dan akses pembiayaan dari perbankan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, strategi yang dijalankan tidak dapat lagi dilihat dari satu sisi pendekatan ekonomi, tapi memerlukan serangkaian strategi kebijakan yang berfungsi sebagai stimulan serta mendiagnosa permasalahan yang dihadapi UMKM.

<sup>30</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

Bukit Lawang sama seperti kebanyakan perempuan di daerah lainnya, yang beraktivitas mengurus urusan domestik rumah tangga. Kendatipun demikian, salah satu responden menjawab:

Apa aktivitas ibu sebelum banjir bandang bukit lawang?: "Waktu itu saya berdagang Pak". Apa barang dagangan Ibu saat itu?: "Saya berjualan baju dan souvenir". Apakah saat itu Suami Ibu ikut membantu?: "Tidak Pak, Suami saya saat itu Giude, dia sering tracking sama bule".

Kenyataan ini juga menunjukkan, bahwa sebagian responden dalam penelitian ini sudah berpengalaman berwiraswasta sebelum banjir bandang di Bukit Lawang. Tentu saja pengalaman ini menjadi modal utama bagi mereka untuk bertahan hidup pasca banjir bandang.

Setelah banjir bandang beberapa di antara mereka langsung berjualan dan berdagang untuk membiayai kehidupan mereka. Seperti yang terungkap dalam hasil wawancara berikut ini:

Setelah banjir bandang, berapa lama kemudian ibu menjalankan usaha tersebut? "Saya langsung pak, saya mulai berjualan sarapan pagi setelah banjir di terminal, karena tempat penampungan kan di terminal"<sup>31</sup>

Namun sebagian lainnya menunggu waktu yang agak sedikit lama untuk berdagang, seperti keterangan responden sebagai berikut:

Setelah banjir bandang, berapa lama kemudian ibu menjalankan usaha tersebut? "Saya mulainya setelah 8 bulan banjir bandang, saya berpikir gak bisa lagi hidup kalo gak kerja. Jadi saya kemari (Bukit Lawang), saya tengok ada orang kerja membersihkan sampah-sampah dan kayu-kayu, saya tanya mereka "makan di mana?" mereka jawab makan di Bohorok (Pusat Kecamatan Bohorok), terus saya menawarkan kepada mereka untuk makan masakan saya beserta penginapannya"<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

Realitas ini menunjukkan bahwa bencana alam tersebut memacu kaum perempuan di Bukit Lawang untuk membangun kemampuan produktifnya guna mempertahankan hidup. Ada beberapa variasi usaha yang mereka lakukan, yaitu membuka restoran, jualan sarapan pagi, jasa penginapan, jualan gorengan, usaha taman bunga, dan pedagang musiman/asongan.

Guna mensukseskan usaha yang mereka jalani, saat ini beberapa responden menggunakan jasa pembantu. Namun sebelumnya, beberapa tahun setelah banjir bandang, mereka tidak menggunakan jasa pembantu. Hal ini menunjukkan bahwa usaha yang mereka tempuh memiliki grafik yang meningkat.<sup>33</sup>

Pada umumnya, kaum Ibu yang ditinggal suaminya akibat banjir bandang ini menjalankan usaha di rumah masing-masing, dengan jumlah jam kerja lebih dari ½ hari bahkan hingga 24 jam.<sup>34</sup> Hal ini membuktikan bahwa kaum perempuan ini sangat ulet dan kuat untuk berjuang mempertahankan perekonomian keluarganya.

Tentu saja usaha yang mereka laksanakan memberikan pengaruh yang meningkat bagi perekonomian keluarga, dan mencukupi untuk pembiayaan kebutuhan rumah tangga. Hal ini terbukti dari kemampuan mereka untuk menabung walaupun sedikit demi sedikit, guna membiayai anak sekolah maupun kebutuhan hidup.

Kendatipun demikian, beberapa responden menyatakan belum bisa menabung. Hal ini terjadi karena musibah kedua yang menimpa mereka, yakni kebakaran rumah pada bulan Mei 2010, dengan pernyataan sebagai berikut:

Dari hasil usaha yang Ibu jalankan, apakah ibu bisa menabung? "Sebenarnya bisa nyimpan, ini pengalaman saya pribadi. Setelah banjir bandang dan berusaha, saya sudah bisa nyimpan. Namun lima bulan yang lalu saya di timpa musibah lagi, rumah kebakaran. Jadi saya balik dari

<sup>33</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>34</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

nol lagi, apa yang disimpan itu diambil kembali”<sup>35</sup>

”Saya sama dengan ibu ini, setelah banjir bandang saya sudah mulai bisa berdiri, tapi ditimpa musibah kebakaran saya balik dari awal lagi. Sekarang untuk makan saja sudah syukur”.<sup>36</sup>

Pernyataan ini juga menjadi alasan yang kuat, bahwa perempuan Bukit Lawang adalah perempuan yang mampu memacu dan meningkatkan produktifitasnya. Walaupun menjadi korban bencana secara berulang-ulang, yaitu korban banjir bandang dan korban kebakaran.

Terkait dengan itu pula, kendatipun pada tahun pertama pasca banjir bandang, mereka akan memulai berdagang, ternyata anak-anak kandung mereka tidak ada yang putus sekolah akibat banjir bandang. Bahkan terdapat anak responden yang telah tamat kuliah dan bekerja saat ini. Hal ini terungkap dari hasil wawancara sebagai berikut:

Apakah ada anak Ibu yang putus sekolah akibat banjir bandang? ”Walaupun pada saat itu saya sedang kesulitan, alhamdulillah anak saya tidak ada yang putus sekolah”<sup>37</sup>

”Pada saat banjir bandang, anak saya masih kuliah, hingga akhirnya tamat kuliah. Saya memaksakan diri saya untuk membiayai kuliah anak saya”<sup>38</sup>

Semua responden yang memiliki anak sekolah saat itu membiayai keperluan sekolah anaknya secara mandiri. Tentu saja kemampuan ini sangat dibutuhkan bangsa Indonesia guna menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Guna meningkatkan kemampuan dan keteguhan hati kaum perempuan yang ditinggal suaminya akibat banjir bandang, sebagian responden menikah lagi dan sebagian lainnya belum

---

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>36</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>37</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>38</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

menikah. Hal ini terungkap dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Apa alasan Ibu untuk menikah lagi? ”Pada saat itu saya sudah hampir putus asa, jadi saya sangat membutuhkan pendamping untuk bertahan”.<sup>39</sup>

“Yah, namanya ditinggal suami secara mendadak, trauma kan tetap ada. Saat itu saya sebentar-bentar ke sana, sebentar-bentar ke sana, jadi saya selalu bingung. Saya selalu ketakutan, apa lagi jika air sungai naik. Makanya saya butuh pelindung yang menguatkan hati saya”.<sup>40</sup>

“Pada saat itu anak saya masih kecil-kecil, sementara anak saya yang kecil masih satu tahun setengah waktu banjir bandang. Jadi saya berfikir bagaimana meneruskan anak-anak ini saat itu, makanya saya berpikir harus ada penggantinya”.<sup>41</sup>

Pada kondisi seperti ini, anak-anak kandung responden memiliki sikap yang berbeda terhadap pernikahan ibunya, diantaranya:

Bagaimana respon anak ibu terhadap suami Ibu? Pada awalnya anak-anak saya menolak dan marah saat saya mau menikah, tapi sekarang mereka sangat sayang sama ayahnya ini, bahkan lebih sayang sama dia daripada sama saya”.<sup>42</sup>

“Mereka baik terhadap suami saya, dan menerima suami saya, karena suami saya memperlakukan mereka dengan baik juga”.<sup>43</sup>

“Anak saya pada saat itu masih kecil-kecil jadi mereka belum mengerti dengan benar”.<sup>44</sup>

Dari hasil Focus Group Discussion, diketahui bahwa sebagian responden menikah dengan pria yang menjadi keluarga korban

<sup>39</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>40</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>41</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>42</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>43</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>44</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

banjir bandang juga. Bahkan ada yang menikah dengan pria yang ditinggal isteri dan anaknya semua karena banjir bandang, dengan pernyataan sebagai berikut:

Apakah Suami Ibu juga merupakan keluarga korban banjir bandang? "Kalau saya, Suami saya isteri dan anaknya semuanya habis karena banjir bandang"<sup>45</sup>

Pernikahan yang dilangsungkan responden bukanlah tanpa alasan, dan bukan juga tanpa batasan waktu. Setelah banjir bandang, mereka menikah dengan antara waktu 2 (dua) tahun dan kurang dari 2 (dua) tahun.<sup>46</sup>

Selain berdagang dan berusaha, ternyata responden juga menjalankan aktivitas keluarga sebagai ibu rumah tangga, baik dibantu dengan pembantu maupun tanpa pembantu. Kaum ibu ini juga melakukan perawatan diri sebagaimana perempuan pada umumnya, namun masih dalam tataran sederhana.

Selain berusaha, berdagang, dan melaksanakan aktivitas rumah tangga, responden juga tidak meninggalkan aktivitas kemasyarakatannya. Seperti wirid, PKK, bakti sosial, dan aktivitas kemasyarakatan lainnya, jika dilibatkan dan/atau diundang oleh pihak yang berwenang.

Keseluruhan hasil wawancara tersebut membuktikan, bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya akibat banjir bandang Bukit Lawang, tidak saja hanya menjalankan aktivitas produktifnya untuk mempertahankan perekonomian keluarga. Namun lebih jauh dari itu, mereka juga tetap menjalankan aktivitas reproduktif dan aktivitas community atau kemasyarakatan.

Hal ini bukanlah tanpa alasan, karena aktivitas produktif tentu saja harus didukung oleh kemampuan aktivitas reproduktif dan aktivitas community. Sehingga ketiga unsur aktivitas tersebut mampu mendukung perempuan untuk mempertahankan perekonomian keluarganya.

---

<sup>45</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>46</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

### **C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Produktif Perempuan dalam Pertahanan Ekonomi Keluarga Pasca Banjir Bandang di Bukit Lawang**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peran produktif perempuan dalam mempertahankan ekonomi keluarga pasca banjir bandang di Bukit Lawang, yaitu:

*Pertama*, banjir bandang. Bagi keluarga korban banjir bandang Bukit Lawang terpaksa harus merestorasi perekonomian keluarganya. Demikian juga halnya bagi kaum perempuan harus mampu mengembangkan potensinya untuk mempertahankan perekonomian keluarganya.

*Kedua*, kehilangan kepala keluarga. Kaum perempuan di Bukit Lawang pada umumnya adalah ibu rumah tangga biasa, yang sehariannya beraktifitas mengurus rumah dan anak-anaknya saja, sedikit saja dari mereka kaum perempuan yang berperan dalam pertahanan ekonomi keluarga. Namun pasca banjir bandang semuanya berubah, sebagian besar dari kaum perempuan di Bukit Lawang kehilangan suaminya karena menjadi korban tewas akibat banjir tersebut. Sehingga mereka menjadi janda yang otomatis peran mereka berubah menjadi kepala keluarga yang harus mempertahankan dan memenuhi ekonomi keluarga.

*Ketiga*, anak-anak. Selain mereka ditinggal mati suaminya, sebagian besar kaum perempuan tersebut masih memiliki keluarga yang selamat. Mereka masih memiliki anak-anak yang selamat, dan ini tentunya menjadi faktor tambahan dan juga penentu bagi kaum perempuan untuk harus segera bangkit dan produktif dalam pertahanan ekonomi keluarganya. Anak-anak tersebut tentunya harus dibesarkan dan juga harus dilanjutkan pendidikannya.

*Keempat*, jumlah pengunjung dan tamu yang berwisata ke Bukit Lawang. Dari hasil FGD ditemukan bahwa, pengunjung dan tamu akan berwisata ke Bukit Lawang pada hari libur panjang sekolah, hari-hari besar, dan hari minggu.<sup>47</sup> Selebihnya, yakni

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

pada hari-hari lainnya, sirkulasi perekonomian Bukit Lawang hanya terbatas pada penduduk setempat saja.

*Kelima*, lingkungan hidup dan aspek kepariwisataan. Tentu saja pengunjung yang datang ke Bukit Lawang ingin menikmati lingkungan hidup yang sehat dengan aspek-aspek kepariwisataannya. Karena itu pula, selain berusaha responden juga memperhatikan aspek-aspek kepariwisataan yang bersih dan asri.<sup>48</sup> Demikian juga dengan masyarakat Bukit Lawang lainnya, tetap memperhatikan aspek kepariwisataan dalam pembangunan kawasan wisata Bukit Lawang.

*Keenam*, aspek pelaku wisata yang ramah, sopan dan santun. Lokasi wisata akan ramai dikunjungi jika pelaku wisatanya mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjungnya. Karena pengunjung berwisata ingin mencari keamanan dan kenyamanan, sehingga pengunjung akan datang kembali untuk yang kedua kalinya.<sup>49</sup>

*Ketujuh*, aspek retrebusi. Saat ini di Bukit Lawang ada 2 (dua) retrebusi yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Langkat, yaitu Retrebusi Masuk Lokasi Wisata, dan Retrebusi Parkir. Setiap pengunjung akan dikenakan 2 (dua) retrebusi tersebut. Tentu saja hal ini akan menjenuhkan bagi pengunjung wisata Bukit Lawang, dan merasa diperlakukan secara tidak baik dengan kebijakan pemerintah ini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara sebagai berikut:

"Memang retrebusi itu dikeluarkan oleh pemerintah, karcisnya juga milik pemerintah, namun mereka tidak mengelolanya. Kemudian ada juga retrebusi parkir, namun pemerintah tidak menyediakan lokasi parkirnya. Sehingga pengunjung parkir di lokasi yang disiapkan masyarakat dengan sistem simpan jaga. Jadi menimbulkan kesan yang tidak baik bagi pengunjung, karena pengunjung berulang-ulang kali kena."<sup>50</sup>

*Kedelapan*, aspek promosi kawasan wisata Bukit Lawang.

<sup>48</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>49</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Wisata Bukit Lawang Darna S. Purnama, pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>50</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Wisata Bukit Lawang Darna S. Purnama, pada tanggal 06 Nopember 2010

Hingga saat ini Bukit Lawang tidak memiliki web site yang khusus untuk mempromosikan wisata Bukit Lawang baik kepada wisatawan domestik maupun kepada wisatawan mancanegara.<sup>51</sup> Padahal, dengan adanya web site tersebut akan dimungkinkan bagi masyarakat nasional maupun internasional untuk mengenal kawasan wisata Bukit Lawang, sehingga wisatawan mengetahui lebih baik potensi Bukit Lawang secara khusus. Karena selama ini masyarakatlah yang mempromosikan kawasan wisata Bukit Lawang kepada masyarakat umum.

*Kesembilan*, kepastian kepemilikan lahan. Hingga saat ini belum ada kepastian kepemilikan lahan di kawasan wisata Bukit Lawang, sehingga meresahkan para pedagang dan juga korban banjir bandang. Karena itu pula, pedagang di Bukit Lawang tidak dapat membangun lokasi usaha secara permanen, khawatir akan digusur pemerintah. Padahal Bukit Lawang ini ramai kembali dikunjungi wisatawan karena masyarakat dan pelaku wisatanya.<sup>52</sup>

*Kesepuluh*, Trauma Sindrom. Banyak kaum perempuan di Bukit Lawang pasca banjir bandang mengalami trauma. Hal ini terjadi mengingat begitu hebatnya kejadian banjir bandang yang menimpa mereka. Sebagian besar kehidupan kaum perempuan Bukit Lawang berubah drastis, banyak dari mereka hilang keluarga, sanak saudara dan harta. Untuk mengatasi faktor ini tentunya trauma konseling sangat diperlukan untuk membantu korban menjaga kestabilan emosi, dapat menerima kenyataan hidup, berpikir realistis dan menemukan kembali rasa percaya diri guna mengembangkan semangat hidup yang kuat, di mana dengan dukungan lingkungan diharapkan mampu memecahkan masalah secara kreatif. Konseling trauma secara individual ditujukan untuk mereka yang tingkat stres dan depresinya berat. Sementara bagi yang beban psikologisnya masih pada derajat sedang, dapat dilakukan dengan pendekatan kelompok, yang diharapkan dapat menjadi wahana untuk saling membantu mereka keluar dari kesulitan. Sehingga pulihnya kesehatan akan menumbuhkan sektor ekonomi ekonomi dan berujung pada

---

<sup>51</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Wisata Bukit Lawang Darna S. Purnama, pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>52</sup>Hasil wawancara dengan pedagang di Bukit Lawang Ery Armaya, pada tanggal 06 Nopember 2010

peningkatan ketahanan ekonomi keluarga.

*Kesebelas*, kurangnya keahlian. Pra banjir bandang, sebagian besar responden di Bukit Lawang adalah para ibu rumah tangga, yang hanya memerankan peran reproduktif dalam rumah tangga. Hal ini tentunya mempengaruhi mereka untuk menjalankan peran produktif tersebut. Ketidakmampuan mereka untuk memulai sebuah usaha dan minimnya keterampilan berwirausaha mengakibatkan kaum perempuan di Bukit Lawang kesulitan untuk keluar dari kesulitan pasca banjir bandang.

*Keduabelas*, kurangnya perhatian pemerintah di sektor ekonomi. Konsentrasi Pemerintah Kabupaten Langkat pada saat pasca banjir bandang di Bukit Lawang tertuju pada recovery lokasi pariwisata dan relokasi pemukiman masyarakat di sekitar lokasi banjir. Hal ini menyebabkan ada gap antara perbaikan fisik lokasi dengan perbaikan di sektor ekonomi. Meskipun pemerintah setempat telah memberikan bantuan kepada korban banjir bandang di Bukit Lawang selama di penampungan, tapi tentunya ini saja tidak cukup, mengingat mereka juga harus kembali beraktifitas di dalam sektor ekonomi setelah bantuan tersebut tidak didapat lagi guna mempertahankan kebutuhan keluarga mereka. Seyogyanya pemerintah daerah juga mempersiapkan para korban banjir bandang dengan berbagai keterampilan dan keahlian untuk bisa kembali bangkit dan berusaha.

*Ketigabelas*, akses modal terbatas. Selain pelatihan-pelatihan kewirausahaan yang sangat dibutuhkan para kaum perempuan di Bukit Lawang pasca banjir bandang, untuk bisa mengembangkan kemampuan usaha mereka, tentunya hal yang terpenting adalah adanya akses yang mudah untuk mendapatkan bantuan lunak guna dijadikan modal bagi usaha mereka.

#### **D. Akses dan Kontrol Perempuan Terhadap Sumber Daya dalam Pertahanan Ekonomi Keluarga Pasca Banjir Bandang di Bukit Lawang**

Prinsip dasar dalam Konvensi Wanita adalah persamaan

substantif, non diskriminasi, dan prinsip kewajiban negara. Peraturan Hukum yang bersifat diskriminatif pada zaman kolonial telah menghambat perkembangan bagi pemberdayaan perempuan. Bias gender masih terasa dalam substansi hukum positif, meskipun pemerintah sudah menandatangani sejumlah konvensi yang mengatur hak-hak perempuan. Memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender sudah menjadi arah kebijakan hukum pemerintah. Perubahan nilai sosial yang diawali dengan berkembangnya proses industrialisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif menuju kesetaraan gender.

Peran yurisprudensi yang berperspektif gender, seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Keberhasilan pemberdayaan perempuan dimaksud, sepenuhnya tergantung pada pelaksanaan pengaturan perempuan yang diperankan oleh aparat penyelenggara negara dan oleh kaum perempuan sendiri.

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa, dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (*character*).<sup>53</sup> Maka, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, akhlak mulia, pengendalian diri, kepribadian, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>54</sup>

Karena itu pula, pendidikan merupakan salah satu sub sistem untuk mengembangkan sumber daya masyarakat. Namun, karena pandangan masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Bukit Lawang khususnya masih menggunakan cara pandangan patrialis, maka akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak lebih rendah dari akses laki-laki.

---

<sup>53</sup>Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2006), h. 17-23

<sup>54</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Realitas ini tentu saja menciptakan bahwa sumber daya perempuan lebih rendah dari sumber daya laki-laki di Bukit Lawang. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan responden yang menyebutkan bahwa, dua orang responden hanya tamatan SD, dua orang responden tamatan SMP, dan dua orang responden tamatan SMA.<sup>55</sup> Padahal, akses yang rendah terhadap pendidikan sesungguhnya akan mempengaruhi akses untuk mendapatkan sumber daya lainnya, termasuk pengembangan usaha.

Di samping rendahnya akses dan kontrol terhadap pendidikan, responden juga memiliki akses yang rendah pendidikan informal, yaitu pelatihan-pelatihan keterampilan dan pelatihan kewirausahaan. Bahkan menjawab sama sekali tidak pernah mengikuti pelatihan keahlian dan kewirausahaan.<sup>56</sup>

Pada hal, dengan pelatihan kewirausahaan, responden diharapkan mampu untuk mengembangkan usaha serta membangun sistem manajerial yang baik dalam berwiraswasta. Hal ini juga membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Langkat belum sepenuhnya melihat potensi pengembangan usaha di Bukit Lawang dari sisi manajerial.

Dari sisi sumber daya alam, seluruh responden tentu saja mendapatkan dan menggunakan sumber daya alam untuk pengembangan usaha mereka, karena daya jual kawasan wisata Bukit Lawang adalah sumber daya alam.<sup>57</sup> Namun, dari hasil observasi yang dilakukan bahwa kemampuan perempuan untuk memanfaatkan sumberdaya alam sangat terbatas dibandingkan dengan kemampuan laki-laki dalam menggunakan potensi sumber daya alam. Hal ini bukan tanpa alasan, tentu saja keterbatasan pengetahuan, pendidikan, dan kompetensi di bidang manajerial mempengaruhi perempuan dalam pemanfaatan sumber daya alam di Bukit Lawang.

Pemahaman perempuan korban banjir bandang di Bukit Lawang tentang kewirausahaan masih terbatas pada jual-

<sup>55</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>56</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

beli barang dan sewa-menyewa. Responden belum memiliki pengetahuan secara baik dan luas tentang aspek permodalan. Karena itu pula, responden hanya mengandalkan dana simpanan untuk mengembangkan usaha dan menjaga perekonomian keluarga.<sup>58</sup> Sehingga responden hanya mampu mengembangkan usaha dalam kondisi keterbatasan modal.

Di lain pihak, sistem perbankan Indonesia mensyaratkan izin suami bagi perempuan yang ingin melakukan pembiayaan, padahal tidak semua perempuan memiliki suami. Kebijakan ini tentu saja menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Bahkan kebijakan ini merugikan perempuan secara substantif nilai-nilai universal kemanusiaan. Sehingga perempuan sangat kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan bagi pengembangan peran produktifnya. Padahal, jika dilihat dari pengertiannya dan fungsinya, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.<sup>59</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, diketahui bahwa responden membangun usaha dengan modal pribadi. Bahkan responden belum pernah menerima bantuan kredit lunak baik dari perbankan maupun dari pemerintah Kabupaten Langkat. Informasi ini menunjukkan, bahwa perempuan Bukit Lawang tidak memiliki akses yang luas terhadap aspek-aspek permodalan dalam pengembangan usaha.<sup>60</sup>

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perempuan yang ditinggal mati suaminya akibat banjir bandang Bukit Lawang memiliki akses dan kontrol yang rendah terhadap sumber daya. Hal ini dibuktikan dengan; *Pertama*, variasi pendidikan formal yang mereka terima antara SD hingga SMA. *Kedua*, tidak memiliki pendidikan informal dalam berwirausaha, seperti pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. *Ketiga*, memiliki

---

<sup>58</sup>Hasil wawancara dengan responden di Bukit Lawang pada tanggal 06 Nopember 2010

<sup>59</sup>Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 2003), h. 79

<sup>60</sup>Hasil wawancara dengan Kepala Dusun Wisata Bukit Lawang Darna S. Purnama, pada tanggal 06 Nopember 2010

kemampuan yang terbatas dalam mengelola sumber daya alam. *Keempat*, memiliki modal terbatas dalam berwirausaha, dan tidak memiliki akses yang luas terhadap permodalan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil hasil temuan, pembahasan, serta kajian-kajian dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perempuan yang ditinggal mati suaminya akibat korban banjir bandang Bukit Lawang, mampu menjalankan peran produktifnya untuk mempertahankan ekonomi keluarga. Di samping menjalankan peran produktifnya mereka juga menjalankan peran reproduktif dan peran community guna mendukung peran produktifnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran produktif perempuan dalam mempertahankan ekonomi keluarga pasca banjir bandang di Bukit Lawang, adalah: banjir bandang, kehilangan kepala keluarga, biaya kehidupan anak-anak, pengunjung dan tamu wisata, lingkungan hidup dan kepariwisataan, keamanan dan kenyamanan kawasan wisata, retrebusi pengunjung yang berulang-ulang, promosi kawasan wisata Bukit Lawang, kepastian kepemilikan lahan, trauma sindrom, kurangnya keahlian berwirausaha, kurangnya perhatian pemerintah di sektor ekonomi, dan akses modal terbatas.
3. Perempuan yang ditinggal mati suaminya akibat korban banjir bandang Bukit Lawang memiliki akses dan kontrol yang rendah terhadap sumber daya. Hal ini dibuktikan dengan; *Pertama*, variasi pendidikan formal yang mereka terima antara SD hingga SMA. *Kedua*, tidak memiliki pendidikan informal dalam berwirausaha, seperti pelatihan keterampilan dan kewirausahaan. *Ketiga*, memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengelola sumber

daya alam. *Keempat*, memiliki modal terbatas dalam berwirausaha, dan tidak memiliki akses yang luas terhadap permodalan.

## **B. Saran dan Rekomendasi**

Dari hasil kesimpulan tersebut, maka penelitian ini memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Melihat dari perkembangan global, dimana pengangguran semakin bertambah, dan jumlah lapangan kerja semakin sedikit. Juga melihat kemampuan perempuan yang ditinggal mati suaminya akibat korban banjir bandang Bukit Lawang dalam mempertahankan ekonomi keluarga. Maka seluruh masyarakat Bukit Lawang dan Pemerintah Kabupaten Langkat diharapkan mampu memberikan ruang yang luas dan mengembangkan potensi peran produktif perempuan guna terciptanya ekonomi yang berbasis kerakyatan.
2. Melihat dari tahapan-tahapan perkembangan kawasan wisata Bukit Lawang yang sudah ramai dikunjungi wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Maka masyarakat Bukit Lawang dan Pemerintah Kabupaten Langkat harus mempromosikan kawasan wisata Bukit Lawang baik melalui program, media cetak, media elektronik, maupun melalui situs resmi Bukit Lawang. Di samping itu, Pemerintah dituntut untuk melakukan penataan Kawasan Wisata Bukit Lawang bersama dengan masyarakat atas dasar saran dan pertimbangan masyarakat. Sehingga pengunjung dapat mengenal dan mengakses Bukit Lawang secara lebih baik.
3. Melihat dari keterbatasan kemampuan perempuan yang ditinggal mati suaminya akibat korban banjir bandang Bukit Lawang dalam mengakses dan mengontrol sumber daya. Maka Pemerintah Kabupaten Langkat harus berperan aktif guna melaksanakan pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan kepariwisataan bagi masyarakat Bukit Lawang. Serta Pemerintah juga harus pro aktif dalam permodalan kredit lunak bagi perempuan Bukit Lawang yang menjalankan aktivitas produktifnya. Sehingga kaum perempuan dapat mengelola sumber daya alam kawasan wisata Bukit Lawang secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Karim.
- A.M. Saefuddin, *Kiprah dan Perjuangan Perempuan Salihat*, dalam buku *Membincang Feminisme Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1996).
- Alan Jolis, *Bank Kaum Miskin: Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*, ter. Irfan Nasution, (Depok: Marjin Kiri), 2007.
- al-Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat Alfaz al-Quran*, (Beirut: Dar al-Katib al-'Arabiyy tt.)
- Arthanto Ridho Laksono, *Pemecahan Masalah Pada Wanita Sebagai Orang Tua Tunggal*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat, *Kabupaten Langkat dalam Angka Tahun 2008*.
- Badan Pusat Statistik Langkat, *Kabupaten Langkat dalam Angka 2009*.
- Carol Tavris, *Mismeasure of women*, (New York: Touchstone) 1992.
- Carolyn Sachs, *Gendered Fields: Rural Women, Agriculture, and Environment*, (USA: Westview Press Inc.) 1996.
- Dadang S. Anshori, *Membincangkan Femenisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial kaum Wanita*, (Bandung, Pustaka Hidayah, 1997).
- Declaration of Mexico the Equality of Women and Their Contribution to Development and Peace* (Mexico 1975).  
*World Plan of Action for the Implementation of the*

*Objectives of the International Women's Year. United Nations Decade for Women (Equality, Development and Peace) 1976-1985. World Conference of the United Nations Decade Women (Copenhagen 1980): World Conference to Review and Appraise the Achievement of the United Nations Decade for Women (1985).*

Ega Kumala, *Penataan Ruang Kawasan Wisata Bukit Lawang Pasca Banjir Bandang*, Thesis, (Medan, Sekolah Pascasarjana USU, 2005).

Euis Amalia, *Perempuan dan Ekonomi*, dalam Potret Perempuan dalam Teori dan Realitas: meretas Paradigma Kesetaraan, (Jakarta: PSW Press), 2007.

Gina Puspita, *Menghadapi Peran Ganda Wanita dalam Membicarakan Feminisme*.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Pandangan Islam tentang Gender*, dalam buku *Membicarakan Feminisme*.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Perlindungan Islam terhadap Hak Ekonomi Perempuan dalam Membicarakan Feminisme*.

John M. Enchols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995.

Joyce P. Jacobsen, *The Economic of Gender*, Oxford: Blackwell, 1994.

*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992).

Leila Ahmed, *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*, diterjemahkan oleh M.S. Nasrulloh, *Wanita dan Gender Dalam Islam, Akar-Akar Historis Perdebatan Modern* (Jakarta : Lentera Basritama, 2000).

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*.

Margaret Thornton, "The Cartography of Public and Private," dalam Margaret Thornton (ed.), *Public and Private, Feminis Legal Debates* (Australia : Oxford

University Press, 1995).

Mary Astuty, "Pendidikan Berperspektif Gender," dalam Sindhunata (ed.), *Membuka Masa Depan Anak-Anak Kita, Mencari Kurikulum Pendidikan Abad XXI* (Yogyakarta Kanisius, 2000), Cet. I, 143-146.

Mubyarto dkk. *Etos Kerja dan Kohesi Sosial*. (Yogyakarta, Aditya Media, 1991).

Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam wa-taqat al-Muattalah*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah) 1964.

Muhammad Quraish Shihab, *Konsep Wanita Menurut Qur'an, Hadis dan Sumber-Sumber Ajaran Islam*, dalam *Wanita Islam Indonesia dalam kajian Tekstual dan Kontekstual*, Kumpulan Makalah Seminar, Seri INIS XVIII, Jakarta, 1993.

Muhammad Thalib, *Solusi Islam terhadap Dilema Wanita Karir*, (Yogyakarta, Wihdah Press Yogyakarta, 1999).

Muhammad Umar Syadat Hasibuan, *Revolusi Politik Kaum Muda*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Muhammad Umar Syadat Hasibuan, *Revolusi Politik Kaum Muda*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2008).

Murtahada Mutahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 1995).

Musdah Mulia dalam pengantar pada *A Compilation Papers Presented at The Workshop on Islam and The Advancement of Woman*, Jakarta, 21-24 April 1994.

Nasaruddin Umar, *Argumen kesetaraan Jender* (Jakarta: Paramadina, 1999).

Nilanjana Mukherjee dkk, *Masyarakat, Kemiskinan, dan Mata Pencaharian: Mata Rantai Pengurangan Kemiskinan di Indonesia*, Kerjasama Departemen Bantuan Luar Negeri dan Kantor Perwakilan Bank Dunia di Jakarta, 2002.

Oakley, *Sex, Gender and Society*, dalam Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 1972.

Pemerintah Kabupaten Langkat, *Cikal Bakal Pembangunan*

- Objek Wisata Bukit Lawang*, (Langkat, Langkat Press, 1994).
- Pusat Bahasa Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 2003).
- Rancangan Pengarusutamaan Gender di Indonesia*, Kantor Meneg PP, Jakarta, 2002.
- Ratna Megawangi, *Feminisme: Menindas Peran Ibu Rumah Tangga dalam Membicarakan Feminisme*.
- Saied Reza Amali, *Harapan-Harapan Feminis dan Respon Perempuan Muslim*, dalam *Membela Perempuan; Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, (Jakarta: Penerbit Al-Huda), 2005.
- Siti Ruhani Dzuhayatin, "Problem Peningkatan Sumber Daya Perempuan, dalam *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan*", Ed. Binar, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta, Universitas Indonesia, 1996).
- Susan Moller Okin, *Justice Gender and the Family*, (USA: Princeton University Press)c, 1987.
- Suwinah Alwy AS, *Peran Wanita dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Membicarakan Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1996).
- Syaikh Muhammad al-Gazālī, *al-Haqq al-Murr* (Mesir: Dār al-Bayān al-Turās, 1987).
- Tati Krisnawaty, *Peluang Kerja Perempuan Miskin dan Strategi Survive*, dalam buku Fauzie Ridjal, dkk. (Editor) *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1993).
- Taufiq Abdullah, *Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi* (Jakarta, LP3ES, 1982).

- Tazul Islam, *Microcredit and Poverty Alleviation*, (England: Ashgate Publishing Limited, 2007).
- Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, *Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam)*, Siti Musdah Mulia (ed), Cetakan Pertama, Desember 2001.
- Tumbu Saraswati, *Peran Ganda Wanita Sebagai Sumber Daya Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Generasi Muda dalam Membicarakan Feminisme*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Refika Aditama, 2006).
- Wahid Zaini, *The Advancement of Women's Role*, dalam *A Compilation Papers Presented*.
- Warsani, *Diskriminasi terhadap Wanita, Problema dan Tantangan di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Antropologi Budaya pada Fakultas Hukum USU, 1998.
- Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, (Jakarta, LP3ES, 2002).
- Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural*, (Jakarta, LP3ES, 2002).
- Yuliani Liputo, *Gerakan Perempuan dan Evolusi Teori*

*Pembangunan dalam Membicarakan Feminisme,*

Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an; Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Zainatun Subhan, *Rekonstruksi Pemahaman jender dalam Islam: Agenda Sosio-Kultural dan Politik Peran Perempuan*, (Jakarta: Lembaga Kajian Humanis dan Feminis Islam), Cet. I, April 2002.

Zulham, *Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Kawasan Wisata Pasca Banjir Bandang di Bukit Lawang*, Laporan Penelitian hukum Lingkungan, (Program Pasca Sarjana USU, Medan, 2003).

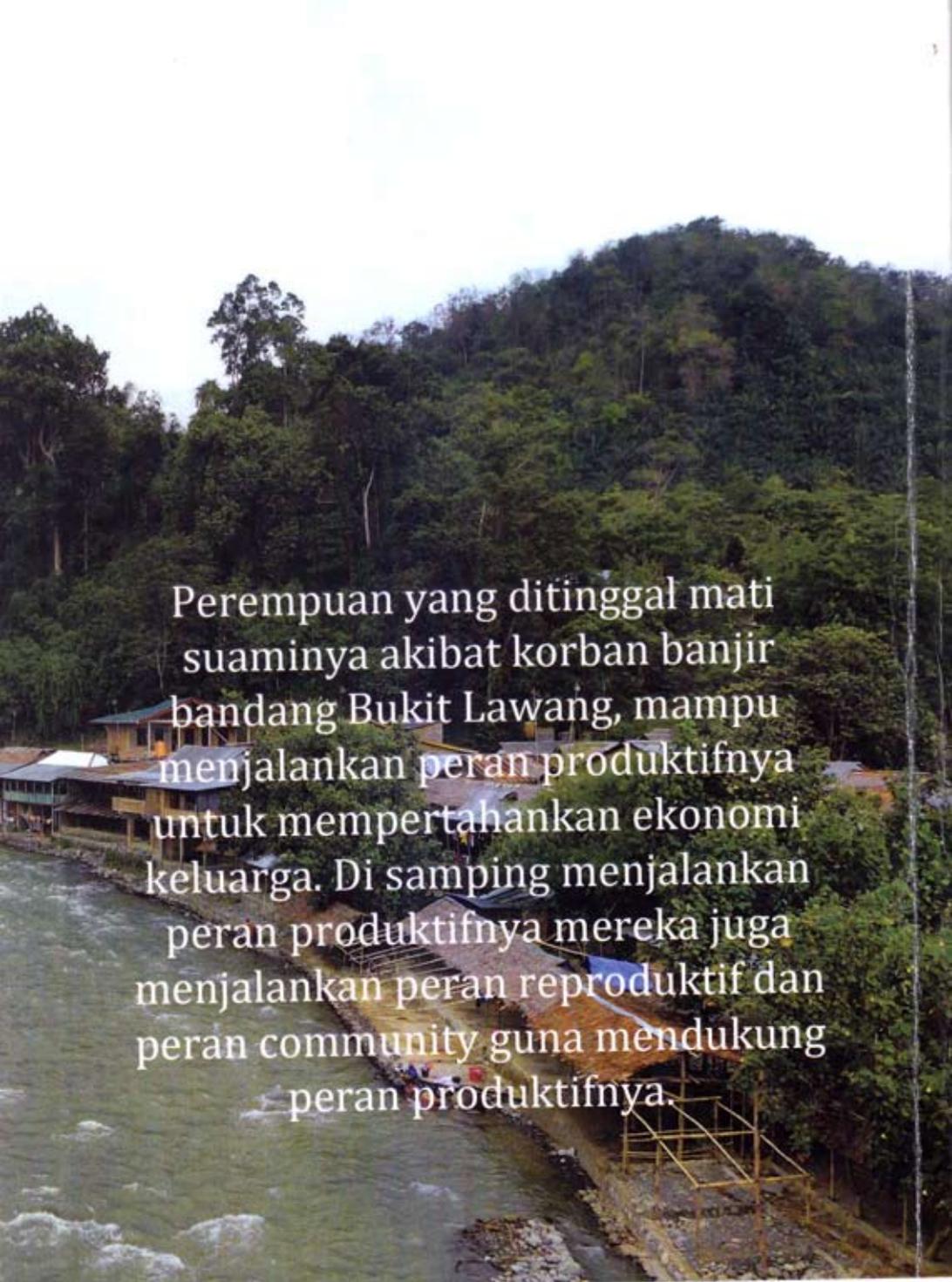
**Media Massa :**

1. Waspada 3 Nopember 2003.
2. Analisa 3 Nopember 2003.
3. Kompas 3 Nopember 2003.
4. Waspada 05 Nopember 2003, No. 20817.

**Website :**

1. <http://www.mediaindo.co.id/berita>
2. <http://www.kompas.com/kompas-cetak/031/07/utama/675117.htm>.
3. <http://www.lfip.org/english/pdf/bali-seminar/Pemberdayaan%20perempuan%20-%20erna%20sofyan%20syukrie.pdf>.
4. <http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/peran%20wanita.pdf>



An aerial photograph of a village situated along a river. In the foreground, a dam is under construction, with a concrete structure and wooden scaffolding visible. The river flows through the village, which consists of several small buildings with corrugated metal roofs. The background is dominated by a dense, green forest covering a hillside. The sky is overcast.

Perempuan yang ditinggal mati  
suaminya akibat korban banjir  
bandang Bukit Lawang, mampu  
menjalankan peran produktifnya  
untuk mempertahankan ekonomi  
keluarga. Di samping menjalankan  
peran produktifnya mereka juga  
menjalankan peran reproduktif dan  
peran community guna mendukung  
peran produktifnya.